

Buku Wedra

by Buku Wedra Buku Wedra

Submission date: 03-Sep-2018 07:59PM (UTC+0700)

Submission ID: 996310143

File name: BUKU_ILMIAH_FPI.doc (764.5K)

Word count: 36149

Character count: 248011

**FILOSOFI PENDIDIKAN INDONESIA: KAJIAN
SUMBER HUKUM PENDIDIKAN**

Dr. Wedra Aprison, M.Ag

**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI
2017**

FILOSOFI PENDIDIKAN INDONESIA: KAJIAN SUMBER HUKUM PENDIDIKAN

LP2M IAIN BUKITTINGGI

Jl. Gurun Aua Kubang Putih Kabupaten Agam

Sumatera Barat

26181

Email: lp2miainbukittinggi@yahoo.com

Versi Cetak

Penulis : Dr. Wedra Aprison, M.Ag

Reviewer : Dr. H. Nunu Burhanuddin, Lc, M.Ag

Tata Letak : Fadhilla Yusri, M.Pd, Kons

Edisi cetak pertama September 2017

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini

Tanpa seizin penerbit.

ISBN: 978-602-6377-06-7

Isi diluar tanggungjawab percetakan

Kata Pengantar

Syukur alhamdulillah, berkat rahmat, taufik, dan hidayah Allah Swt., penulis dapat menyelesaikan penulisan buku *Filosofi Pendidikan Indonesia: Kajian Sumber Hukum Pendidikan* ini. Shalawat dan salam semaoga selalu tercurah pada panutan umat, Nabi Muhammad Saw.

Cukup banyak kebijakan di masa lalu yang kandas di tengah jalan karena para perumus kebijakan mengabaikan landasan filosofis, yang mutlak itu. Filosofi tanpa filosofi, filosofi yang keruh, melahirkan kebijakan bermasalah. Hanya filosofi (atau kalau dikehendaki: kredo, visi, misi, paradigma) yang jernih dapat mendasari lahirnya pendidikan bermakna. Perlu pemikiran bersama untuk melahirkan filosofi pendidikan yang layak dijadikan dasar pendidikan nasional sekarang dan di masa depan. Sebab, kalau benar filosofi pendidikan (kalau masih ada) sudah bergeser dari posisi dan perannya sebagai fondasi pendidikan, menemukan, mereposisinya, perlu kesungguhan usaha, dan proses yang panjang.

Anis Syukur¹, bahwa sejarah pendirian lembaga pendidikan sedari awal mengalami "salah niat." Hal ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh kolonialisme yang

¹http://diktis.kemenag.go.id/index.php?artikel=lihat&jd=330#.VGlezGd_aOU. Diakses Hari Senin tanggal 9 Mei 2016

berlangsung selama ratusan tahun. Sekolah formal didirikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi diniatkan untuk mengisi lapangan pekerjaan terutama di instansi pemerintah. Belakangan disiapkan untuk mengisi pekerjaan di dunia industri. Kita ingat ketika dulu dibuka Sekolah Rakyat (SR) atau Pendidikan Guru Agama (PGA) ditujukan untuk mengisi lowongan pegawai Pemerintah dan mengisi kekosongan guru. Pada masa awal-awalnya, sekolah formal ini diperhadapkan *head to head* dengan lembaga pendidikan pengusung tradisional. Lembaga pendidikan tradisional tersebut dipandang masih memegang konsep pendidikan idealis, yang direpresentasikan oleh pesantren. Maka, tidaklah aneh jika Sekolah Rakyat (SR) saat itu tidak menarik minat masyarakat, bahkan dicerca dan dicela oleh masyarakat yang masih melihat dengan "jernih" hakikat dan tujuan sebuah pendidikan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, pertahanan pendidikan tradisional ternyata jebol ketika menghadapi serangan budaya yang ditumpangi paradigma yang berbeda, bahkan cenderung tergilas. Tujuan penyelenggaraan pendidikan untuk mengisi lapangan pekerjaan terus menerus didengungkan, bahkan didukung dengan sebuah sistem nasional. Nah, akhirnya muncullah kesan bahwa menempuh pendidikan hanyalah untuk pekerjaan. Tidaklah aneh jika di beberapa daerah, masyarakat tidak memandang penting pendidikan. Sejak tahun 2006-2007, saya keliling di beberapa daerah di Kalimantan yang bisa dikategorikan ke dalam 3T (terdalam, terluar, termarginalkan). Menarik sekali mendengarkan keluhan para guru atas perilaku sebagian muridnya yang pada saat musim panen, seperti masa mengambil getah karet, atau musim ikan, mereka tidak

menganggap penting pendidikan. Bahkan para murid dengan tanpa merasa bersalah dan merasa tidak penting untuk ikut ujian nasional (UN). Justru para guru yang kemudian sibuk mencari sang murid agar ikut ritual tahunan tersebut. Fenomena ini sebenarnya merupakan kritik terhadap proses pendidikan selama ini. Dalam bahasa saya, "pendidikan belum menjawab kebutuhan masyarakat yang sebenarnya".

Yah... memang jika dicermati lebih jeli, program pendidikan yang diusung pemerintah saat ini masih sebatas untuk mengisi lowongan pekerjaan yang hingga saat ini masih belum berakhir, bahkan tampaknya tidak akan ada akhirnya. Pendidikan didesain terus menerus untuk mengisi lowongan tersebut. Tidaklah aneh jika kurikulum berubah terus menerus seiring dengan pergantian pemangku kebijakan dan bergantinya zaman yang tanpa disertai paradigma yang kokoh.

Untuk mengembangkan pendidikan sekurang-kurangnya diperlukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Diperlukan landasan atau basis filsafat untuk menjadikan dasar dalam menyusun paradigma bagi pengembangan ilmu pendidikan. Filsafat yang akan dijadikan dasar pengembangan tersebut haruslah filsafat yang berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia. Bisa jadi beberapa aliran filsafat yang berkembang di Barat dapat digunakan, setelah mengkonsultasikan filsafat tersebut ke esensi norma yang ada di Indonesia.
2. Kita memerlukan paradigma bagi penyusunan metodologi pengembangan ilmu pendidikan. Paradigma yang dimaksud ialah kerangka logika yang dapat menuntun kita dalam menyusun

metodologi pengembangan ilmu pendidikan. Bentuknya tentu saja model-model logika. Paradigma inilah kelak yang diperkirakan mampu menuntun kita menyusun metodologi pengembangan ilmu Pendidikan.

3. Kita memerlukan Metodologi Pengembangan Ilmu Pendidikan tersebut. Metodologi itu dapat berupa metode-metode pengembangan teori ilmu pendidikan dan dapat juga berupa tuntunan praktis berupa langkah-langkah dalam mengembangkan teori-teori Ilmu Pendidikan.
4. Kita memerlukan model-model penelitian untuk digunakan dalam penelitian pendidikan. Dari penelitian itulah kelak kita menemukan teori-teori Ilmu Pendidikan.
5. Kita memerlukan suatu organisasi yang berskala nasional. Organisasi itu diharapkan merencanakan, memonitor, dan merangkum hasil-hasil penelitian tersebut untuk disusun secara sistematis dalam batang tubuh ilmu pendidikan.

Bukittinggi, November 2016
Penulis,

Wedra Aprison

Daftar Isi

PENGANTAR.....i - iv

DAFTAR ISI.....v

BAB I Pendahuluan

1. Kenapa Buku ini Lahir.....1
2. Filosofi, Filsafat dan Peranya.....13
3. Filosofi Pendidikan.....27

BAB II Filosofi Pendidikan dalam UUD 1945

1. Pengantar.....72
2. Amandemen UUD 1945 Sebagai Kepedulian Pendidikan.....76
3. Perubahan Pasal Pendidikan dan Implikasinya 84

BAB III Filosofi Pendidikan Dalam UU No 20 Tahun 2003

1. Pendahuluan.....141
2. Filsafat Negara Sebagai Landasan Pendidikan Indonesia.....148
3. Ideologi dan landasan pemerintahan indonesia.....153

BAB IV FILOSOFI PENDIDIKAN DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Filosofi Pendidikan dasar dalam Kurikulum 2013

1. Sekolah Dasar.....212
2. Karakteristik Kurikulum 2013.....218
3. Tujuan Kurikulum 2013.....219

Filosofi Pendidikan Dasar dalam Kurikulum Sekolah Menengah SLTP/MTs

1. Pengantar.....230
2. Rasional Pengembangan Kurikulum 2013 231
3. Karakteristik Kurikulum 2013..... 235

Filosofi Pendidikan dalam Kurikulum Sekolah Menengah Atas

1. Pengantar249
2. Karakteristik Kurikulum 2013.....249
3. Kerangka Dasar Kurikulum.....256

Bab V. FILOSOFI PENDIDIKAN TINGGI

1. Pengantar.....267
2. Bentuk Perguruan Tinggi.....268
3. Beberapa Dimensi Perguruan Tinggi.....271

Daftar Bacaan

Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1. Kenapa Buku ini Lahir

Kenapa lahir buku ini? Jawaban atas pertanyaan ini akan dijelaskan berdasarkan teori atau logika berfikir perencanaan dari Banghart and Trull², yang menjelaskan langkah perencanaan pendidikan, terutama pada langkah identifikasi masalah pendidikan, yakni 1. Menentukan ruanglingkup perencanaan, 2. *Studying what has been* atau mengkaji apa yang telah direncanakan, 3. *determining what has been versus what should be* artinya membandingkan apa yang telah dicapai dengan apa yang seharusnya dicapai. Maka latar belakang ini berbicara apa yang sudah dikaji, atau apa yang sudah dilakukan selama ini. Dalam hal ini tentunya berkaitan dengan pengkajian filosofi pendidikan, sebagai dasar atau arah kebijakan ke depan dalam mengembangkan pendidikan Indonesia.

Banyak orang yang tidak bisa merasakan pentingnya paradigma, bahkan di lingkungan akademisi pun penguasaan paradigma dianggap tidak begitu perlu. Padahal paradigma memegang peranan penting dalam *men-drive* langkah seseorang. Memahami paradigma memang perlu mempelajari filsafat. Namun sayangnya di dalam dunia pendidikan, filsafat tidak dipandang dengan "dua mata" (sama dengan "memandang dengan mata

²Frangk W. Banghart Albert Trull, *Educational Planning*, New York, The Macmillan Company. Bandingkan juga dengan Udin Saud dan Abin Syamsuddin Makmun, *Perencanaan Pendidikan: Suatu Pendekatan Komprehensif*, Bandung: Rosdakarya.

sebelah"). Hampir mata kuliah filsafat menjadi mata kuliah yang dipersiapkan untuk disingkirkan. Akan lebih cepat tersingkir jika akan ada materi baru/muatan tambahan. Alhasil, produk pendidikan kehilangan orientasi; antara menemukan jati dirinya sebagai manusia (*insan kamil*) atau menjadi 'budak' perubahan zaman yang menuju pada ketidakjelasan.

Mansur Fakih menjelaskan bahwa para praktisi pendidikan seperti guru dan dosen di lembaga pendidikan ataupun sekolah formal, pelatih pada tempat kursus maupun lokakarya atau bahkan para pemandu pelatihan di berbagai arena pendidikan non formal ataupun pendidikan rakyat di kalangan buruh, petani maupun rakyat miskin, banyak yang tidak sadar bahwa ia tengah terlibat dalam suatu pergumulan politik dan ideologi melalui arena pendidikan. Umumnya orang memahami pendidikan sebagai suatu kegiatan mulia yang selalu mengandung kebajikan dan senantiasa berwatak netral. Dunia pendidikan terkejut, ketika asumsi bahwa dunia pendidikan yang selalu dimuliakan dan diasumsikan mengandung kebajikan tersebut mendapat kritik mendasar dari Paulo Freire awal tahun 70-an, serta Ivan Illich pada periode yang sama. Kritik mereka menyadarkan banyak orang bahwa pendidikan yang selain hampir dianggap sakral, penuh kebajikan tersebut ternyata mengandung juga penindasan³.

³William F. On'nel, *Ideologi-ideologi Pendidikan*, terj. Omi Intan Naomi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. x

Di Amerika Serikat, kritik terhadap dunia pendidikan datang dari pengaruh pikiran kritis terhadap Kapitalisme. Dengan mengutip Samuel Bowels, yang melakukan analisis politik ekonomi terhadap pendidikan. Paling tidak di Amerika baginya, pendidikan merupakan reproduksi terhadap sistem kapitalisme belaka. Dari kedua ulasan pakar di atas setidaknya dapat menyadarkan orang bahwa tidak mungkin pendidikan nertal, melainkan sarat dengan berbagai kepentingan.

Dalam bahasa yang agak tajam, Winarno Surahmat⁴, menjelaskan kondisi pendidikan Indonesia dalam Judul “filosofi pendidikan: menemukan kembali landasan yang hilang”. Judul tulisan ini jelas sangat kritis terhadap pelaksanaan pendidikan kita di Indonesia saat ini. Ia mensinyalir seolah pendidikan kita tak punya paradigma. Lebih lanjut ia menjelaskan ada sebuah fenomena yang sering berlalu di depan mata, yang hampir-hampir tak terdeteksi dengan mata, yakni proses kejiwaan yang terjadi ketika pendidik harus memilih antara menerapkan pendidikan tanpa menghiraukan landasan filosofisnya, dengan mendalami filosofi pendidikan sebagai pengetahuan, tanpa menghiraukan penerapannya.

Memilih salah satu diantara keduanya, yang manapun, berarti memilih yang tidak benar. Secara hakiki, tak ada aktivitas atau praktek pendidikan yang dapat berlangsung tanpa dasar filosofi. Pendidikan tanpa filosofi, yang jelas, bukan saja goyah akan tetapi berbahaya.

⁴Winarno Surahmat, *Pendidikan Nasional: Strategi dan Tragedi*, (Jakarta: PT. Kompas Media Utama, 2009), h. 2

Sebaliknya, tak ada filosofi yang dapat mendalami problema pendidikan tanpa menjiwai praktek pendidikan. Filosofi pendidikan yang tidak berkelanjutan ke dalam penerapannya dalam kehidupan nyata, menjadi mubazir dan tak layak disebut filosofi pendidikan.

Memang pada saat tertentu, dalam konteks tertentu, bisa muncul problem pendidikan yang lebih dominan bersifat teknis, dan di saat yang lain lebih bersifat finansial, infrastruktur, instruksional, ketenagaan, kultural, atau politik? Tetapi apakah problem yang mengemuka pada suatu saat bersifat teknis, politis, yuridis, ekonomis atau gabungan dari semuanya, pada saat yang sama problematika pendidikan itu juga bersifat normatif, yakni terkait dengan norma, standar atau nilai yang mendasar, yang memberikan relevansi dan makna pada sifat problematik pendidikan yang teknis dan pragmatis?

Winarno menjawabnya dengan menggabungkan keduanya, praktek yang berdasarkan filosofi yang relevan, untuk senantiasa memberi pembenaran, arah tujuan, dan akan pada seluruh spektrum kegiatan pendidikan. Soalnya saat ini di depan mata terpampang masalah lain. Masalah yang terkait dengan ini adalah sudah lama filosofi pendidikan menghilang, menghilang atau dihilangkan dari dunia pendidikan. Sudah semakin banyak guru yang memandang filosofi pendidikan sebagai simbol keusangan, sebagai *the thing in the past*. Sudah semakin banyak guru yang mengganti filosofi yang melambangkan kekunoan dengan teknologi yang melambangkan kekinian.

Memang belum pernah dijumpai kasus yang matimatis menolak filosofi pendidikan. Keduanya, filosofi dan pendidikan, memang tidak berhadapan dalam posisi

yang bertentangan diametral, yang berpotensi melahirkan masalah. Paling jauh, banyak guru yang tidak tahu, tidak hirau, atau mungkin kurang yakin mengenai manfaat filosofi pendidikan.

Ternyata lagi, memang bukan hanya guru, yang harus bekerja keras di lapangan, yang bersikap demikian. Juga di kalangan birokrasi, kalangan mereka yang seharusnya berfilosofi ketika merencanakan, ketika memutuskan, ketika membiayai, atau ketika mengelola, tidak banyak yang peduli untuk memberinya dasar filosofis. Akibatnya dunia pendidikan bergantung pada penafsiran masing-masing, dan bermotivasi berbagai kepentingan. Dari sistem pendidikan nasional, dari politik pendidikan dan dari berbagai kebijakan, kita temukan cukup banyak petunjuk ke arah itu.

Cukup banyak kebijakan di masa lalu yang kandas di tengah jalan karena para perumus kebijakan mengabaikan landasan yang mutlak itu. Filosofi tanpa filosofi, filosofi yang keruh, melahirkan kebijakan bermasalah. Hanya filosofi (atau kalau dikehendaki: kredo, visi, misi, paradigma) yang jernih dapat mendasari lahirnya pendidikan bermakna. Perlu pemikiran bersama untuk melahirkan filosofi pendidikan yang layak dijadikan dasar pendidikan nasional sekarang dan di masa depan. Sebab, kalau benar filosofi pendidikan (kalau masih ada) sudah bergeser dari posisi dan perannya sebagai fondasi pendidikan, menemukan, mereposisinya, perlu kesungguhan usaha, dan proses yang panjang. Anis

Syukur⁵, bahwa sejarah pendirian lembaga pendidikan sedari awal mengalami "salah niat." Hal ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh kolonialisme yang berlangsung selama ratusan tahun. Sekolah formal didirikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi diniatkan untuk mengisi lapangan pekerjaan terutama di instansi pemerintah. Belakangan disiapkan untuk mengisi pekerjaan di dunia industri. Kita ingat ketika dulu dibuka Sekolah Rakyat (SR) atau Pendidikan Guru Agama (PGA) ditujukan untuk mengisi lowongan pegawai pemerintah dan mengisi kekosongan guru. Pada masa awal-awalnya, sekolah formal ini diperhadapkan *head to head* dengan lembaga pendidikan pengusung tradisional. Lembaga pendidikan tradisional tersebut dipandang masih memegang konsep pendidikan idealis, yang direpresentasikan oleh pesantren. Maka, tidaklah aneh jika Sekolah Rakyat (SR) saat itu tidak menarik minat masyarakat, bahkan dicerca dan dicela oleh masyarakat yang masih melihat dengan "jernih" hakikat dan tujuan sebuah pendidikan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, pertahanan pendidikan tradisional ternyata jebol ketika menghadapi serangan budaya yang ditumpangi paradigma yang berbeda, bahkan cenderung tergilas. Tujuan penyelenggaraan pendidikan untuk mengisi lapangan pekerjaan terus menerus didengungkan, bahkan didukung dengan sebuah sistem nasional. Nah, akhirnya

⁵http://diktis.kemenag.go.id/index.php?artikel=lihat&jd=330#.VGlezGd_aOU. Diakses Hari Senin tanggal 9 Mei 2016

muncullah kesan bahwa menempuh pendidikan hanyalah untuk pekerjaan. Tidaklah aneh jika di beberapa daerah, masyarakat tidak memandang penting pendidikan. Sejak tahun 2006-2007, saya keliling ke beberapa daerah di Kalimantan yang bisa dikategorikan ke dalam 3T (terdalam, terluar, termarginalkan). Menarik sekali mendengarkan keluhan para guru atas perilaku sebagian muridnya yang pada saat musim panen, seperti masa mengambil getah karet, atau musim ikan, mereka tidak menganggap penting pendidikan. Bahkan para murid dengan tanpa merasa bersalah dan merasa tidak penting untuk ikut ujian nasional (UN). Justru para guru yang kemudian sibuk mencari sang murid agar ikut ritual tahunan tersebut. Fenomena ini sebenarnya merupakan kritik terhadap proses pendidikan selama ini. Dalam bahasa saya, "pendidikan belum menjawab kebutuhan masyarakat yang sebenarnya".

Yah... memang jika dicermati lebih jeli, program pendidikan yang diusung pemerintah saat ini masih sebatas untuk mengisi lowongan pekerjaan yang hingga saat ini masih belum berakhir, bahkan tampaknya tidak akan ada akhirnya. Pendidikan didesain terus menerus untuk mengisi lowongan tersebut. Tidaklah aneh jika kurikulum berubah terus menerus seiring dengan pergantian pemangku kebijakan dan bergantinya zaman yang tanpa disertai paradigma yang kokoh.

Apa yang dirasakan oleh banyak pakar di atas, agaknya Ahmad Tafsir juga mengeluhkan hal yang hampir sama terjadi pada umat Islam, dalam kasus pendirian

lembaga pendidikan. Lebih jauh Tafsir⁶ menyatakan, berdasarkan penglihatan yang agak mendalam, terutama di daerah Jawa Barat, dapat disimpulkan bahwa banyak lembaga pendidikan (sekolah) yang ada berjalan tanpa teori yang jelas, riwayat pendirian sekolah, ataupun pesantren dan sejenisnya, biasanya mengikuti pola sebagaimana dijelaskan berikut ini.

Dimulai dari omong-omong antara sesama anggota masyarakat yang menggambarkan bahwa mereka memerlukan sekolah. Disusul dengan kegiatan anggota masyarakat mengadakan rapat atau berkumpul antara beberapa tokoh masyarakat setempat. Setelah itu mereka mengadakan pertemuan yang melibatkan anggota masyarakat yang agak lebih banyak. Biasanya mereka pada pertemuan kedua ini telah memutuskan perlu dibuat sekolah untuk anak-anak mereka. Mereka urunan untuk membeli tanah, pada kasus lain ada orang yang mewakafkan tanahnya. Dalam kegiatan itu biasanya ada satu orang yang dituakan. Orang inilah yang bertindak sebagai pemimpin.

Singkat cerita, didirikan gedung sekolah, dalam kasus lain menumpang terlebih dahulu pada rumah penduduk, atau pada gedung apa saja yang mungkin. Dibentuk panitia penerimaan murid baru, ditentukanlah sekolah apa yang hendak didirikan, lantas rekrutmen tenaga, penentuan pimpinan sekolah. Dan diciptakan riwayatnya, berjalanlah sebuah sekolah, sebut saja MTs.

⁶Ahmad Tafsir, *Epistemologi untuk Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, 1995), h. 8

Berdasarkan pengamatan, semua itu seolah-olah berjalan secara alamiah. Jenis sekolah yang didirikan tidak begitu dipersoalkan, apalagi diperdebatkan. Setelah disetujui sekolah dan jenjangnya, rumusan tujuan sekolah yang hendak dicapai tidak juga dituliskan secara jelas. Syarat-syarat dalam rekrutmen tenaga (pimpinan, guru, pegawai) jarang sekali dinyatakan dengan jelas, yang sering diketahui ialah mereka menetapkan secara aneh: siapa saja yang bersedia beramal silakan mengajar, toh gajinya juga ada di akhirat kelak. Perencanaan dana biasanya tidak jelas juga. Kepalanya biasanya diserahkan kepada orang yang paling banyak jasanya dalam membangun sekolah itu. Syarat-syarat dalam rekrutmen murid juga demikian, yang penting ada yang mau masuk, yang penting anak-anak kita bisa bersekolah, demikian yang sering saya dengar. Apa yang dapat disimpulkan dari cerita ini, adalah belum adanya paradigma yang jelas dalam mengelola pendidikan di kalangan umat Islam sendiri.

Pembangunan pendidikan Indonesia tidak boleh dilepaskan dengan dasar filosofis bangsa ini didirikan. Persoalannya adalah seolah pendidikan nasional tidak memperhatikan atau mendasarinya atas filosofi bangsa ini, usaha-usaha untuk mencari atau menterjemahkan filosofi pendidikan yang terkandung dalam sistem hukum atau sumber hukum kita juga dirasa sangat kurang sekali. Seolah pendidikan kita berjalan asal jalan. Kegiatan pendidikan, program pendidikan, tindakan pendidikan seolah tanpa landasan. Usaha untuk menterjemahkan landasan filosofi bangsa ini ke dalam rumusan filosofi pendidikan juga dirasa sangat kurang sekali. Pada tataran perumusan konseptual saja sangat kurang, apatah lagi

menerjemahkan landasan filosofi bangsa ini ke dalam setiap program-program pendidikan yang dilakukan oleh negara dalam arti pemerintah ini.

2. Filosofi, Filsafat dan Perannya .

Sebelum kita terlalu jauh membicarakan hal pokok masalah dalam buku ini terlebih dahulu akan dijelaskan apa itu filsafat dan filosofi, paradigma, ideologi, dan filsafat pendidikan

Filsafat

Pembicaraan filsafat adalah pembicaraan yang sangat menarik. Dalam sejarah manusia filsafat telah memainkan peran yang sangat penting. Maka perlu terlebih dahulu dijelaskan apa itu filsafat.

Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani Kuno, yakni *philosophia* dan *philosophos* yang berarti “orang yang cinta kebijaksanaan” atau “cinta pada pengetahuan. Adalah phitagoras yang pertama sekali menggunakan istilah filsafat pada tahun ke-6 SM. Istilah itu muncul ketika masyarakat Yunani mengagumi kecerdasannya dan menganggap dirinya sebagai ilmuwan yang tahu segala hal. Karena itu, lantas orang bertanya kepadanya apakah anda pemilik kebijaksanaan/pengetahuan? Terhadap pertanyaan tersebut Phitagoras hanya menjawab saya bukan pemilik kebijaksanaan atau pengetahuan. Saya hanya pecinta dan pencari kebijaksanaan. Selanjutnya ia menyatakan, “Tuhanlah pemilik kebijaksanaan dan atau pengetahuan itu⁷.

⁷Akhyar Yusuf, *Filsafat Ilmu: Klasik Hingga Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 2

Poedjawijatna menjelaskan bahwa kata filsafat berasal dari kata Arab yang berhubungan erat dengan kata Yunani, bahkan asalnya memang dari kata Yunani. Kata Yunani nya ialah: *philosophia*. Dalam bahasa Yunani *philosophia* merupakan kata majemuk yang terdiri atas *philo* dan *sophia*; *philo* artinya cinta dalam arti yang luas. Yaitu ingin dan karena itu lalu berusaha mencapai yang diinginkan itu; *sophia* artinya kebijakan yang artinya pandai, pengertian yang mendalam. Jadi menurut namanya saja filsafat boleh diartikan ingin mencapai pandai, cinta kepada kebijakan. Encyclopedia Britannica menjelaskan sebagai berikut.... *is derive from the composite Greek noun philosophia means the loves of pursuit wisdom*. Di dalam encyclopedia of philosophy ada penjelasan sebagai berikut: *the creek word sophia is ordinary translated as wisdom, and the compound philosophia, from which philosophy derives, is translated as the love of wisdom*.

Jadi berdasarkan kutipan itu dapatlah diketahui bahwa dari segi bahasa, filsafat ialah keinginan yang mendalam untuk mendapat kebijakan, atau keinginan yang mendalam untuk mendapat, tetapi apa bijak atau bijaksana itu? Encyclopedia of philosophy menyatakan bahwa wisdom sebagai terjemahan *sophia*, pada zaman Homereus luas sekali maknanya dari segi bahasa. Ia bukan saja pandai atau mendalam dalam bidang intelektual, lapangan mana saja yang Homereus menyebutkan bahwa tukang kayu juga adalah orang yang bijak. Kalau begitu, tinjauan bahasa ini tidak mampu menjelaskan pengertian filsafat, perkataan *sophia* itu sudah mempunyai persoalan.

Akan tetapi, uraian dari segi bahasa ini ada juga manfaatnya⁸.

Poedjawijatna mendefinisikan filsafat sebagai jenis pengetahuan yang berusaha mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan pikiran belaka. Hasbullah Bakry mengatakan filsafat sejenis pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta dan manusia sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh yang dapat dicapai akal manusia dan bagaimana sikap manusia seharusnya setelah mencapai pengetahuan itu. Plato menyatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran asli, dan bagi Aristoteles filsafat adalah pengetahuan yang meliputi kebenaran yang tergabung di dalamnya metafisika, logika, retorika, ekonomi, politik, estetika, dan bagi Alfarabi filsafat adalah pengetahuan tentang alam ujud bagaimana hakikatnya yang sebenarnya. Pythagoras, orang yang mula-mula menggunakan kata filsafat, memberikan definisi sebagai *the love for wisdom*. Menurut Pythagoras, manusia yang paling tinggi nilainya adalah manusia pecinta kebijakan, *lovers of wisdom*, sedangkan yang dimaksud dengan *lovers of wisdom* adalah kegiatan melakukan perenungan tentang Tuhan. Ia membagi kualitas manusia menjadi tiga tingkatan: *lovers of wisdom*, *lovers of success*, *lovers of pleasure*. Immanuel Kant mendefinisikan filsafat sebagai pengetahuan yang menjadi pokok pangkal segala pengetahuan yang tercakup di dalamnya empat persoalan:

⁸Ahmad Tafsir, *Filsafat Umum: Akal dan Hati Sejak Thales Sampai Capra*, (Bandung: Rosdakarya, 2008), h. 10

1. Apa yang diketahui? Jawabannya metafisika
2. Apa yang harus diketahui? Jawabannya etika
3. Sampai dimana harapan kita? Jawabannya agama
4. Apa itu manusia ? jawabannya antropologi.

Perbedaan definisi itu menurut Abu Bakar Atjeh disebabkan oleh berbedanya konotasi filsafat pada tokoh-tokoh itu karena perbedaan keyakinan hidup yang dianut mereka. Perbedaan itu muncul juga karena perkembangan filsafat itu sendiri yang menyebabkan beberapa pengetahuan khusus memisahkan diri dari filsafat. Sampai disini dapat diambil kesimpulan bahwa perbedaan definisi filsafat antara satu tokoh dengan tokoh lainnya disebabkan oleh perbedaan konotasi filsafat pada mereka masing-masing.

Dalam filsafat, kegiatan mencintai pengetahuan/kebijaksanaan itu dilakukan dengan mempertanyakan sesuatu secara mendasar dan menyeluruh. Filsafat dipahami dengan demikian, sebagai upaya terus menerus mencari pengetahuan dan kebenaran. Karena itu, filsafat dengan sendirinya identik dengan cara/atau metode berfikir yang selalu mempertanyakan segala sesuatu secara kritis dan mendasar. Adapun pertanyaan itu muncul dari rasa ingin tahu manusia terhadap dunia dan dirinya. Pertanyaan itu bisa pula berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana atau juga pertanyaan-pertanyaan serius yang membutuhkan keseriusan untuk menjawabnya. Mau kemana kita hari ini, mau melakukan apa kita hari ini, mau liburan kemana kita besok, adalah merupakan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Sedangkan apa makna kehidupan ini, dari apa terciptanya dunia ini, mau kemana kita setelah mati? Bagaimana terciptanya dunia ini, adalah

contoh-contoh pertanyaan rumit dan tidak sederhana. Pertanyaan-pertanyaan serius yang membutuhkan jawaban yang berasal dari perenungan yang mendalam.

Tentang filsafat, Frederich Nietzsche menulis begini, “Setiap filosof besar selalu berkata, pelajarilah makna hidupmu dari cermin hidupmu. Membaca buku-buku filsafat dan memastikan kebahagiaan hidup, tetapi mungkin dapat sedikit banyak membantu mengapa kebahagiaan merupakan salah satu segi dari kehidupan ini yang tidak dapat dipastikan, sebagaimana orang memastikan terjadinya gerhana matahari. Filsafat dapat diibaratkan seperti cermin yang menampung pergumulan hidup. Hidup yang dipantulkan dari cerminan filsafat itu akan menampilkan hal-hal yang jika dihayati secara sepintas tak kelihatan. Membaca filsafat dapat membantu kita untuk mempelajari makna hidup kita melalui cermin hidup kita sendiri.

Ada dua hal yang dapat dibedakan disini: disatu pihak filsafat membantu untuk memahami makna hidup dan di lain pihak hidup menghasilkan renungan filsafat. Yang pertama berasal dari perspektif konsumen filsafat, yaitu para pembacanya, yang terakhir berasal dari perspektif produsennya, yaitu penulisnya. Di dalam pergumulan hidup setiap orang adalah filosof alamiah. Disinilah terlihat bahwa filsafat adalah cerminan kehidupan yang bisa dilibati oleh siapa saja untuk memahami hidupnya. Kita sebut cermin karena filsafat secara tak langsung, yakni lewat pengolahan reflektif, menampilkan kehidupan dalam sosok yang lebih terpahami. Juga, kalau ada aspek hidup yang tak terpahami, seperti kematian, upaya untuk memahami yang

tak terpahami dengan menegaskan bahwa hal itu tak terpahami dapat membantu manusia untuk menerimanya⁹.

Ada beberapa pengertian tentang filsafat, diantaranya sebagai berikut:

1. Filsafat sebagai upaya spekulatif untuk menyajikan suatu pandangan sistematis serta lengkap tentang seluruh realitas. Herbert Spencer, misalnya, menyatakan filsafat sebagai , “*a completely unified knowledge*” yang ia bedakan dengan sains (ilmu) sebagai “*partially unified knowledge*”. Berbeda dengan ilmu-ilmu, filsafat berupaya untuk mempersatukan ilmu-ilmu khusus sehingga menjadi suatu sistem yang utuh. Filsafat mencoba memberikan gambaran (pemetaan) tentang pemikiran manusia yang bercerai berai menjadi suatu keseluruhan (bukan tentang realitas akan tetapi konseptual).
2. Filsafat sebagai upaya untuk melukiskan hakikat realitas paling akhir serta paling dasar yang diakui sebagai suatu hal yang nyata. filsafat mencoba mencari hakiki realita, juga ciri-ciri hakiki dari eksistensi manusia (berbeda dengan ilmu pengetahuan yang hanya meneliti aspek-aspek tertentu dari realitas. Karena filsafat mempertanyakan hakikat realitas, maka pencarian filsafat ini sering memasuki dimensi kepercayaan, misalnya pada kepercayaan adanya Tuhan sebagai zat yang menciptakan semua realitas di alam

⁹Brayen Magee, *Memoar Seorang Filosof: Pengembangan di Belantara Filsafat*, (Bandung: Mizan, 2005), h. x

semesta ini. Filsafat membahas realitas yang paling mendasar atau realitas yang paling akhir.

3. Filsafat sebagai upaya untuk menentukan batas-batas dan jangkauan pengetahuan: sumber pengetahuan, hakikat pengetahuan, keabsahan serta nilai-nilainya. Bidang filsafat yang membahas masalah pengetahuan ini disebut sebagai epistemologi.
4. Filsafat sebagai hasil suatu penelitian kritis atas pengandaian-pengandaian dan pernyataan-pernyataan yang diajukan dari berbagai bidang ilmu pengetahuan. Misalnya, filsafat sosial, filsafat politik, filsafat hukum, filsafat psikologi, filsafat budaya, dan lain-lain. Konsep-konsep fundamental dalam ilmu pengetahuan dan gambar umum tentang pengalaman manusia dan yang realitas, tetap berada di wilayah filsafat, karena masalah tersebut tidak dapat dideterminasikan oleh metode-metode ilmiah manapun.
5. Filsafat sebagai disiplin ilmu yang berupaya untuk membantu anda untuk menyatakan apa yang kita katakan dan untuk mengatakan apa yang kita lihat. Bidang filsafat seperti ini disebut filsafat analitik yang berupaya untuk menciptakan bahasa yang lugas dan bebas dari kekaburan ambiguitas makna¹⁰.

¹⁰Akhyar Yusuf Lubis, *Filsafat Ilmu Klasik Hingga Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), h. 3. Bandingkan Juga dengan Zaprunkhan, *Filsafat Ilmu Sebuah Analisa Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015).

Pengertian filsafat berkembang dari masa ke masa

Mula-mula filsafat diartikan sebagai *the love of wisdom* atau *love for wisdom*. Pada fase ini filsafat berarti sifat seseorang yang menjadi orang yang bijak atau sifat orang yang ingin atau cinta pada kebijakan. Pada fase ini filsafat juga berarti sebagai kerja seseorang yang berusaha menjadi orang yang bijak. Jadi, yang pertama filsafat sebagai sifat, dan yang kedua filsafat sebagai kerja.

Masih pada fase ini, yaitu pada Aristoteles, misalnya pengertian filsafat sangat umum, luas sekali. Waktu itu segala usaha dalam mencari kebenaran dinamakan filsafat, begitu pula hasil usaha tersebut. Dikatakan luas sekali karena semua pengetahuan, termasuk *special science*, tercakup dalam filsafat. Akibatnya definisi dari Aristoteles tidak apat dipahami oleh para pelajar pada zaman ini karena *special science* yang telah memisahkan diri dari filsafat. Definisi filsafat dalam kamus Runes yang mengatakan bahwa filsafat adalah keterangan rasional tentang sesuatu yang merupakan prinsip umum yang di sana seluruh kenyataan dapat dijelaskan, telah membedakan pengetahuan rasional dengan pengetahuan empiris. Pengetahuan empiris ini adalah sains. Pada fase pertama ini *wisdom* memang luas sekali artinya, sebagaimana yang dijelaskan dalam *encyclopedia of philosophy* bahwa Homerus menyebut tukang kayu juga orang bijak.

Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa pengertian filsafat mulai menyempit, yaitu lebih menekankan pada latihan berpikir untuk memenuhi kesenangan intelektual, *intellectual curiosity*. Definisi dari Bertrand Russel barangkali dapat digolongkan ke sini tatkala ia mengatakan bahwa *philosophy is the attempt to*

answer ultimate question critically. Pada fase ini jelas pengertian filsafat jauh lebih sempit dari pada pengertian filsafat pada masa Aristoteles tadi. Tugas filsafat pada masa ini, menurut definisi Russel itu, ialah menjawab pertanyaan yang tinggi, yaitu pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh sains. Definisi dari William James berbeda dari definisi Russel. James mengatakan bahwa filsafat ialah kumpulan pertanyaan yang belum pernah terjawab secara memuaskan.

Pengertian filsafat sering berbeda antara tokoh yang satu dengan yang lain.

Perbedaan itu disebabkan oleh perbedaan konotasi filsafat dan terakhir ini dapat disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan pandangan hidup yang berbeda serta akibat perkembangan filsafat itu sendiri. Definisi James melihat konotasi filsafat pada pemikiran tentang sesuatu yang tidak dapat lagi diusahakan oleh sains, karena itu filsafat dikatakan sebagai kumpulan pertanyaan yang tidak terjawab oleh sains secara memuaskan. Russel melihat konotasi filsafat pada sifat dan objek filsafat. Sifatnya adalah usaha menjawab, objeknya *ultimate question*. Keyakinan hidup seseorang tokoh filsafat, juga keadaan ia beragama, selalu tersalurkan ke dalam kata-kata yang digunakannya untuk menjelaskan pengertian filsafat. pengertian filsafat yang dikemukakan oleh Pythagoras jelas menunjukkan pandangan hidupnya. Ia mengatakan sophia sebagai perenungan tentang ketuhanan.

Kata filsafat digunakan untuk menunjukkan berbagai objek yang berbeda.

Pertama, istilah filsafat digunakan sebagai nama bidang pengetahuan, yaitu pengetahuan filsafat, suatu

bidang pengetahuan yang ingin mengetahui segala sesuatu secara mendalam. kedua. Istilah filsafat digunakan untuk menamakan hasil karya. Hasil karya yang mendalam dari Plato disebut filsafat Plato; pengetahuan yang mendalam dari Ibnu Rusd disebut filsafat Ibnu Rusd. Begitu selanjutnya. Ketiga, istilah filsafat telah digunakan juga untuk menunjukkan nama suatu keyakinan. Mudler misalnya pernah mendefinisikan filsafat sebagai sikap terhadap perjuangan hidup. Keempat, istilah filsafat digunakan untuk memberikan nama suatu usaha untuk menemukan pengetahuan yang mendalam tentang sesuatu. Runes mengartikan mencari kebenaran serta kebenaran itu sendiri itulah filsafat. Bila ia menjawab tentang sesuatu secara sistematis, radikal, dan universal, serta bertanggungjawab, maka sistem pemikirannya serta kegiatannya itu kita sebut filsafat. Kelima, yang paling dahulu kita kenal, istilah filsafat digunakan untuk menamakan orang yang cinta pada kebijakan dan ia berusaha mencapainya. Disini perkataan, “ia filosof” berat ia pecinta dan pencari kebijakan¹¹.

3. Filosofi Pendidikan

Dalam bab ini penulis menurunkan tulisan Winarno Surakhmat, yang berjudul filosofi pendidikan: menemukan kembali landasan yang hilang. Ada sebuah fenomena yang sering berlalu di depan mata, yang hampir tak terdeteksi, yakni proses kejiwaan yang terjadi ketika pendidikan harus memilih antara menerapkan pendidikan tanpa menghiraukan landasan filosofinya, dengan

¹¹Ahmad Tafsir, *Filsafat Umum...*, h. 12

mendalami filosofi pendidikan sebagai pengetahuan, tetapi tanpa menghiraukan penerapannya.

Memilih satu di antara keduanya, yang manapun, berarti memilih yang tidak benar. Secara hakiki, tak ada aktivitas atau praktek pendidikan yang dapat berlangsung tanpa dasar filosofi, yang sedikitnya terkait dengan makna kehidupan dan nilai-nilai kemanusiaan. Tanpa dasar filosofi yang jelas, bukan saja latah tetapi juga berbahaya. Sebaliknya, tidak ada filosofi yang dapat mendalami problema pendidikan tanpa menjiwai praktek pendidikan. filosofi pendidikan yang tidak berkelanjutan ke dalam penerapannya dalam kehidupan nyata, menjadi mubazir dan tak layak disebut filosofi pendidikan.

Memang pada saat tertentu, dalam konteks tertentu, bisa muncul problematik pendidikan yang lebih dominan bersifat teknis, dan di saat yang lain lebih bersifat finansial, infrastruktur, institusional, ketenagaan, kultural, atau politik. Tetapi apakah problem yang mengemuka pada suatu saat bersifat teknis, politis, yuridis, ekonomis atau gabungan dari semuanya, pada saat yang sama problematik pendidikan itu juga selalu bersifat normatif, yakni terkait dengan norma, standar, atau nilai yang mendasar, yang memberikan relevansi dan makna kepada sifat problematik pendidikan yang teknis dan pragmatis. Cukup banyak kebijakan masa lalu yang kandas di tengah jalan karena para perumus kebijakan mengabaikan landasan yang mutlak itu. Filosofi tanpa filosofi, filosofi yang keruh, melahirkan kebijakan yang salah. Hanya filosofi (atau kalau dikehendaki: credo, visi, misi, paradigma) yang jernih, yang dapat mendasari lahirnya pendidikan bermakna.

Makna filosofi pendidikan

Filosofi berarti banyak hal bagi banyak orang. Ada orang yang dengan fasih dapat memberikan jawaban yang masuk akal, tetapi bagi sebagian orang, filosofi tidak berarti apa-apa. Ini disebabkan ada orang yang dengan tekun mempelajari makna dan kegunaannya, sebagian lagi belum pernah, dan sebagian karena mempelajari filosofi dalam cara yang tidak seharusnya. Di kalangan pendidikan pada umumnya, guru khususnya, situasinya tidak seberapa berbeda. Kalau pertanyaan itu ditujukan kepada guru yang sehari-hari sibuk mengajar kesana kemari dalam rangka mempertahankan hidup sebagai manusia biasa, sangat mungkin jawabannya begini:

1. Bagi saya, filosofi tidak berguna. Biarlah pemikir-pemikir saja yang berfilosofi. Filosofi tidak untuk semu orang. Yang jelas tidak untuk saya. Sejak dari dulu saya tidak bisa melihat kegunaan filosofi untuk perbaikan pendidikan. Sekarang bahkan telah terbukti bahwa setelah sekian lama kita mengesampingkan filosofi, kita masih bisa mengembangkan pendidikan. Artinya, apakah filosofi itu ada atau tidak ada, perbedaannya tidak tampak.
2. Lagi pula pemerintah sendiri tidak lagi memberikan prioritas kepada ilmu filosofi pendidikan. Apakah tidak cukup kalau sudah ada undang-undang sistem pendidikan? Kalau betul filosofi pendidikan fundamental untuk kepentingan nasional, apakah ada rujukan filosofi pendidikan? Tidak. Sekarang, urgensinya sudah tidak ada.

Kalau pertanyaan itu ditujukan kepada sarjana pendidikan atau keguruan, atau kepada mereka yang

sedang menyiapkan diri untuk mengambil gelar ilmu pendidikan yang lebih tinggi, mungkin mereka akan menjawab begini:

1. Saya tidak dapat mengatakan bahwa filosofi itu tidak penting, tetapi saya juga masih sukar menemukan pembenarkan bahwa filosofi pendidikan itu penting. Berfilosofi memang mengasyikkan, terutama bila kita mengikuti berbagai aliran filosofi dari berbagai pemikir dunia. Menarik, tetapi agak rumit, bahkan kadang-kadang sukar dipahami.
2. Saya merasa sulit memahami filosofi Socrates, Kant, Dewey, dalam kaitannya dengan pengembangan pendidikan di Indonesia, hubungan filosofi dengan kurikulum, dengan ujian akhir, dengan pekerjaan rumah, dan dengan lebih banyak lagi aspek praktek pendidikan. Tetapi karena dipersyaratkan sebagai matakuliah, memang ada penambahan pengetahuan.

Kalau pertanyaan di atas ditujukan kepada saya (Winarno Surakhmad), maka respon saya akan begini:

1. Secara sederhana, berfilosofi berarti bertanya. Tujuan bertanya hanya satu: mencari kebenaran. Dengan kata lain, filosofi mendekati esensi kebenaran kehidupan untuk mengungkap prinsip dari segala prinsip. Di dalam proses untuk mendapatkan jawaban, pertanyaan tunggal untuk tentang esensi kebenaran memang selalu berkembang menjadi sejumlah pertanyaan, dari banyak sampai tidak terhingga. Jawaban terhadap pertanyaan induk yang tinggal didekati dengan

jalan melahirkan lebih banyak lagi jawaban yang saling terkait.

2. Dari satu pertanyaan, lahir seribu buah yang lain, semata-mata untuk bertanya lebih dalam dan lebih tajam tentang berbagai segi dari sesuatu yang diterima sebagai kebenaran. Berkembangnya pertanyaan menjadi majemuk disebabkan terutama karena ketunggalan kebenaran hanya dapat didekati dari kemajemukan sifatnya
3. Yang menjadikan pertanyaan itu kadang-kadang sukar untuk dijawab adalah karena andahan dan jangkauan pertanyaan itu sendiri sangat luas. Luasnya melampaui luasnya kehidupan yang luas yang dapat diraih oleh manusia. Apa yang tidak dapat diraih secara fisik, dijelajahi secara mental oleh manusia.
4. Tidak ada waktu yang terlalu lama, ruang yang terlalu besar, dan jarak yang terlalu jauh apabila manusia berfilosofi. Karena itu, walaupun manusia terikat di bumi, manusia berpeluang menjelajahi banyak hal di balik dinding mental, menjelajahi kehidupan yang tidak terikat oleh kesementaraan waktu, ruang, dan jarak. Hanya batas ketekunan manusia yang menjadi batas penjelajahan.
5. Ini tidak berarti bahwa filosofi adalah ilmu serba bisa yang dapat dipelajari hanya oleh orang-orang terpilih. Jauh dari itu, berfilosofi adalah kegiatan sehari-hari, yang dapat terjadi dimana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Kemampuan dasar itu ada pada manusia, kecuali yang mengalami hambatan perkembangan mental tertentu. Untuk berfilosofi, kita perlu terikat oleh definisi yang akademik.

6. Tentu kita tidak hanya bertanya. Dengan pertanyaan yang bertujuan, yang diperkokoh oleh pikiran yang terasah. Didukung oleh pengalaman yang jernih, kita belajar, merumuskan pertanyaan yang tajam dan konsisten. Makin tajam pertanyaan kita, makin dekat kita pada jawaban yang diperlukan. Tidak ada orang yang mampu menemukan jawaban tanpa pernah bertanya.
7. Filosofi diartikan sebagai metode berfikir reflektif mengenai esensi kebenaran dalam kehidupan. Dengan batas itu, yang ditekankan bukan bagaimana kita belajar berbagai aliran filosofi, tetapi yang lebih penting dari itu ialah bagaimana kita belajar berfilosofi dan menerapkannya dalam kehidupan.
8. Tujuan berfilosofi pada umumnya, sebagai aktivitas mental manusia adalah untuk melepaskan diri dari kedangkalan makna kehidupan. Secara positif, tujuan berfilosofi di bidang pendidikan adalah untuk memahami makna terdalam dari kehidupan dari sudut pandang manusia, sebagai bentuk komitmen pada kebenaran.

Memahami Pendidikan Tanpa Berfilosofi

Tenaga kependidikan pada umumnya, guru khususnya, seringkali menyimpulkan bahwa filosofi pendidikan bukan saja sukar untuk dipahami, tetapi kegunaanya dalam praktik sangat disangsikan. Kesimpulan seperti itu, diduga bersumber dari tersendatnya arus dialog antara pendidik dengan peserta didik. Pendidikan tidak berhasil dalam merangsang dan mengantar pemikiran mereka kepada esensi pendidikan melalui proses berfilosofi. Di dalam lembaga-lembaga

pendidikan guru, filosofi akhirnya hanya menjadi mata pelajaran yang tidak terkait dengan realitas kehidupan. Karena itu filosofi pendidikan tidak jelas gunanya di dalam praktik pendidikan. Akibatnya, mereka mempelajari filosofi sering merasa sudah cukup menguasai substansi filosofi apabila mereka dapat memperlihatkan atau merumuskan kembali pengetahuan mereka tentang persamaan atau perbedaan pandangan filosofis antara Rene Descartes dengan Spinoza, antara Plato dan John Luck, antara filosof Timur dengan Barat. Atau mereka sudah berfilosofi ketika mereka sudah mampu merumuskan arti leksikal dari strukturalisme, reduksionisme, fenomenalisme, progresivisme, dan lain sebagainya.

Mamang tidak salah mengetahui berbagai aliran dan nomenklatur filosofi itu. Yang salah ialah karena pengetahuan mereka tentang hal-hal tersebut tidak ditarik lebih jauh sehingga menyentuh kepentingan peserta didik dalam mengidentifikasi pensenyawaan antara pendidikan dengan realitas kehidupan. Kalau filosofi diartikan terfokus hanya kepada kemampuan yang terbatas itu. Kesimpulan para guru yang tidak menghargai peran filosofi dalam praktek, tampaknya beralasan. Filosofi memang tidak berguna kecuali mungkin sebagai *brain teaser*.

Akibatnya, filosofi yang dipelajari sebagai mata pelajaran hanya menguji daya tahan calon guru untuk berspekulasi, berdogma, berintuisi, berteori, atau berkegiatan apapun yang berdekatan dengan istilah-istilah yang bersifat abstrak. Walaupun mungkin hakikat filosofi tidak pernah dipahami dengan jelas, mereka pasti sudah cukup mampu membedakannya dari segala aktivitas

kehidupan yang riil sehar-hari: dari makan hingga buang hajat, mulai dari yang mereka benci sampai yang sangat dicintai. Mereka selalu saja bertanya tentang kehidupan mereka sehar-hari. Begitulah sejarah awal munculnya berfilosofi.

Mengapa tidak melahirkan jawaban? Inilah karakteristik berfilosofi. Jawaban bukannya tidak penting, tetapi jawaban yang benar hanya datang dari pertanyaan yang benar. Karena itulah para pemikir mulai dengan bertanya, dan dari proses bertanya itulah lahir jawaban. Jawaban dari pertanyaan itulah, ketika dirumuskan, yang sekarang kita pelajari sebagai aliran filosofi. Memang sangat berbeda pertanyaan kita hari ini dengan pertanyaan Plato, Aristoteles dan sebagainya itu. Plato bertanya dari kehidupan nyata yang dihadapi, kita sekarang bertanya dari filosofi ke kehidupan. Jadi Plato bertanya tentang kehidupannya, kita bertanya tentang pertanyaan Plato tentang kehidupannya, bukan tentang kehidupan kita. Ketika kita memulai mempelajari “pikiran Plato” yang kita lihat pada hakikatnya adalah kehidupan yang dilihat oleh Plato. Dengan meminjam mata dan otak Plato, yang dapat dilihat dan dimengerti oleh Plato. Proses itu juga yang terjadi ketika kita mempelajari filosofi Immanuel Kant, Alfarabi, Ibnu Rusd, dan lain sebagainya. Tak mengherankan kita tidak menemukan sesuatu yang relevan bagi kehidupan sendiri. Kita, dosen, guru, tidak tuntas memilihat kehidupan dengan mata dan otak kita sendiri.

Ketika kita, dosen, guru mempelajari berbagai aliran filosofi sebagai pengetahuan, belum berarti dia berfilosofi. Perbedaan antara keduanya harus jelas. Bila tidak, mulai saat itu, filosofi tercabut akarnya dari kehidupan. Filosofi menjadi sebuah pengetahuan yang

mungkin masih menarik untuk diketahui, tetapi yang sudah tidak berguna untuk dipelajari. Begitulah filosofi pendidikan hari ini. Guru, dosen, merasa sudah tidak memerlukan filosofi pendidikan karena sejak dari lembaga pendidikan tenaga kependidikan, mereka temukan bahwa lembaga pendidikan itu sendiri telah lama menjadi “steril”, menjadi lembaga pendidikan tanpa filosofi. Matakuliah yang bernama filosofi pendidikan dan yang berfungsi sebagai landasan ilmu pendidikan, telah lama dibuang dari program kurikuler lembaga. Filsafat pendidikan dinilai sudah kuno dan sudah tak berguna, sehingga perlu diganti dengan sesuatu yang lebih praktis dan lebih mudah dipasarkan.

Diperlukan Proses re Filosofisasi

Sedikitnya ada tiga fenomena yang perlu menjadi perhatian kita, karena menggambarkan mengapa manusia berhenti berfilosofi:

1. Filosofi lahir terlalu awal. Dari kaca mata manusia kontemporer tidak mustahil jarak waktu yang terbilang abad sejak terekamnya buah pikiran filosofis sekitar 2.500 tahun yang lalu, dirasakan sebagai waktu yang terlalu panjang. Waktu sepanjang itu kemudian melahirkan rasa kekunoan, termasuk kekunoan filosofi, dan kekunoan filosofi sekaligus berarti keusangnya. Padahal, usia yang tua, tidak menjadikan filosofi itu usang.
2. Dunia semakin pragmatis. Di samping kekunoan, ada kemungkinan bahwa manusia sekarang ini telah dimanjakan oleh lingkungan kehidupan serba jadi, bergerak dalam pola-pola kehidupan serba buku, berfikir dan berbicara dalam rujukan yang serba kongkrit, semua untuk memastikan bahwa

yang bernilai hanya yang berguna secara pragmatis. Karena itu manusia bisa menjadi gamang dan enggan untuk kembali diajak berbicara mengenai hal-hal yang dinilai sangat spekulatif, tanpa standar yang permanen, tanpa kegunaan yang nyata.

3. Perubahan semakin terakselerasi. Mungkin juga dunia kontemporer yang berwajah serba berubah, menyebabkan manusia sulit mempelajari sesuatu, dasar atau prinsip, yang lebih permanen, tentang nilai yang lebih universal, tentang dogma, doktrin atau tentang kebenaran yang absolut. Bukankah dunia kita sekarang ini telah terjatuh di dalam perubahan, dimana satu-satunya yang tetap adalah perubahan, atau dimana perubahan itu sendiri pun senantiasa berubah, di tengah kehidupan yang tengah berubah dan mengalir dipertanyakan apakah masih berguna manusia berbicara mengenai sejumlah hal, termasuk pendidikan secara normatif?

Di dalam filosofi, aspek yang dipertanyakan justru lebih terpusat pada hal-hal yang normatif, bukan pada hal-hal yang teknis dan insidental. Bukan karena aspek-aspek teknis tidak penting. Ini adalah prinsip mendahulukan yang patut didahulukan. Memang filosofi, menurut hakikatnya, tidak dilahirkan sekedar untuk memuaskan manusia memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi untuk membijaksankan atau mengarifkannya. Filosofi pendidikan lahir sebagai bentuk kemampuan manusia untuk memahami tujuan hidup, hakikat manusia, dan untuk mencari tumpuan yang universal mengenai nilai dan tujuan pendidikan. Dalam arti itu jugalah, filosofi

pendidikan berbicara mengenai nilai yang baik dan buruk, terutama lagi yang benar dan salah, untuk dipertimbangkan di dalam kehidupan.

Jadi setiap orang yang mengajukan pertanyaan masih relevankah kita berfilosofi dalam dan atau untuk pendidikan. Pertanyaan yang tumbuh baik karena rasa bimbang mengenai masih berguna tidaknya kita berfilosofi, atau karena rasa yakin bahwa filosofi sama sekali sudah tidak berguna, tanpa sadar sebenarnya telah mulai berfilosofi. Kalau pertanyaan itu berarti pernyataan bahwa filosofi pendidikan memang tidak perlu, pertanyaan itu berimplikasi bahwa nilai benar salah, baik dan buruk, tidak ada dan tidak perlu dipermasalahkan. Namun disitu timbul persoalan.

Apakah betul masalah baik dan buruk dan benar salah tidak ada dan karena itu tidak perlu dipersoalkan lagi? dapatkah manusia hidup tanpa moral, seperti a moralnya sebatang pohon atau sebuah batu? Realitas berkata: tidak. Karena itu, menerima pentingnya moralitas tetapi menolak berfilosofi tentang hal tersebut, adalah berfikir dalam kontradiksi. Jadi mengapa kita menolak kehadirannya? Mengapa kita mengingkari kegunaannya? Mengapa kita alergi berfilosofi? Mungkin karena pamikir atau filosofi sendiri tidak mampu menjelaskan posisi pemikiran mereka dalam kaitannya dengan kebenaran yang menjadi fokus perhatian orang lain. Mungkin karena mereka tidak mampu meneruskan, membuktikan, menerapkan, atau mengonversi sendiri buah pikiran ke dalam situasi kehidupan yang nyata. Mungkin pula karena masyarakat sekarang sudah sangat pragmatis, kegemaran itu dinilai bertentangan dengan berfilosofi. Bukankah juga karena tidak ada seseorang pun diantara filosofi besar pada

zaman itu yang pernah berkunjung dan hidup di masa depan yang semakin serba menjadi pragmatis. Kita bagaimana filosof besar, Plato, Socrates, Ibnu Rush, Ibnu Sina, dan sebagainya, kalau mereka dapat berkunjung ke Indonesia dan melihat pengelolaan pendidikan nasional? Bagaimana komentar mereka tentang kewajiban belajar.

Berfilosofi berarti berfikir mengenai dasar dari segala dasar, mengenai norma dari segala norma, inti dari segala inti, kebenaran dari segala kebenaran. Semua manusia dalam berpikir dan berbicara tentang cinta, tentang kematian, tentang politik, tentang penindasan, tentang pemerintahan, tentang pendidikan. Ketika manusia berbicara tentang cinta, suatu saat manusia akan bertanya apakah cinta itu? Bernilaiakah cinta itu, apa beda nafsu dengan cinta, antara cinta pada Tuhan, tanah air, dengan cinta pada kekasih. Dengan memulai bertanya hal-hal seperti itu, manusia telah berfilosofi tentang dimana. Mungkin memang tidak se dalam Socrates, tetapi itu bukan masalah utama. Yang penting ia telah berfilosofi.

Filosofi pendidikan, filosofi yang dikembangkan dalam kaitan kehidupan dengan pendidikan, juga demikian. Di dalam filosofi pendidikan, para pemikir berbicara mengenai dasar dari segala dasar pendidikan, untuk mencari dasar yang paling dasar. Ketika mereka berfilosofi untuk mencari kebenaran nisbi yang paling benar, mereka mencarinya dengan tujuan menemukan sesuatu yang paling benar untuk diterapkan di dalam praktek pendidikan. Berfilosofi tidak dengan maksud menyeragamkan pendapat, tetapi untuk menemukan landasan normatif yang paling manusiawi, paling layak, paling bermoral untuk dipertanggungjawabkan.

Menempatkan Filosofi pada Posisi dan perannya

Untuk mendapat gambaran dan makna filosofi yang kontekstual, dan untuk memahami referensi istilah itu lebih dalam, kita dapat melihat kehidupan para filosof besar yang pernah dilahirkan di dunia, dan yang telah memberikan sumbangan yang sangat besar dalam usaha mengukur tingkat kedalaman dan kompleksitas hidup ini. Seorang pemikir dalam kategori ini selalu berusaha memahami kehidupan, dengan jalan mendalami perspektif kehidupan yang terdalam. Dia tidak menerima begitu saja fenomena kehidupan yang kasat mata, tetapi senantiasa mempertanyakan sejumlah prinsip dan konsistensi dari sebanyak mungkin fenomena kehidupan yang dapat diamati. Seorang pemikir yang serius tak akan membiarkan dirinya hidup dan tertelan di dalam kehidupan yang tak dipahaminya.

Berfilosofi tidak harus mengecam kehidupan. Ia tidak harus berontak terhadap kehidupan. Kita tidak berfilosofi untuk Socrates. Secara ringkas, jelas dan sederhana, berfilosofi hanya berarti berusaha memahami kehidupan. Siapa diantara kita yang tidak tergerak jiwanya untuk memahami kehidupan? Manusia yang mulai memahami, melanjutkan berfilosofi sebagai usaha untuk mempertajam pemahaman. Di dalam dunia pendidikan. Seberapa jauh kita memahami hakikat manusia dan hakikat kehidupan adalah modal dasar pemahaman untuk memungkinkan kita dengan yakin menyimpulkan bahwa kehidupan itu memang layak diharungi, atau lebih tepat, layak diberikan pengantar pendidikan manusia untuk memasuki kehidupan. Mengapa? Karena resiko yang harus dihadapi setiap manusia yang membiarkan dirinya hanyut dalam kehidupan yang sama sekali tidak

dipahaminya, terlalu besar. Tak mustahil ketidak tahuan manusia tentang dunianya harus dibayar dengan mahal.

Begitu juga dalam filosofi pendidikan. Determinasi seorang pemikir pendidikan untuk sejauh mungkin dan sedalam mungkin memahami dunia dan kehidupan di dalamnya, menyebabkan daya jangkau filosofisnya merambah kehidupan yang semakin luas. Filosof atau pemikir pendidikan akan mempertanyakan mengapa lebih baik bila berpendidikan dari pada bila tidak. Siapakah manusia itu, dan bagaimana kemampuan manusia dalam belajar, apa makna pengetahuan bagi manusia, apa makna kehidupan dan dunia ini bagi manusia, apa yang mampu dipelajari, apa yang patut diketahui, dan apa yang berguna bagi kehidupan manusia, dan sebagainya.

Berdasarkan visi tentang manusia dan kehidupan itu, baru dipermasalahan implikasi praktisnya dalam pendidikan. Di sekitar soal-soal praktis tersebut, pendidikan mempersoalkan etika, estetika, kebebasan dan keterikatan manusia, kehidupan sesudah kematian, bahkan eksistensi Tuhan. Apa bedanya dengan filosof dalam arti umum? Tidak banyak. Filosof pendidikan adalah juga filosof. Perbedaan prediketnya hanya menunjukkan bahwa fokus filosofi diletakkan pada problematik pendidikan. Sebutlah filosofi pendidikan sebagai filosof terapan.

Hidupnya komitmen pada kearifan mudah melahirkan kekuatan untuk mengemukakan, menerapkan, bahkan membela kebenaran yang diperoleh dari usaha berfilosofi. Tidak banyak di dunia ini bersifat badi karena Tuhan telah memberikan siklus perkembangan, musim tertentu, dan masa hidup yang terbatas kepada hampir semua hal. Tetapi tidak begitu dengan kearifan, kearifan tidak mengenal musim. Dalam ukuran duniawi, kearifan

menjadi langgeng di dalam diri manusia akan semakin berkembang sekurang-kurangnya dua keterampilan dasar untuk menetapkan proses berfilosofi: kemampuan menganalisis dan kemampuan mengevaluasi.

1. Hampir secara alami manusia mampu menganalisis berbagai fenomena yang dihadapi, dari yang sangat sederhana sampai pada yang sangat kompleks, dari yang sangat umum sampai kepada yang sangat khas. Dalam perababan manusia, kekuatan analisis merupakan dorongan alami manusia ketika menghadapi situasi untuk terus menerus memahami kehidupan yang sedang dilalui.
2. Analisis saja belumlah berfilosofi. Dalam kehidupan manusia dituntut selalu memberikan penilaian. Ia harus mampu menilai setiap situasi, yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk. Dengan berfilosofi manusia menjadi mampu merumuskan sikap yang menggambarkan pemahaman seseorang mengenai baik dan buruk atau benar dan salah terhadap hasil pencariannya. Ia menilai dan memutuskan implikasi yang serasi dengan kesimpulan.

Perhatikanlah misalnya, apa yang akan terjadi di dalam proses berfikir apabila kita dihadapkan pada persoalan filosofis ini: apakah moralitas patut diajarkan ataukah tidak, kalau patut diajarkan, apa alasannya, dan kalau tidak, mengapa. Kalau patut diajarkan, siapa manusia yang bagaimana yang berhak mengajarkannya. Lebih jauh dari pendidikan moral, kita menghadapi pendidikan agama. Pemikir pendidikan harus menilai dan memilih mana yang benar antara pendidikan yang bertitik tolak bahwa Tuhan tidak ada dan keberadaannya masih

perlu dibuktikan atau dari titik tolak bahwa Tuhan memang ada, dan kesimpulan dogmatis ini menjadi titik awal serta titik akhir semua kegiatan pendidikan.

Dalam pertumbuhan peradaban sebuah bangsa terjadi proses berpikir atau berfilosofi kolektif. Melalui proses yang panjang dan kompleks, ini dapat ditingkatkan, diperhalus dan diperkuat menjadi pandangan hidup bangsa. Begitu juga filosofi pendidikan yang memerlukan kesepakatan kolektif. Misalnya, bagaimana kita memahami konsep peningkatan kualitas pendidikan? Bagaimana kita menetapkan kualitas? Penilaian harus melalui proses kolektif dan pertimbangan yang ketat, apakah pendidikan yang dihadapi adalah koheren (apakah semua unsurnya konsisten dan bersenyawa secara logis, lengkap, (berarti mampu menyentuh semua persoalan yang terkait tanpa meninggalkan wilayah-wilayah yang kosong dan benar (berarti selalu dapat diterima sebagai benar dalam semua situasi, dan dari sudut prinsip yang sama. Dengan keterampilan itu, kita menjadi lebih dipersenjatai dengan pemahaman, yang sekarang perlu dikomunikasikan ke dunia luar.

Keterlanjuran Menimbulkan Inersia

Dimanakah sekarang kita menemukan filosofi pendidikan? Sukar! Filosofi pendidikan sudah semakin sering dilupakan. Diperkatakan pun jarang. Pengamatan ini terutama terfokus pada apa yang terjadi di Indonesia selama 30 tahun terakhir. Banyak alasan atau justifikasi yang dikemukakan oleh mereka yang menganggap bahwa filosofi pendidikan sudah tidak diperlukan, atau sekurang-kurangnya menganggap sudah tidak perlu dipersoalkan lagi. Walaupun demikian, tidak ada di antara alasan yang banyak itu yang dapat meningkatkan realitas bahwa setiap

tingkah laku kependidikan adalah tingkah laku yang bertujuan, dan bahwa setiap tujuan bersumber dari pilihan, dan bahwa setiap pilihan adalah alternatif yang berdasarkan filosofis: pandangan filosofis pendidikan.

Walaupun demikian, landasan filosofi yang selalu mendasari setiap tindak kependidikan, karena kurang dipahami, tetap masih tersingkirkan di dalam banyak persepsi pendidik dewasa ini, mereka pada umumnya berada dalam kategori pendidikan yang terbenam di dalam arus pendidikan kontemporer-praktis, misalnya mereka yang memiliki:

1. Pandangan bahwa problematik pendidikan tidak lagi terletak dalam aspek normatif, tetapi telah beralih dan kini terletak dalam aspek teknis.

Pandangan ini berkata, filosofi pendidikan tidak perlu dijadikan masalah. Alasannya, negara ini sudah mempunyai landasan filosofi yang kuat, mulai dari apa yang implisit dan eksplisit tertera di dalam UUD 1945, serta yang tertuang di dalam berbagai peraturan pemerintah, diperkaya dengan UU no. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, dan sekarang dengan filosofi pendidikan yang menjiwai UU no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Bahwa pendidikan nasional belum mencapai mutu yang diharapkan, bukan karena kita tidak mempunyai filosofi dan aspirasi pendidikan, tetapi karena guru-guru sebagian besar tidak mempunyai kualifikasi keguruan praktek yang memadai. Keterbelakangan pendidikan disebabkan bukan karena filosofi pendidikan kita sudah usang, tetapi karena

pendidikan tidak didukung oleh sarana yang diperlukan.

Oleh karena itu menurut pandangan ini, reformasi pendidikan pada waktu ini harus menekankan pada perubahan strategi operasional pendidikan yang bersifat praktis. Tanpa pengelolaan yang baik, tanpa metodologi yang baik, tanpa pembiayaan yang cukup, dan tanpa guru yang bermutu, kita tidak dapat mengharapkan perbaikan di bidang pendidikan. Sebaliknya, filosofi pendidikan, betapapun diperlukan, tak akan pernah langsung memengaruhi perkembangan pendidikan sebagai yang dapat dihasilkan oleh sarana, pengelolaan, metodologi, dan pembiayaan yang sesuai.

2. Pandangan bahwa pendidikan harus kembali ke tugas utama, yakni tugas mengajarkan baca tulis, sampai kepada ilmu pengetahuan dasar dan keterampilan yang berguna untuk kemandirian.

Penganut pandangan ini sekaligus hendak berkata bahwa filosofi sudah tidak dapat digunakan sebagai penopang pengembangan sektor pendidikan yang sekarang menghadapi penurunan kualitas yang serius. Persoalan pendidikan bukan terletak di dalam filosofinya, tetapi di dalam kenyataan bahwa ilmu-ilmu dasar yang sangat dibutuhkan oleh bangsa ini, matematika, ilmu alam, tidak diajarkan dengan baik dan tidak dalam jumlah yang cukup. Itulah yang menyebabkan bangsa ini tetap terbelakang.

Apa yang dibutuhkan oleh guru di lapangan adalah pengetahuan inti yang segera dapat

diwariskan ke dan dimanfaatkan oleh murid-murid mereka. Jadi yang guru harus kuasai adalah ilmu-ilmu modern yang diperlukan untuk menjadikan bangsa ini mampu bersaing dengan negara-negara lain. Maka, yang perlu ditingkatkan, disempurnakan, atau dirubah adalah aspek kurikulum, bukan filosofi.

Pandangan ini berkata bahwa pendidikan tidak dapat lagi dikelola sebagai lembaga kemanusiaan seperti pada masa lampau. Tantangan masa depan terlalu banyak dan terlalu berat untuk masih terus dihadapi dengan pendidikan masa lalu. Sekarang pendidikan menjadi sebuah faktor penentu jatuh banggunya sebuah bangsa karena itu pendidikan adalah serius bisnis, bukan spekulatif filosofis.

3. Pandangan bahwa pendidikan terutama bertujuan menyiapkan sumberdaya manusia memasuki dunia kerja, yakni sebagai manusia pembangunan.

Pendidikan diperlakukan sebagai lembaga produksi tenaga manusia yang berguna secara praktis dan pragmatis. Harga manusia ditentukan oleh potensi dan kontribusinya untuk mendukung sistem produksi. Dalam konteks Indonesia, pendidikan menjadi lebih spesifik menekankan nilai manusia terdidik sebagai *homo economicus* atau pada umumnya, sebagai *homo faber*, manusia pekerja.

Rumusan tujuan seperti ini lembaga pendidikan pada hakikatnya sejenis alat kepentingan lain, yang tidak lagi butuh filosofi, tetapi kemanfaatan tertentu, misalnya kemanfaatan

ekonomis dan politis. Karena tujuan telah ditentukan oleh tujuan pembangunan, ukuran keberhasilan bergeser pada mampu tidaknya usaha pendidikan memberikan nilai tambah dalam pertumbuhan pembangunan umumnya.

Dalam pandangan seperti ini, dapat dimengerti mengapa filosofi pendidikan tidak lagi mendapat tempat di lembaga pendidikan kontemporer. Penganut pandangan ini tidak dapat menerima kehadiran filosofi sebagai dasar untuk mengatakan perhitungan efisiensi dan penentuan keuntungan pendidikan.

4. Pandangan bahwa pendidikan harus dikembangkan dan dikelola secara modern sebagai industri

Pandangan ini antara lain melihat, semua unsur pendidikan harus diidentifikasi dengan jelas. Tujuan harus jelas dan terukur. Penanganan harus dilakukan oleh mereka yang secara profesional memiliki kompetensi dan syarat yang kemudian melahirkan pendidikan berbasis kompetensi. Pendidikan harus dilihat sebagai sistem yang produktif. Dengan menarik garis hubungan sekuensial antara unsur-unsur sistem pendidikan seperti itu, ruang gerak pendidikan sesudah jelas (terbatas): pendidikan tak lain sebagai sebuah proses teknis yang mengolah masukan menjadi hasil. Bentim, yang ekstrim dalam sejarah di Indonesia adalah Ebtanas dan UAN.

Pandangan bahwa pendidikan harus dikelola secara ilmiah dan realistis sebagai industri yang teliti mengelola dan menghasilkan produk yang terukur, menjadi alasan mengapa filosofi pendidikan, yang

dianggap sangat spekulatif, tidak lagi mempunyai tempat. Filosofi pendidikan, mungkin berguna untuk melahirkan teori pendidikan yang menarik, tetapi tidak mempunyai nilai praktis untuk pendidikan yang memerlukan pengelolaan yang praktis, kongkrit, dan ilmiah. Karena itulah filosofi pendidikan, sebagai landasan atau unsur masukan, tidak mendapat tempat di dalam sistem tersebut.

Metafisika Menjadi Fondasi Pendidikan

Kalau seorang guru ditanya landasan apakah yang diperlukan untuk memperbaiki praktek pendidikan, dia mungkin cukup cakap menjawab bahwa pendidikan yang kuat memerlukan sekurang-kurangnya landasan psikologis dan landasan hukum. Dengan landasan psikologis guru memperoleh berbagai petunjuk bagaimana mengarahkan kegiatan pembelajaran secara efektif dan efisien. Dengan landasan hukum guru memperoleh pegangan bagaimana mengarahkan pendidikan agar senantiasa bergerak dengan peraturan formal.

Bagaimana dengan landasan filosofis? Guru mungkin tidak seyakini ketika memberikan jawaban terdahulu. Kalaupun guru mengakui perlunya pendidikan dibangun atas landasan filosofi, dia masih akan menemukan kesulitan memberikan pembenaran mengapa atau dalam hal bagaimana filosofi dapat berperan. Untuk menghilangkan kebingungan guru, terutama untuk mempertebal keyakinan mengenai peran filosofi sebagai landasan yang berguna guru perlu menyadari jenis pertanyaan yang penting dalam pendidikan, yang tidak dapat dijawab oleh psikologi atau undang-undang saja. Pertanyaan itu adalah pertanyaan filosofis yang

dikelompokkan sebagai pertanyaan metafisik, epistemologis dan aksiologis.

Pertanyaan yang bersifat filosofis, dan yang relevan sebagai landasan bagi pengembangan pendidikan, diantaranya adalah:

1. Mengapa ada kehidupan di dunia ini, dan apa guna kehidupan di dunia ini bagi manusia? Apakah memang ada sesuatu yang mutlak perlu dilakukan selagi manusia masih di dunia, dan apa makna semua ini di dalam peradaban manusia? Kalau ada yang harus dilakukan, siapa yang berhak melakukan, dan dengan dasar apa?
2. Apakah ada sesuatu yang berharga di dalam hidup ini untuk disampaikan kepada sesama, ataukah hidup ini hanya lorong penunjang tanpa nilai apapun, yang harus dilalui tanpa makna? Kalau tidak ada makna yang patut diperjuangkan, mengapa harus ada pendidikan? Kalau ada makna, apakah makna itu, dan apakah ini membenarkan perlunya pendidikan?
3. Mengapa harus berada di dunia ini: dari mana dan mau kemana? Apa tujuannya, dan apa fungsi manusia selagi manusia masih di dunia? Kalau kita tidak tahu, dengan alasan apa kita dapat membenarkan pilihan kita bertindak sebagai pendidik? Kalau kita mengetahui, apakah itu membenarkan adanya pendidikan? Apakah pendidikan pada dasarnya masalah moral, masalah teknis, atau masalah hukum?
4. Dari jawaban terhadap rangkaian pertanyaan filosofis itu, dapatkah kita tetapkan implikasinya

dalam pendidikan, yakni menjadikan pertimbangan filosofis itu sebagai dasar praktik pendidikan?

Mudah mudahan guru dapat mengaku bahwa jenis pertanyaan filosofis serupa itu, merupakan pertanyaan yang bukan saja wajar, tetapi seharusnya dikemukakan. Dengan kesadaran yang cukup mengenai pentingnya pendidikan mempertanyakan (memahami) segi-segi kehidupan yang perlu dijadikan sebagai dasar bertindak, sedikitnya dikotomi antara filosofi dengan praktek pendidikan tidak lagi dibesar-besarkan.

Mereka telah salah memahami filosofi sebagai tidak lebih dari sebuah teori yang tidak mempunyai nilai empiris (istilah teori pun disalah artikan) mempertanyakan filosofi sebagai “teori” belaka (tanpa nilai praktek) dan pendidikan sebagai praktek (tanpa teori) dimana keduanya, tidak perlu atau tak dapat bertemu, adalah konsekwensi kesalahan pemahaman tersebut.

Dalam pendidikan, filosofi adalah pandangan yang melandasi semua perilaku profesional normatif setiap guru, karena itu, kalau filosofi dilihat sebagai teori yang paling praktis. Kesimpulan mereka bahwa pendidikan selama ini tidak dapat berkembang sebagai praktik yang ilmiah disebabkan terlalu banyak dipengaruhi oleh filosofi, adalah kesimpulan yang salah. Yang benar, pendidikan menjadi pegangan yang gersang justru karena memahami filosofi secara salah.

Karena pemahaman yang salah itu, mereka pun mengembangkan pandangan yang salah bahwa filosofi pendidikan atau apapun namanya, hanyalah pikiran muluk-muluk, tetapi tidak dapat diterapkan, padahal dalam pendidikan, yang dibutuhkan adalah pelaksanaan yang baik, bukan teori yang muluk-muluk. Ini sebuah

contradiction in terminis. Pendidikan ini salah karena pengertian mereka mengenai hakikat dan peran filosofi pendidikan sangat terbatas. Mereka tidak mampu melihat, filosofi pendidikan dinilai baik bukan karena hanya karena filosofi tersebut terdengar-muluk-muluk. Bukan! filosofi pendidikan menjadi baik hanya apabila dapat menjadi dasar bagi pendidik di dalam praktek.

Tidak sepatutnya kita menyingkirkan filosofi pendidikan karena kesalahan memahami filosofi sebagai tidak lebih dari teori belaka. Terlepas dari baik buruknya filosofi yang dipahami seorang pendidik, terlepas dari tingkat kesadarannya mengenai filosofi, tidak ada seorang pendidik yang dapat melepaskan diri dari padanya. Filosofi pendidikan adalah fondasi untuk melahirkan praktik, tanpa pondasi itu, tak ada pendidikan yang berdasar. Aktivitas pendidik yang tidak berdasar, yang tidak bertujuan, yang tidak disertai keyakinan mengenai kebaikan dan kebenaran aktivitas itu, bukanlah aktivitas pendidikan sesungguhnya! Paling banyak, sebagai pendidikan semu: pendidikan yang bukan-bukan.

Filosofi pendidikan menjadi pondasi praktik pendidikan karena filosofi tersebut sebelum seorang pendidikan beraksi, telah mulai mempermasalahkan hal-hal yang sangat mendasar. Seperti ini:

1. apakah yang dimaksud dengan kenyataan atau realitas, melakukan kepada anak didik kita akan dididikan berbagai kenyataan hidup. Bagaimanakah memulai memecahkan masalah itu? Tidak ada kaidah ilmiah yang dapat mencapai tingkat permasalahan tersebut. Dan disinilah kaidah filosofis memberikan pegangan kepada pendidik. Apakah hubungan sebab akibat adalah

sebuah kenyataan? Bagaimanakah kita mengajarkan sebab akibat tersebut kepada anak didik? Kalau hubungan sebab akibat benar sebuah kenyataan, dimana letak kenyataan itu? Di luar sana atau di dalam pikiran anak didik?

2. Kalau kita menghadapi anak didik dalam permasalahan dengan mayapada yang luas ini: sebenarnya apakah ada tujuan dari segala tujuan, mengapa dunia ini diciptakan atautkah semua ini hanya bungan rampai kebetulan yang tidak berarti apa-apa? Bagaimana kurikulum dapat menjawab pertanyaan ini secara ilmiah? Tidak dapat para pendidikan harus mencari jawabannya secara fundamental di dalam filosofi. Apalagi bila pendidik sekarang menghadapi anak didik mereka sebagai insan, sebagai manusia: siapakah mereka, manusia itu? Apakah mereka pada hakikatnya adalah makhluk spiritual, atautkah sekedar makhluk yang pada tempat dan waktu tertentu kebetulan muncul dan hilang, dan tidak lebih dari itu atau berada di antara dua kontinum?

Kita tidak dapat mencari jawaban terhadap pertanyaan ini melalui kajian ilmiah dalam arti yang konvensional. Pertanyaan itu bersifat metafisik, pertanyaan yang berkaitan dengan makna dan sifat realitas, pertanyaan yang mungkin disarankan oleh banyak pendidik sebagai pertanyaan yang terlalu jauh kaitanya dengan pelaksanaan pendidikan.

Guru di lapangan akan menilainya sebagai terlalu abstrak, dan Karena itu menganggapnya tak berguna karena mereka dihadapkan kepada beban yang berat untuk menyelesaikan program kurikuler yang telah dirancang.

Tetapi justru sikap seperti itulah yang harus diperbaiki. Tindakan seorang guru mengajarkan makna kebahagiaan adalah salah satu tujuan yang akan dicapai melalui pendidikan, berbeda dari tindakan guru hedonistic yang menganggap kebahagiaan merupakan serangkaian kenikmatan sejenak. Akan lain apabila topik itu tidak menjadi fokus kurikulum.

Di dalam ketidaktahuan, guru harus berpegang pada berbagai hasil tradisi. Tetapi hasil tradisi sering merupakan pegangan yang sekarang menjadi insersia atau daya haling kemajuan. Karena itu perlu lebih dari sekedar tradisi. Apapun namanya, guru harus mempunyai landasan berpijak yang lebih sehat, salah satu landasan metafisik itu! Agar tak terombang ambing, guru memerlukan keyakinan hidup. Guru harus mengambil keputusan kependidikan yang tak selalu mudah karena berkaitan dengan masalah-masalah yang fundamental. Apakah semua hal ini hanya masalah metodologis, ataukah masalah filosofis? Tanpa kemampuan berfilosofis, guru tak akan pernah tahu. Dalam kebimbangan, mereka mencari pegangan-pegangan yang pasti, mencari prinsip-prinsip yang kekal, dengan maksud menghindari dari masalah metafisik

Kalau guru tidak mempunyai pemahaman yang jelas mengenai dasar tindakannya mengajarkan hak asasi, misalnya dengan moral apakah ia dapat mendidikkannya kepada orang lain? Asumsi yang dilakukan oleh seorang guru, tidak selalu terjamin sebagai benar, tetapi seorang pendidik, dengan asumsi yang masih agak goyah itu saja pun, sekarang menjadi lebih mampu membedakan antara masalah yang patut diuji melalui pembuktian empiris, dengan masalah yang perlu dipahami melalui filosofi.

Landasan Epistemologi dan Aksiologi Pendidikan

Kecuali landasan yang bersifat metafisik, pendidikan juga akan berhadapan dengan masalah-masalah yang bersifat epistemologis, pendekatan filosofis yang lebih lanjut memusatkan diri mempertanyakan hakikat makna, dan faedah pengetahuan. Sebabnya, Karena di dalam praktek pendidikan guru akan terutama menanamkan dan mengembangkan serta mendampingi memantapkan pengetahuan anak didiknya. Karena itu dia paling sedikit harus bertanya apakah yang dimaksud dengan pengetahuan.

Pertanyaan itu adalah juga pertanyaan yang harus dikaji oleh guru, yang sebagian besar tugasnya berkaitan dengan pengembangan pengetahuan. Setiap guru harus selalu mempertanggungjawabkan tindakannya di dalam memilih tindak mengajarkan pengetahuan yang lain. Begitu juga di dalam kurikulum, dan mengapa yang lain tidak. Keputusan dan tindakan yang praktis, bertumpu pada epistemologi. Tetapi, tanpa latar belakang filosofi pendidikan ketika guru menyiapkan diri memasuki profesi keguruan, apa yang dapat dilakukannya sekarang?

Epistemologi juga mempertanyakan cara manusia memperoleh pengetahuan, yakni sejauh mana pengetahuan dapat diperoleh manusia secara terpercaya. Adakah pengetahuan yang bersumber dari pengalaman empiris, dari penginderaan, dari eksperimen, dari intuisi, dari ilham atau dari wahyu? kenyataan bahwa terdapat berbagai sumber pengetahuan, berarti bahwa sumber-sumber tersebut merupakan sumber kebenaran pengetahuan yang bertingkat tinggi, bagaimana menamkannya di benak anak didik? Dengan dasar apakah sekolah masih saja terus terpaksa mengajarkan hanya pengetahuan yang

mengandung kebenaran yang nisbi pada tingkat yang paling rendah, mungkin serendah atau sedikit saja lebih tinggi dari kemampuan hewan cerdas?

Guru yang dilengkapi dengan kemampuan epistemologis, akan lebih mudah mengetahui bahwa tidak terdapat hanya satu jalan untuk memperoleh pengetahuan. Juga akan menyandra bahwa tidak semua pengetahuan mempunyai kedudukan yang sama. Guru akan bertindak sesuai dengan landasan epistemologis yang ia pahami. Mengapa seorang guru memberikan peluang kepada murid-muridnya mencari, mengeksplorasi, mengujicoba, atau bereksperimen dan mengembangkan pengetahuan yang diperlukan, dan mengapa guru yang lain mengharuskan muridnya mempelajari hanya pengetahuan tertentu yang datang dari guru seperti yang diinstruksikan dari dalam buku petunjuk, adalah dua bentuk praktik yang berbeda karena berdiri di atas landasan filosofis yang berbeda.

Karena sistem persekolahan menghendaki demikian, banyak guru di lapangan cenderung menekankan hanya pada pengetahuan yang dinilai obyektif, yang mudah dipelajari dan diukur melalui pendekatan mekanistik. Walaupun sangat mungkin guru menyadari bahwa masih banyak jenis pengetahuan lain yang dapat dikembangkan, yang tidak kurang penting, atau bahkan yang lebih penting untuk meningkatkan keterdidikan manusia dibandingkan dengan apa yang telah digariskan oleh sistem yang berlaku, keadaan itu tidak terwujud.

Karena ketumpukan epistemologis, banyak guru berkesimpulan bahwa pengetahuan yang dengan obyektif secara terkendali dan terukur, yang jelas-jelas kuantitatif, yang benar-benar dapat diterima sebagai pengetahuan, dan

hanya pengetahuan serupa itulah yang harus menjadi inti program pendidikan. Matematika dan fisika, misalnya, dengan kriteria tersebut, dinilai jauh lebih penting dari pengetahuan sastra dan pengetahuan budaya, humaniora, agama, pendidikan bahkan (apalagi) filosofis. Dari segi epistemologi, penilaian menjadi lain.

Inilah yang menempatkan sebuah lagi landasan filosofis pada kedudukan yang penting untuk pendidikan: landasan aksiologi. Landasan aksiologi, landasan yang memusatkan perhatian pada hakikat, makna, dan peran nilai dalam kehidupan, menjadi penting, terutama di Indonesia, karena pendidikan dimasa lalu cenderung mengorbankan nilai-nilai kehidupan yang manusiawi. Pendidikan masa lalu tidak cukup memberikan perhatian pada usaha memanusiakan manusia. Secara konstitusional manusia dididik seutuhnya dalam rangka pencerdasan kehidupan bangsa, tetapi secara praktis manusia direndahkan martabatnya, dipasung kemerdekaannya, ditentukan ruang geraknya, dikondisikan pemikirannya, semua atas nama pendidikan.

Secara aksiologis, guru perlu bertanya: apakah tekanan pendidikan sebaiknya diletakkan pada pengembangan pengetahuan ataukah pada pengembangan kepribadian? Jawaban terhadap pertanyaan ini, cenderung didominasi kepentingan pengetahuan skolastik, mengalahkan kepentingan pengembangan kepribadian. Sekolah semakin menjadi pranata pengolahan pengetahuan, sungguh pendidikan mencanangkan pengembangan pengetahuan seutuhnya. Mereka yang terusik melihat perkembangan sekolah di dalam menekankan nilai-nilai kognitif, secara stereotip menawarkan alternative yang lebih “Utuh”, agar nilai-nilai

efektif dan psikomotorik diberikan tekanan yang sebanding.

Namun masalah yang terjadi di sekolah jauh lebih serius dari yang dikritik oleh pengikut Bloom c.s. yang menginginkan agar domain yang lain sama-sama diperhatikan sebanding dengan penanganan guru terhadap domain kognitif. Seandainya sekolah berhasil dengan baik mengembangkan kemampuan, yakni kemampuan kognitif dengan kemampuan itu saja, sekolah memberikan sumbangan yang berharga kepada kehidupan anak didik untuk mengembangkan kemampuan berlogika, berfikir kreatif, bahkan sampai kepada kemampuan berfilosofi sekalipun.

Kedangkalan moralitas yang melanda bangsa Indonesia sampai sekarang, membuktikan betapa kurangnya kemampuan bangsa, dari pemimpin sampai rakyatnya, memecahkan masalah secara beradab, mengambil keputusan secara adil, dan memberikan penilaian dengan pertimbangan hati nurani. Kompetisi hidup di dalam hal-hal serupa itu seperti tidak pernah dipikirkan kemunitas sekolah. Masyarakat mengkritik sekolah sebagai terlalu mementingkan aspek kognitif. Tetapi benarkan sekolah-sekolah kita sudah terfokus mengembangkan kemampuan kognitif? Tidak dapat dikatakan demikian. Yang benar adalah bahwa aktivitas di sekolah tidak berhasil di dalam mengembangkan kemampuan kognitif sekalipun? Apa yang kelihatannya sebagai aktivitas yang kental kognitif, dalam realitas hanya semu. Artinya, prestasi di bidang kognitif pun tidak.

Apa yang terjadi di sekolah kita tidak lebih dari latihan-latihan otak, seperti mengenal, membandingkan, melatih, dan menghafal jalan yang sudah ditentukan, yakni

kategori kemampuan yang sangat elementer, di tingkat paling rendah, hanya sedikit lebih tinggi dari kemampuan yang dapat diperlihatkan oleh se ekor monyet yang cerdas dalam laboratorium. Pembelajaran seperti itu menjadi pembunuhan potensi berpikir secara sistematis. Ini bertentangan dengan filosofi metafisika mengenai harkat martabat manusia.

Memang pendidikan nilai telah terabaikan sejak awal. Dari keluarga, kependidikan kanak-kanak, dasar, menengah, dan berlanjut sampai pada pendidikan tinggi, pendidikan nilai telah hancur. Ini diperkuat lagi oleh sikap pemerintah dimasa lalu yang hanya mampu mengindoktrinasikan nilai, bukan menumbuhkannya melalui pendidikan. Bangsa ini akhirnya tumbuh tanpa pernah memiliki pemahaman untuk menilai, bahkan tidak memahami konsep menilai nilai. Sebaliknya, karena bangsa ini hanya dipaksa untuk menelan nilai-nilai, bangsa ini tidak lagi memiliki kesadaran nilai, tidak dapat menghargai nilai, tidak dapat membangun nilai, tidak dapat memperjuangkan nilai. Mereka hidup tanpa hirau akan nilai.

Haruskah semua itu terjadi dengan landasan aksiologis yang mantap, setiap, pendidikan dapat memulai aktualisasi dan operasionalisasi tugas-tugasnya dengan baik. Dengan landasan aksiologis, dia dapat memberikan makna lebih mulia pada tugas-tugas kependidikannya. Kalau kita sepaham bahwa pendidikan adalah tentang kehidupan dan untuk kehidupan, jelas praktek pendidikan tidak lain dari menyiapkan anak bangsa menghadapi kehidupan. Untuk mengembangkan pendidikan yang mengabdikan kepada kepentingan kehidupan manusia, adakah

lagi sumber yang terbaik untuk mencari strategi kecuali mencari pada dan dari kehidupan itu sendiri.

BAB II

FILOSOFI PENDIDIKAN DALAM UUD 1945

A. Pengantar

Peranan Undang-Undang Dasar¹² sebagai sebuah negara amatlah fundamental karena undang-undang dasar itulah yang akan menjadi pegangan bagi para penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Hal itu dikemukakan dalam tap MPR Republik Indonesia nomor III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan pasal 3 (1) yang berbunyi” undang-undang dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis negara Republik Indonesia, memuat dasar dan garis besar hukum dalam menyelenggarakan negara¹³.

Perubahan sebuah undang-undang dasar sebagai sebuah hukum tertulis atau sebuah kaedah fundamental merupakan hal yang lumrah dan menjadi suatu kebutuhan dalam perubahan-perubahan sosial, politik, hukum, ekonomi, dan budaya dewasa ini. Dikatakan sebuah yang lumrah karena undang-undang dasar sesuai dengan fungsinya di satu sisi dituntut buntut fleksibel tetapi juga harus mencakup berbagai hal pokok penyelenggaraan

¹²Baca, UUD dasar mengamanatkan tiga hal, yakni pendidikan harus memanusiakan, pendidikan membudayakan, pendidikan harus meng-Indonesia-kan. Winarno Surakhmad, *Pendidikan Nasional: Strategi dan Tragedi*, (Jakarta: Kompas, 2009), h. 113-115

¹³Abdul Azis Wahab, *Gagasan dan Pemikiran: Pembangunan Pendidikan di Indonesia*, (Bandung: FPIPS, 2011), h. 305

negara yang sewaktu-waktu menuntut penyesuaian-penyesuaian.

Dalam negara modern seperti Indonesia, amandemen merupakan sebuah kebutuhan karena selain memang dimungkinkan juga secara eksplisit diatur di dalam pasal undang-undang dasar 1945 (pasa 37) kecuali secara khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan (ayat 5). Bahkan untuk menghindari ketidak jelasan undang-undang telah dibuat pula penjelasan terhadap pasal-pasal undang-undang yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari undang-undang dasar 1945¹⁴.

Setiap perubahan dalam proses perubahan undang-undang dasar juga UUD 1945 disebut dengan istilah amandemen¹⁵. Dan amandemen bagaimanapun kecilnya pastilah menimbulkan dampak terhadap kehidupan dan ketatanegaraan secara keseluruhan, tidak terkecuali terhadap pendidikan. Pendidikan memang merupakan bidang yang amat penting bagi pembangunan suatu bangsa, namun hanya sedikit bangsa-bangsa di dunia terutama dunia ketiga yang memberikan tempat sesuai dengan bidang pendidikan bagi pembangunan sebuah bangsa.

Pendidikan dan pelatihan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan bagaikan sebuah mata uang dengan masing-masing sisinya. Sebuah negara akan manju dalam

¹⁴Baca Tafsir Konstitusi, Taufiqurrahman Syahuri, *Tafsir Konstitusi : Berbagai Aspek Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.

¹⁵UUD' 45 (Konstitusi) Republik Indponesia Hasil Am,andemen I, II, III, IV, Bukittinggi: Irama-Lestari.

berbagai aspek kehidupannya hanya akan terwujud jika sumber daya manusia (SDM) memiliki kemampuan yang tinggi yang juga di dasari oleh moral dan kepribadian yang tinggi yang dapat maju sebagai hasil dari pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang terarah sistematis dan berkesimbangan. Hanya SDM seperti itulah yang dapat membangun negara dan bangsa ini. Guna memahami lebih lanjut tentang pentingnya hal-hal tersebut berikut akan dilakukan pengkajian tentang implikasi amandemen UUD 1945 terhadap pendidikan.

B. Amandemen UUD 1945 Sebagai Kepedulian terhadap Pendidikan

Kepedulian wakil-wakil rakyat terhadap permasalahan pendidikan nampaknya belum sebagaimana yang diharapkan terutama menyangkut penempatan pengembangan pendidikan sebagai tulang punggung pembangunan bangsa. Selama ini dalam ketetapan-ketetapan MPR tentang garis-garis besar haluan negara yang menjadi penekanan utama khususnya di masa pemerintahan orde baru adalah keamanan, teknologi, dan ekonomi. Baru pada masa-masa akhir pemerintahan orde baru-lah persoalan pendidikan diperhatikan walaupun tidak secara eksplisit menjelaskan hal itu.

Dikatakan mulai memberikan perhatian karena upaya pengembangan sumberdaya manusia apalagi pengembangan SDM yang berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan amat terkesan ditempatkan pada urutan kesekian dari banyak sektor dan akibatnya telah dirasakan pada awal reformasi. Terjadinya kebrutalan, sikap dan perilaku emosional, pelanggaran hukum yang seolah sudah menjadi pemandangan biasa, semakin meningkat korupsi, kolusi dan juga nepotisme (KKN), serta

kurangnya rasa hormat terhadap sesama dan kepada para pemimpin, serta tidak memiliki *sense of crisis* adalah merupakan sebagian dari sejumlah besar akibat kurang ditempatkannya pendidikan secara tidak tepat dan pendanaan yang tidak proporsional dalam keseluruhan proses pembangunan bangsa¹⁶.

Walaupun yang diminta untuk dibahas adalah implikasi amandemen UUD 1945 terhadap pendidikan namun karena amandemen tidak memisahkan kebudayaan dari pendidikan hubungan antara keduanya layak dikemukakan dalam kesempatan ini. Telah diketahui bersama bahwa karena dipisahkan kebudayaan dengan pendidikan akibatnya adalah departemen yang dahulu dikenal dengan nama departemen pendidikan dan kebudayaan akhirnya menjadi Departemen Pendidikan Nasional. Karena itu patut kiranya dikedepankan dalam kesempatan ini akibat ditimbulkan dengan memisahkan pendidikan dari kebudayaan pada masa lalu itu dimana akhirnya menjadi kebudayaan hanya sebagai kesenian belaka. Pemisahan itu terjadi pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid yang akibat lainnya adalah terjadinya pendidikan yang tidak berkebudayaan dan kebudayaan yang tidak didasari oleh nilai-nilai pendidikan. Padahal disadari betul bahwa pendidikan adalah proses pembudayaan. Jika itu hanya sekedar retorika politik yang mengatakan bahwa biar rakyat sajalah yang mengurus budaya mengapa hal-hal lainnya tidak diperlukan demikian? Pandangan-pandangan yang keliru seperti itu telah menyesatkan bangsa ini telah

¹⁶Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi: Berbagai Aspek Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 36

mengakibatkan meluncurnya ketingkat yang paling mengkhawatirkan sebagai sebuah bangsa yang berdaulat. Karena hubungan yang erat itu maka salah satu pakar pendidikan Indonesia Tilaar¹⁷ menjelaskan interrelasi antara pendidikan dan kebudayaan dewasa ini menjadi topik yang sangat menarik. Pertama, karena pendidikan telah direduksi sebagai pembentukan intelektual semata-mata padahal kehidupan manusia bukan hanya ditentukan oleh kehidupan intelektual saja tetapi meliputi berbagai segi kehidupan manusia mulai dari teknologi sampai sastra yang telah dikenal, dikembangkan dan dimanifestasikan oleh manusia dalam kehidupannya. Kedua, pengaruh globalisasi dan arus informasi yang begitu cepat tanpa memperoleh kesempatan untuk berfikir secara terus menerus telah menimpa umat manusia yang menyebabkan pendangkalan budaya dan hilangnya identitas diri, dan bahkan pada akhirnya akan menghilangkan budaya nasional dan lokal. Upaya untuk mengatasi hal itu telah dilakukan terus menerus oleh berbagai bangsa di dunia dengan mengedepankan prinsip atau cara pandang yang telah dikenal bervisi dan berpikir global tetapi realistis dengan bertindak secara lokal seperti kata John Naisbitt¹⁸. Pengembangan SDM ke depan melalui pendidikan dan

¹⁷A. R. Tilaar, *Paradigma Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h 191

¹⁸Baca John Naisbitt, *Megatrends Asia: Delapan Megatrend Asia yang Mengubah Dunia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996, baca juga John Naisbitt, *Mind Set: Tata Pola Pokir Anda Untuk Membaca Peluang Bisnis Masa Depan dan Menuai Profit*, Jakarta: Daras, 2009.

latihan haruslah yang dapat mengatasi dampak negatif globalisasi dan era informasi seperti itu.

Pengembangan SDM yang berkualitas melalui pendidikan dan kebudayaan khususnya di negara-negara yang diketahui dapat segera krisis ekonomi yang dialaminya adalah merupakan bukti nyata tentang pentingnya perhatian terhadap pendidikan dan kebudayaan bagi kemampuan suatu negara baik negara maupun perkembangan negara maju apalagi negara berkembang seperti Indonesia. Hal itu dimaksud akan tiada lain agar SDM yang dikembangkan itu memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai persoalan akibat krisis dan kembali secara dan bangkit kembali secara cepat dari berbagai terapan krisis yang dialaminya. Contoh kongkrit adalah Malaysia dan Korea Selatan dua negara tetangga Indonesia yang telah membuktikan betapa peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan telah merupakan hal yang tidak dapat ditunda. Dalam hubungan itu sebelum memasuki pembahasan tentang implikasi amandemen UUD 1945 khusus yang menyangkut pasal-pasal tentang pendidikan dan kebudayaan. Laporan Tahunan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara Sidang tahunan MPR RI Tahun 2000, kiranya perlu diperhatikan mengingat bahwa hal itu erat kaitannya dengan pasal pendidikan dan kebudayaan dalam UUD 1945 yang telah mengalami amandemen tersebut. Hal itu dapat dilihat dalam bidang sosial budaya bagian c tentang pendidikan yang berbunyi:

“c. Pendidikan

Sistem pendidikan nasional belum menunjukkan arah yang jelas, serta belum didukung oleh anggaran yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

Menugaskan kepada presiden:

Melaksanakan pembaharuan akan pemantapan sistem pendidikan nasional secara konsekuen dan konsisten serta meningkatkan anggaran pendidikan.

Apa yang telah menjadi ketetapan MPR tersebut (tap MPR RI nomor VIII/MPR/Tahun 2000) tentang Laporan Tahunan Lembaga-lembaga Tinggi Negara pada sidang Tahunan MPR Indonesia tahun 2000” amat penting karena dua hal: pertama karena hal mengenai pendidikan itu dihasilkan oleh sebuah lembaga pemegang kedaulatan rakyat sekaligus sebagai lembaga tertinggi negara. Karena itu diharapkan gemanya cukup kuat memperoleh perhatian pemerintah dan masyarakat. Kedua hal yang diputuskan mengenai pendidikan amat strategis oleh karena memuat dua hal penting yang menjadi tugas pemerinah untuk mewujudkannya yaitu pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional secara konsekuen dan konsisten serta peningkatan anggaran pendidikan. Karena itu dampaknya pun akan sangat luas terhadap penyelenggaraan sistem pendidikan nasional¹⁹.

Pemantapan sistem pendidikan nasional secara konsekuen dan konsisten memang merupakan sebuah tuntutan yang mendasar jika diharapkan agar pendidikan memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan bangsa. Pengelolaan yang setengah dan dilakukan secara tidak profesional memang telah memberikan dampak yang amat merugikan anak didik, orang tua, masyarakat, dan bangsa secara keseluruhan, dan telah mengabaikan amanat

¹⁹Baca juga Soedijarto, *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*, (Jakarta: Kompas, 2008.), h. 19-45.

pembukaan UUD 1945 yang menekankan pentingnya upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

C. Perubahan Pasal Pendidikan dan Kebudayaan serta Implikasinya

Sebagaimana yang telah diketahui amandemen tentang pasal pendidikan dan kebudayaan telah mengalami perubahan-perubahan dalam pasal dan ayat-ayatnya. Namun perubahan-perubahan itu belum terlalu menyentuh pokok persoalan pendidikan dan kebudayaan. Amandemen tentang pendidikan dan kebudayaan tersebut seharusnya menyentuh hal-hal strategis dari pendidikan agar sistem pendidikan nasional benar-benar dapat merespon secara tepat dan memfasilitasi dengan baik aspirasi pendidikan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat yang cepat berubah dewasa ini. Beberapa di antara hal hal yang dimaksud antara lain: (1) adalah tentang demokratisasi di bidang pendidikan; (2) pemberdayaan masyarakat dalam rangka partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan; (3) penempatan pendidikan sebagai tulang punggung pembangunan bangsa.

Dari empat kali amandemen terhadap UUD 1945 baru pada amandemen ke empatlah pasal pendidikan dan kebudayaan mengalami perubahan dan ini kiranya merupakan kelanjutan dari TAP MPR RI nomor VIII/MPR/200 dalam bagian sosial budaya bagian c tentang pendidikan, yang telah mengusahakan presiden untuk melaksanakannya. Penyelenggaraan sistem pendidikan dan penyediaan dana bagi penyelenggaraannya memang dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan dapat saja dengan pengelolaan dan dengan dan apa adanya, namun untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dibutuhkan pengelolaan yang baik dan dengan

dan yang benar-benar memadai sebagaimana yang telah dilakukan oleh berbagai negara maju di dunia. Di samping itu harus pula disadari bahwa pendidikan nasional berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa, dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu peran pendidikan amatlah strategis dalam menyiapkan SDM untuk pembangunan bangsa ke depan. Itupulalah yang menyebabkan perhatian banyak pihak terhadap pendidikan khususnya pasal-pasal tentang pendidikan dan kebudayaan (BAB III pasal 31 dan 32) menjadi lebih besar dari sebelumnya.

Bagaimana implikasi amandemen UUD 1945 tersebut terhadap penyelenggaraan pendidikan merupakan pokok pembahasan ini. Mengingat bahwa UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis negara Republik Indonesia, memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara, maka pengkajian terhadap implikasi amandemen tersebut sebuah keniscayaan. Implikasi terhadap amandemen tersebut tidak dapat tidak akan memiliki sisi positif dan negatif terhadap pendidikan. Namun demikian patut disadari bahwa para wakil rakyat telah melakukan amandemen tersebut diharapkan memiliki komitmen yang tinggi terhadap peran dan fungsi pendidikan sebagai mana telah dikemukakan di atas. Dengan adanya dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh amandemen UUD 1945 tersebut terhadap penyelenggaraan pendidikan kiranya telah dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya oleh para wakil rakyat.

Pengkajian selanjutnya adalah terhadap Bab XIII tentang pendidikan dan kebudayaan yang terdiri dari dua pasal masing-masing: pasal 31 mengenai pendidikan dan

pasal 32 mengenai kebudayaan, yang isinya lengkapnya adalah:

Pasal 31:

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan
2. Setiap warganegara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pasal 32:

1. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan memajukan budaya
2. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Dengan mencermati tentang pasal-pasal pendidikan dan kebudayaan nasional dapat disimpulkan betapa isi

pasal-pasal tersebut telah memberikan harapan dan peluang melalui pendidikan dan kebudayaan bagi kemajuan bangsa. Namun tidak sedikit permasalahan yang mungkin ditimbulkan dalam implementasinya mengingat sebegitu banyak hal yang mempengaruhi pendidikan dalam mewujudkan tujuannya. Di samping itu juga disadari bahwa pendidikan bukan suatu obat mujarab untuk mengatasi berbagai persoalan hidup dan kehidupan baik sebagai individu maupun sebagai kelompok apalagi sebagai bangsa. Pendidikan memang bukan segala-segalanya namun harus diingat bahwa tanpa pendidikan seseorang tak mungkin dapat hidup layak sebagaimana layaknya seorang manusia atau individu baik dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara.

Pasal 32 UUD 1945 sebelum dilakukan amandemen terdiri dari 2 ayat masing-masing ayat (1) tiap-tiap warganegara berhak mendapatkan pengajaran. Ayat (2) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang diatur dengan undang-undang. Perubahan yang terjadi adalah pada redaksi dan adanya penambahan 3 dari hanya 2 ayat sebelumnya. Adapun implikasi dengan adanya amandemen tersebut adalah sebagai berikut:

Ayat (1) isi tetap, namun yang berubah adalah redaksi dari “tiap-tiap” menjadi “setiap” dan kata “pengajaran” diganti dengan “pendidikan”.

Ayat (2) dua kali kata “wajib” dalam ayat ini mempunyai implikasi luas terhadap banyak hal, diantaranya setiap anak usia pendidikan dasar (SD dan SLTP) wajib bersekolah dan bila tidak, maka ada konsekwensi hukum terhadap keluarganya dan juga terhadap anak? Sangksi apa yang dikenakan kepada

mereka? Ini harus jelas tidak boleh lagi ada alasan bahwa anak tak bersekolah itu karena tak tersedia sekolah dan tak punya biaya, karena pemerintah wajib membiayainya. Lebih jauh lagi ini akan berimplikasi kepada anggaran pendidikan pemerintah yang jelas akan semakin besar untuk program wajib belajar. Pertanyaannya: apa saja biaya yang dikoper oleh pemerintah itu? menurut studi Supriadi²⁰ (2001) proporsi tertinggi beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh keluarga siswa adalah di tingkat SLTP negeri, mencakup 80 % dari total biaya (untuk segala pengeluaran siswa selama bersekolah). Di SDN, keluarga menanggung beban biaya sekolah sebesar 68 % dan di SLTA sekitar 70 %. Mampukah pemerintah menanggungnya? bila pemerintah tak menanggungnya karena hukumnya wajib (menurut) maka tak bisa lagi ia menghindar, karena dosa.

Ayat (3) butir penting disini adalah “satu sistem pendidikan nasional” ini merupakan penekanan kembali dari apa yang tercantum dalam UUD 1945 yang diamandemen dan uu no 2 /tahun 1989. Di katakan penting adalah karena pasal ini menekankan bahwa di Indonesia hanya ada satu sistem pendidikan. Pada era otonomi daerah sekarang daerah-daerah harus sadar betul bahwa mereka berada dalam satu sisdiknas. Persoalannya, malalui apa “satu sistem Pendidikan nasional” dapat diwujudkan? Apa yang mengikat diknas kita sehingga tetap dalam satu sistem? Apakah adanya kurikulum nasional, standar nasional...? pasal ini juga secara eksplisit

²⁰Dedi Supriadi, *Jaringan Pengaman Sosial Pendidikan: Model Pengelolaan yang Ideal, Kunci-kunci Keberhasilan Komite, dan Fungsi Terapi Sosial*, Bandung: Alfabeta, 2000), h. 17-27

menyebut tiga *cover value* dalam sisdiknas, yaitu: imtaq, akhlak mulia, dan kecerdasan.

Ayat (4) menyebut anggaran untuk sektor pendidikan sebesar minimal 20 % dari RAPBN dan RAPBD ada plus minusnya. Plusnya, pemerintah pusat dan daerah bisa menjadikan ini sebagai patokan. Tapi masalahnya dari mana dana yang 20 % itu dihitung? Apakah dari total anggaran? Apakah anggaran untuk gaji guru dan tenaga kependidikan (yang termasuk anggaran rutin) termasuk juga di dalamnya? Bila anggaran untuk gaji dimasukkan bisa-bisa malah untuk operasional pendidikan dan investasi/pembangunan menjadi kecil karena telah terambil oleh anggaran untuk gaji.

Harap dicatat, sekarang banyak pemda yang dengan bangga menyebut angka di atas 20% untuk pendidikan, bahkan ada yang 40 % tetapi sebagian besar digunakan untuk membayar gaji guru. Lalu adakah yang tersisa dari alokasi untuk gaji guru itu untuk cukup membiayai pendidikan, terutama untuk memenuhi ayat (2) di atas? Berdasarkan perbandingan satuan biaya pendidikan berdasarkan jenjang pada tahun 1999-2000 dalam pendanaan pendidikan terhadap PDB ternyata Indonesia berada pada posisi terendah. Sebagai perbandingan untuk sekolah dasar, Chile sebagai negara dengan satuan biaya tertinggi (PPP US\$ 1500) sekitar 13 kali lebih besar dari satuan biaya pendidikan Indonesia. Pada jenjang SLTP dan SM lebih besar lagi; Malaysia sebagai negara dengan satuan biaya tertinggi (PPP US\$ 11469) ternyata hampir 34 kali lebih tinggi dari satuan biaya pendidikan Indonesia (PP US\$ 497) ini kiranya yang

mendorong para anggota legislatif untuk menetapkan dana pendidikan dalam UUD 1945 minimal 20 % dari APBN²¹.

Ayat (5) pasal ini secara eksplisit menyatakan bahwa pengembangan Iptek di Indonesia harus terintegrasi dengan imtaq dan ditujukan untuk mempertahankan persatuan bangsa... dan seterusnya. Ini merupakan terobosan, karena sekaligus memecahkan keragu-raguan selama ini mengenai relevansi iptek dan imtaq dalam pendidikan. Akan halnya kebudayaan yang sudah ditekankan merupakan bagian tak terpisahkan dari pendidikan kiranya perubahan dan implikasinya akan semakin menguatkan kebudayaan nasional melalui pengembangan kebudayaan daerah khususnya bahasa daerah. Implikasi perubahan adalah pembinaan kebudayaan tidak semata-mata menjadi urusan pemerintahan daerah dengan kebudayaanya namun bagaimana kebudayaan daerah yang ada itu dikembangkan untuk memperkaya dan melengkapi kebudayaan nasional. Agar tergambar secara jelas sosok budaya Indonesia sebagaimana disebut dalam pasal tentang kebudayaan nasional tersebut. Dimana dinyatakan bahwa “ayat (1) negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan memajukan budayanya. Ayat (2) negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Salah satu indikator yang selama ini dikenal adalah bahwa budaya Indonesia dimanifestasikan melalui perilaku orang Indonesia, yang suka senyum, ramah, dan

²¹Baca Russel G. Davis, dkk, *Planning Education For Development Volume II*, (Cabridge: Massachusetss, 1980).

menghormati tamu misalnya serta menghargai orang. Namun sebagai akibat dipisahkannya kebudayaan dengan pendidikan di masa lalu, maka sebagai akibatnya bangsa Indonesia telah kehilangan jati dirinya yang sebenarnya berakar pada budaya daerah yang manjemuk itu. Paksaan selama 32 tahun untuk menjadi seragam namun kenyataannya kita adalah bangsa yang majemuk telah menimbulkan malapetaka hilangnya nilai-nilai yang dibanggakan itu bersama dengan semakin menebalnya dan sentimen kedaerahan bahkan merambah kepada sentimen agama yang selama ini telah hidup di dalam hati sanubari setiap manusia Indonesia yang beradab.

Tujuan Pendidikan Nasional

Alangkah mulianya cita-cita kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang hanya mungkin tercapai dengan perekonomian yang maju dan rakyat yang berakhlak baik dan cerdas. Itu sebabnya cita-cita umum pendidikan bangsa kita harus berpandangan jauh ke depan tentang visi manusia Indonesia yang sebaik-baiknya. Untunglah hal itu dapat dijabarkan sebagai tujuan pendidikan Indonesia, baik dalam UU RI (dahulu) no 4/1950 kemudian UU RI no 22/1961, UU-RI no 2/1989 dan terakhir pada pasal 3 UU Ri No 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional. Yaitu pendidikan Indonesia bertujuan agar peserta didik berkembang potensinya “menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Itu adalah cita-cita pendidikan dan maksud dan tujuan jangka panjang yang mulia, amat luas bersifat makro. Maksud dan cita-cita jauh itu juga menyeimbangkan antara (i) kepentingan tumbuh

kembangnya potensi anak/individu manusiawi dengan (ii) kepentingan masyarakat untuk membina tenaga terdidik dan terlatih siap kerja dan berdaya saing di dunia kerja masa depan yang kompetitif antara kelompok dan antara negara. Maka karena kepentingan masa depan, negara memerlukan tatanan prioritas pendidikan nasional agar membagi prioritas antara masyarakat dan individu, utama antara persaingan dan kemitraan global.

Adapun cita-cita jangka panjang yang jauh itu harus dimaksudkan negara dan pendidikan agar terwujud minimum oleh orang dewasa diantara penduduk di sebagian besar wilayah provinsi untuk jangka waktu sekurangnya dua sampai tiga generasi manusia Indonesia (50 -70) tahun ke depan. Tujuan dalam Undang-undang dasar bukan khusus (spesifik) dari kurikulum dan pembelajaran pada tingkat institusi ataupun setempat yang akan mampu dicapai masing-masing sekolah sekalipun dengan optimalisasi kinerja daan pencapaian tujuan nasional. Sebaiknya cita-cita makro itu mungkin terbatas dicapai dalam jangka menengah oleh peserta didik yang dewasa muda di perguruan tinggi pasca program diploma atau sarjana, atau orang dewasa terpelajar umumnya apabila selesai dengan baik pasca pendidikan nonformal atau program latihan dalam jabatan. Dalam perkembangan pendidikan di negara maju selama abad 20 dapat dibedakan antara tingkat-tingkat hirarki tujuan pendidikan. Tentu saja tingkat tertinggi adalah keputusan pemerintah/legislatif, tertuang dalam peraturan perundang-undangan (UU RI, Amandemen UUD) merupakan maksud dan tujuan jangka amat panjang bersifat filosofis, religus untuk tumbuhnya suatu generasi baru bangsa melalui tahapan-tahapan pendidikan. Sedangkan tujuan-tujuan

paling bawah bisa bersifat umum atau spesifik-khusus namun bersifat jangka pendek sehingga memerlukan rumusan dan pelebaran kemampuan terdidik/siswa oleh guru sekolah setempat secara didaktika ilmu pengetahuan pendidikan.

Pendidikan kita di Indonesia, berbeda dengan Malaysia, Singapura, dan negara maju lainnya. Program pendidikan kita belum mampu menghasilkan generasi lulusan dan alumni pendidikan menengah dan tinggi yang mampu segera mengubah wajah masyarakat karena belum didukung oleh negara. Itu berarti pendidikan memerlukan waktu dan pencapaian tujuan secara murni dan program jangka 4 tahun atau lebih. Konsekwensinya cita-cita yang termuat dalam tujuan pendidikan nasional belum terwujud oleh mayoritas generasi muda untuk menciptakan masyarakat bangsa yang lebih baik dan hidup lebih cerdas. Oleh karena itu diperlukan tujuan perantara atau sementara sebagai perhatian sebelum melanjutkan perjalanan untuk mencapai maksud dan cita-cita lebih muluk dan lebih jauh. Menurut ilmu pedagogik teoritik tujuan sementara itu secara individual, sebagai maksud yang berlaku umum secara universal bagi terwujudnya cita-cita seperti di atas ialah terwujudnya kedewasaan pada setiap individu anak kira-kira sebelum usia 25-30 tahun. Atas dasar itu dan mengingat perkembangan dan belajar yang lama dilalui dari fase anak sekolah dengan melalui masa puber transisi dan adolesen barulah kemudian manusia muda itu mencapai tahapan kedewasaan yang belum sepenuhnya langsung dewasa sarat nilai-nilai.

Selain aspek individual diperlukan tujuan sementara pendidikan formal-nonformal juga pada tingkat sub sistem bagi pencapaian maksud dan cita-cita yang

dinyatakan undang-undang. Tidak semua daerah dan provinsi mempunyai sumber-sumber yang sebanding untuk mendukung pendidikan nasional dalam praktek. Kecuali universitas/institut berkualitas, tak mungkin setiap perguruan tinggi atau setiap sekolah pada jenjang SD, LTP, SM mampu berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan nasional yang muluk-muluk itu. Sebaliknya diperlukan tujuan-tujuan sementara tingkat provinsi/daerah sebagai pelajaran tujuan jangka menengah dalam rangka mendukung tujuan nasional/maksud pendidikan seperti dalam jangka menengah dalam rangka mendukung tujuan/maksud pendidikan seperti dalam pasal 3 UU-RI no 20 tahun 2003. Kita dalam persekolahan mengenal penjenjangan sistem pengajaran di sekolah dari tingkat bawah ke tingkat menengah, dan tingkat perguruan tinggi. Penjenjangan itu diperlukan satuan persekolahan untuk melaksanakan jenis-jenis dan keseimbangan tujuan-tujuan khusus kurikulum. Namun penjenjangan itu dibutuhkan pula untuk meningkatkan pelayanan mendasar setiap jenjang dari setiap satuan sekolah dalam memajukan pendidikan tingkat lokal per daerah dan kontribusi terhadap pencapaian maksud/tujuan nasional. Itu sebabnya negara-negara modern mau dan memaksakan diri menanggung sebagian besar biaya pelaksanaan menyelenggarakan pendidikan dasar 9 tahun. Bahkan mungkin juga sekolah menengah di bawah perguruan tinggi dengan iuran pungutan relatif lebih rendah.

Bahkan tujuan-tujuan sekolah pasca perang dunia II 1939-1945 di negara maju mulai membedakan antara tujuan-tujuan khusus kurikulum jangka pendek dan tujuan pelajaran keseharian dalam pendidikan dan pengajaran. Itu melahirkan tujuan kurikulum/pembelajaran umum dan

khusus sebagai alat dalam rangka mewujudkan tujuan kelembagaan. Pendidikan antara jenjang dan antara sekolah per daerah untuk jangka menengah/panjang secara lokal/ kedaerahan baik untuk tujuan sementara per daerah maupun penjabaran dan cita-cita dan atau tujuan umum nasional. Sedangkan tujuan jangka waktu yang lebih panjang itu menjadi instrumen pula untuk mewujudkan cita-cita falsafah negara mencapai masyarakat adil makmur dalam pergaulan masyarakat internasional di dunia yang aman dan damai.

Adanya regenerasi penduduk secara reproduksi-biologis telah dilaksanakan dengan baik oleh keluarga sebagai pranata sosial. Sedangkan dengan pendidikan diharapkan terjadinya regenerasi masyarakat dan perubahan sosial dengan baik termasuk keberlanjutan regenerasi nilai-nilai budaya sebagai kekuatan perekat masyarakat. Bukan saja isi pendidikan itu baik untuk individu dan masyarakat instrumen berjangka waktu relatif pendek melainkan tujuan-tujuan harus juga baik dilihat dari nilai-nilai abadi/luhur secara intrinsik yaitu meningkatnya harkat manusia berjangka lebih panjang dalam arti makin baiknya kehidupan manusia berpribadi utuh dan berbudaya sejahtera. Gejala pendidikan dalam masyarakat di setiap waktu dan tempat adalah bagian dari tingkat kesejahteraan sosial sekaligus alat ampuh untuk jangka panjang bagi meningkatnya kesejahteraan umum dan mobilitas sosial individu dan kelompok. Itu sebabnya dikatakan bahwa pendidikan merupakan kegiatan dan upaya manusia yang paling sesuai dengan tugas hidup dan hakikat manusia. Jadi pendidikan di satu sisi termasuk bidang kehidupan kesejahteraan yang konsumtif, juga disisi lain termasuk bidang perubahan sosial menuju

negara ideal. Dan bidang kemakmuran agar generasi muda dan semua warga negara semakin produktif dan juga lebih konstruktif terhadap masyarakat.

Dari faktor eksternal yang perlu diperhatikan dalam pendidikan anak, termasuk faktor luar ialah orang tua, saudara laki-laki dan saudara perempuan, kaum kerabat, dan kegiatan serta kebiasaan keluarga. Faktor masyarakat sekitar ialah lingkungan etnik, kota atau desa tempat tinggal, sahabat dan teman dekat, sahabat keluarga, kegiatan sosial kemasyarakatan dan anak-anak sebaya se RT/RW. Faktor sekolah ialah guru, kepala sekolah, semua murid di kelas, pelajaran-pelajaran dan anak-anak lainnya di sekolah. Faktor agama dan faktor politik, pemimpin formal/informal, kitab suci dan ideologi khusus partai. Mengingat kebiasaan sering tumbuh menjadi perbuatan otomatis/mekanistik. Sebaliknya pembentukan kebiasaan baik pada manusia adalah bagian dari pembentukan karakter. Maka dalam pendidikan terjalin tanggungjawab rasional, moral, dan sosial. Oleh karena itu gejala pendidikan sungguh-sungguh paling relevan secara khusus dengan kehidupan dan karakteristik manusia. tak heran bahwa kepentingan pendidikan merupakan bagian penting dari ajaran berbagai agama.

Setiap pendidikan adalah sesuatu yang bernilai, pertama, baik karena tujuannya bernilai yaitu memanusiakan manusia dan anak manusia menjadi manusia yang hakiki. Artinya bahwa dalam setiap pendidikan tidak ada maksud tersembunyi untuk mengabaikan, merugikan dan melecehkan hak-hak dan kewajiban manusia terhadap anak manusia dan sesama manusia. Bahkan inti dan arti maksud dan tujuan dalam hakekat pendidikan ialah tercapainya tujuan jangka panjang (yaitu cita-cita

pendidikan sekurang-kurangnya satu generasi ke depan) bahwa melalui program pendidikan terkini harus mampu tercapai pada waktunya kelak kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera bagi generasi penerus muda. Ini adalah satu kebajikan murni yang bernilai intrinsik. Makin lekas hal itu tercapai maka itu akan lebih baik bagi manusia dan pendidikannya. Sedangkan untuk jangka waktu yang lebih pendek dalam pendidikan harus dicapai tujuan-tujuan khusus yang spesifik dan jelas. Apabila terdapat perbedaan besar antara tujuan-tujuan spesifik jangka pendek dengan tujuan umum jangka panjang maka harus ada tujuan-tujuan antara atau sementara yang menjadi penghubung dengan tahapan perkembangan ke arah terwujudnya tujuan sejati yang bersifat umum.

Kedua, semua cara-cara pendidikan harus bernilai baik pula, sekurang-kurangnya bernilai instrumental (alat atau wahana bernilai baik sebagai alat untuk mewujudkan sesuatu) bagi pencapaian tujuan-tujuan spesifik dan khusus serta harapan-harapan ekstrinsik yang lebih umum secara eksternal. Mengingat makna pendidikan langsung terkait dengan harkat manusia maka dengan pendidikan yang terbaik tentu harkat manusia akan mampu terbina dan ditingkatkan. Peningkatan martabat manusia harus menjadi isi dari perbuatan sosial dan ditingkatkan. Peningkatan martabat manusia harus menjadi isi dari perubahan sosial yang terjadi dimana-mana. Mengingat terjadinya perubahan sosial secara dinamis maka pendidikan utamanya melalui jenjang persekolahan, harus menjadi lembaga yang terbina baik secara terpimpin untuk mampu melayani ummat manusia dan kemanusiaan. Seharusnya bidang pendidikan menjadi simbol dari kata hati atau nurani masyarakat kita bagi terwujudnya

masyarakat masa depan yang lebih baik di negara Indonesia yang diperkaya ragam budaya lokal/daerahnya.

Dengan meningkatkan harkat manusia melebihi makhluk lainnya maka manusia berakal, makhluk bio-sosial yang berbeda dari pada hewan. Dengan begitu praktek pendidikan dan ilmu pendidikan paling berapresiasi atas harkat manusia seperti halnya ajaran agama-agama kewahyuan. Karena itu dilihat dari praktek dan tindakan pendidikan, terdapat hubungan saling melengkapi secara komplementer dalam teori pendidikan dan mendidik antara pedagogi (pedagogy) dan pedagogik (pedagogies) dengan filsafat pendidikan. Tindakan mendidik dan kemungkinan dididik sebagai inti pendidikan tidak hanya sekedar pembinaan perilaku dengan jalan belajar dan berlatih melainkan perubahan perilaku dan pembinaan/ pengembangan kepribadian dengan jalan mendidik, mengembangkan diri/terdidik. Belajar dengan lingkungan relasi inter-subjektif secara insani antara pendidik dan peserta didik dalam situasi atau keterampilan, serta belajar dalam arti behavioristik mampu juga dilakukan sebagian hewan-hewan. Sedangkan dengan kegiatan mendidik dan terdidik, pendidikannya hanya dilakukan dan berlaku pada dunia manusia yaitu dalam keluarga dan di luar keluarga²².

Tujuan Pendidikan Nasional dan Tujuan Pendidikan Sekolah Dasar

²²Waini Rasyidin, *Modul Landasan Filosofis Pendidikan Dasar: Modul 2 antara Manusia dan Pendidikan*, (Bandung: Program Magister UPI Bandung, 2007), h. 8

Berbeda dengan MJ. Langeveld, kaum pragmatisme (John Dewey) mengemukakan bahwa tujuan pendidikan itu ada dalam proses pendidikan, sehingga proses pendidikan tidak memiliki tujuan yang terpisah. Pendidiklah yang memikirkan tujuan pendidikan itu. Pragmatisme memandang bahwa setiap fase dalam proses pendidikan itu merupakan alat untuk mencapai fase berikutnya. Dengan demikian fase yang akan ditempuh dari fase sebelumnya adalah merupakan tujuan yang ada dalam proses pendidikan itu. MJ. Langeveld membagi tujuan menjadi:

1. Tujuan akhir (umum, universal, dan total)
2. Pengkhususan tujuan umum
3. Tujuan sementara
4. Tujuan tak lengkap
5. Tujuan insidental
6. Tujuan aksidental
7. Tujuan intermedier

Visi, Misi, dan Fokus Pendidikan Sekolah Dasar

Apabila ditelaah tentang rumusan tujuan pendidikan nasional dan rumusan tujuan pendidikan sekolah dasar, dapat dikategorikan sebagai visi yang memberikan arah kemana pendidikan akan dicapai sebagai cita-cita visioner yang memberikan harapan bagi kehidupan anak, dan masa depan pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa. Visi pendidikan seluruh sekolah adalah mengembangkan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab. Untuk mendukung pencapaian tersebut, pengembangan kompe-

tensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan.

Misi yang ingin diimplementasikan dalam praktek pendidikan yang sesuai dengan tahap perkembangan pendidikan, didasarkan pada beberapa prinsip yaitu: berpusat pada potensi, perkembangan dan kebutuhan, beragaman dan teradu, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, prinsip relevan dengan kebutuhan hidup, prinsip menyeluruh dan berkesinambungan, belajar sepanjang hayat, seimbang antara kepentingan nasional dan lokal. Dengan demikian misi yang secara khusus pada pendidikan sekolah ada adalah: belajar untuk memahami dan menghayati, belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, belajar untuk hidup bersama, dan berguna bagi orang lain, dan belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan lain sebagainya.

Sesuai dengan prinsip pendidikan yang demikian, maka fokus pendidikan pada pendidikan anak khususnya sekolah dasar adalah bukan hanya pada pengajaran tetapi merupakan pendekatan antara pendidik dan mengajar. Hal ini merupakan konsep yang perlu dikembangkan, karena dunia anak masih memerlukan dunia yang dekat dengan dunia orang tua, dunia kasih sayang, dan secara biologis dan psikologis anak memerlukan bantuan secara langsung atau tidak langsung dari pihak lain, dalam mengembangkan seluruh potensi dan kepribadiannya.

Berbeda dengan pengajaran, maka pendidikan sekolah dasar merupakan awal dimana anak mulai belajar secara terstruktur terhadap berbagai pengetahuan,

sehingga anak mulai terbentuk struktur kognitifnya. Namun pengajaran di sekolah dasar atau pendidikan anak usia dini, merupakan langkah awal memperkenalkan tentang dunia dan sekitarnya kepada anak, bahwa ada aturan-aturan yang bersifat hukum alam, yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang hanya bisa dipahami melalui proses berfikir secara logic. Sehingga pengajaran di sekolah dasar didasari oleh pendekatan yang bersifat psikologis, biologis, dan pedagogis. Artinya pengajaran di SD lebih berorientasi kepada pengenalan secara kongkrit terhadap fakta-fakta alam, sesuai dengan tahap perkembangan anak dan kebutuhan anak, serta dunia anak yang membutuhkan kasih sayang.

Secara filsafat, filsafat pendidikan Sekolah Dasar dapat dijelaskan secara: Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis. Secara ontologis, tujuan pendidikan SD adalah mempersiapkan peserta didik agar menjadi manusia yang memilih kemampuan dasar dalam menulis, membaca, dan hitung untuk kepentingan kehidupannya di masyarakat yang selalu berubah dan berkembang, sehingga ia mampu mengikuti perkembangan dunia dengan belajar sepanjang hayat pada tingkat dan jenis yang lebih tinggi.

Kajian pendekatan ini mengimplikasikan bahwa pendidikan hendaknya memiliki tujuan yang mampu mengaktualisasikan potensi kemanusiaan anak sesuai dengan tingkat perkembangan dan kematangan pribadinya. Sesuai dengan dasar falsafah bangsa Indonesia, bahwa untuk mengejar ketertinggalan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dasar yang paling prinsipil bagi anak usia SD adalah belajar membaca, menulis, dan berhitung. Prinsip “tree-R” (Reading, wRitting, aRitmatic) adalah

suatu konsep lama yang sampai sekarang banyak digunakan oleh berbagai negara²³.

Membaca adalah awal kegiatan belajar yang melibatkan kemampuan untuk menyatakan pendapat dengan melihat fakta dan mengkomunikasikan melalui kefasihan berbicara. Aktivitas dasar dari manusia ini perlu dipelajari anak, karena akan membekali seseorang, dalam komunikasinya dengan orang lain. Apabila tahap ini ada kendala baik, teori maupun praktek, akan mengakibatkan kesulitan dalam perkembangannya. Dalam tahap ini anak belajar bahasa secara formal untuk komunikasi verbal, signal maupun visual, serta alat ekspresi sikap dan pendapat.

Belajar menulis, merupakan proses pendidikan yang melibatkan seluruh potensi kepribadian anak dalam mengekspresikan pendapat ke dalam bentuk tulisan, yang disertai dengan gerak anggota tubuh dan konsentrasi dari pikiran dan gaya dari ekspresi estetis seseorang. Awal dari belajar menulis, sangat sederhana, yaitu dimulai dengan gerakan otot pada tangan atau anggota tubuh lainnya bagi yang mengalami kelainan, dari kasar ke halus, yang kemudian menjadi gerakan estetis dan ekspresif diri.

Demikian pula belajar berhitung. Belajar berhitung bagi pendidikan dasar anak usia SD, karena proses kehidupan anak melibatkan aspek kognitif/ intelektual. Dalam kehidupan anak dilingkungi oleh fakta-fakat yang berkaitan dengan jumlah, himpunan, klasifikasi dan generalisasi. Untuk memahami jumlah ini harus belajar bilangan, untuk memahami himpunan ia harus

²³Ibid.

karakteristik anggota, untuk memahami klasifikasi ia harus belajar himpunan, dan untuk belajar untuk memahami generalisasi ia harus mempelajari karakteristik fakta, himpunan, dan klasifikasi. Muara belajar yang demikian, akan membentuk kemampuan seseorang dalam berfikir induktif, maupun deduktif. Sedangkan dampak pendidikannya adalah bentuk sikap jujur, percaya diri, terbuka, dan obyektif.

Secara epistemologis, pendidikan pada sekolah dasar merupakan tingkat perkembangan yang secara umum mereka mulai masuk pada tahap kehidupan intelektual, sehingga perlu dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan faktual, empiric, obyektif, dan logic. Pengetahuan yang bersifat faktual dan empiric mendasari pengetahuan obyektif, sehingga mendasari model pemikiran dan penelitian ilmiah. Demikian pula, sesuai dengan tingkat pemikiran intelektual anak yang secara umum masih pada tahap perkembangan konkrit, dibutuhkan pendekatan-pendekatan baik ilmiah maupun praktek yang didasarkan pada teori-teori ilmu pengetahuan maupun teknologi baru. Pengetahuan-pengetahuan tersebut akan membentuk sikap jujur, transparan, demokratis, rasional, kreatif, dan berani menyatakan yang benar.

Secara sosiologis, pendidikan pada sekolah dasar menerapkan prinsip-prinsip nilai yang membentuk sikap kepribadian etis normatif, estetis, imajinatif, dan kreatif. Untuk mengembangkan sikap demikian perlu kreativitas guru yang mampu membangkitkan motivasi anak agar potensi yang masih terpendam menjadi aktual dalam bentuk aktivitas kreatif yang estetis dan etis. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan-pendekatan metodologis yang

berbasis pada seni mendidik yang didasari pendekatan filsafah, ilmiah, dan teknologis²⁴.

Mengapa Filsafat Pendidikan Perlu/Dibutuhkan

Mengapa pendidikan membutuhkan filosofis? Karena beberapa masalah pendidikan yang tidak bisa dijawab oleh pendekatan ilmiah, misalnya apa tujuan hidup manusia, apa hakekat manusia, apa hakekat tujuan pendidikan, dan apakah tujuan pendidikan merupakan penjabaran dari tujuan hidup? Oleh karena itu masalah pendidikan tidak sekedar persoalan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan relativitas pendidikan, tetapi bagaimana tingkat efisiensi, efektivitas, relevansi itu selaras dengan amanah cita-cita bangsa Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman bertaqwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, berdaya saing, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pendidikan membutuhkan pendekatan-pendekatan kefilosofatan dan keilmuan, bahkan juga religi. Namun bukan berarti ilmu pendidikan tidak memiliki pijakan sendiri dalam menentukan objek, metode, teori dan generalisasi, tetapi ada berbagai permasalahan yang tidak bisa dipecahkan secara filsafat, dan ada yang tidak bisa dipecahkan secara keilmuan. Jika tujuan pendidikan ingin meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mungkin

²⁴*Ibid.*, H. 45

pendekatan yang paling cocok adalah religi atau agama, bahkan filsafat dan ilmu. Tetapi filsafat dan ilmu bisa dibantu memberikan analisis kritis bagaimana mempersiapkan pengembangan pribadi yang berakhlak mulia sesuai dengan ajaran agama atau tata aturan yang berlaku di masyarakat²⁵.

Beberapa Pendekatan Filosofi terhadap Pendidikan

1. Pendekatan Sinoptik. Ilmu pendidikan menganalisis persoalan-persoalan pendidikan dengan jalan menganalisis permasalahan sedetail mungkin sehingga menemukan unsur-unsurnya yang terkecil, setelah menganalisa secara empirik karakteristik unsur-unsur itu, maka dicari kesimpulan yang bersifat umum, yaitu yang berlaku pada semua bagian tersebut. Sejarah pendidikan sebagai ilmu pendidikan historis, meneliti obyeknya dan berusaha memberikan deskripsi peristiwa sejarah pendidikan individual. Di lain pihak filsafat mendekati masalah-masalah pendidikan secara sinoptik atau komprehensif. Sinoptik mempunyai pengertian memandukan pandangan, yaitu dari sini bersama atau memadukan, dan optik penglihatan, pandangan, dan thesa berarti pendirian. Pengertian sinoptik adalah memadukan pandangan keseluruhan pendirian menjadi satu sistem pemikiran yang utuh. Bila ilmu pendidikan menganalisa, maka filsafat

²⁵Waini Rasyidin, *Modul Landasan Filosofis Pendidikan Dasar: Modul 2 antara Manusia dan Pendidikan*, (Bandung: Program Magister UPI Bandung, 2007), h. 12

mensintesa. Alat yang menyatukan dalam proses berfikir sintesis itu ialah pendirian filsafi, yaitu apabila filsafat itu menjawab masalah-masalah filsafat seperti apakah manusia itu, apakah hidup itu, apakah materi itu, apakah sebenarnya kenyataan itu dan sebagainya.

Pendekatan sinoptik itu didasarkan pada cara filsafat yang memandang dunia secara komprehensif, berbeda dengan ilmu mencoba memahami suatu bagian dari lingkungan kita. Tiap-tiap ilmu memperhatikan salah satu bidang kehidupan manusia. Bidang kehidupan yang diteliti oleh ilmu disebut obyek ilmu. Misalnya obyek kajian ilmu pendidikan (pedagogik) adalah situasi pendidikan, yaitu hubungan antara pendidikan dengan anak didik ketika pendidik dengan sengaja berusaha membantu anak didik itu dalam perkembangannya ke arah kedewasaan.

Kajian filsafat pendidikan terhadap empirik pendidikan, adalah berupaya untuk memahami dan merenungkan bukan hanya hakekat situasi pendidikan, melainkan seluruh masalah pendidikan baik mikro maupun makro. Selain itu filsafat pendidikan menguji pemahamannya tentang apakah mendidik itu dengan kriteria yang bersumber dari pendirian-pendirian filsafi tentang hakekat manusia, hakekat hidup, tubuh-j jiwa, dan sebagainya. Pendekatan sinoptik juga berupaya merenungkan secara spekulatif mengenai persoalan-persoalan pendidikan itu. Berfikir secara spekulatif mengandung makna bahwa pendidikan membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang disusun

berdasarkan pada aturan, berfikir yang ketat, sehingga hasil pemikiran yang spekulatif haruslah merupakan suatu pemikiran yang logis. Demikian pula, pemikiran spekulatif membutuhkan kemampuan antisipasi tinggi untuk mengetahui lebih dahulu apa yang akan terjadi. Berfikir spekulatif menuntut bukan hanya segi pengetahuan, tetapi terutama kepekaan untuk menghayati persoalan pendidikan. Dengan demikian, filsafat membantu memecahkan persoalan pendidikan tidak hanya secara rasional, tetapi juga secara artistik. Prinsip ini cocok dengan pandangan bahwa mendidik itu adalah seni. Namun pendidikan juga membutuhkan pendekatan ilmiah, untuk memahami gejala empirik pendidikan dapat diprediksi keberhasilannya, agar tindakan mendidik lebih efektif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

2. Pendekatan normatif. Ilmu pendidikan, mendekati situasi pendidikan dengan memotret gejala pendidikan itu sebagaimana dialami oleh para orang tua, guru, administrator pendidik, ⁴ pembimbing dan penyuluh, dan pendidik lainnya. Ilmu pendidikan berusaha menemukan hukum yang berlaku bagi sebagian besar situasi pendidikan itu, dan dengan hukum-hukum itu ilmu pendidikan berusaha meramalkan apa yang akan terjadi dalam bidang pendidikan.

Pendekatan filsafi terhadap pendidikan tidak bersifat deskriptif ⁴ seperti ilmu, melainkan bersifat normatif. Dengan demikian, filsafat pendidikan menunjukkan jalan terbaik bagi pemecahan masalah pendidikan, karena filsafat

pendidikan mempelajari apa yang seharusnya terjadi. Filsafat pendidikan memikirkan secara mendalam norma yang harus dicapai oleh pendidikan, baik dalam arti mikro maupun makro. Norma itu antara lain berupa tujuan pendidikan, atau filsafah pendidikan.

Ilmu pendidikan melakukan prediksi berdasarkan fakta pendidikan yang dikumpulkan dengan menggunakan metode penelitian historis-dokumenter, serta pengolahan data secara statistik. Dengan cara demikian, maka ilmu pendidikan dapat meramalkan, misalnya apakah calon mahasiswa suatu PT bertambah berapa persen pada tahun yang akan datang (berdasarkan angka-4 angka selama tiga atau dua tahun belakangan) angka tentang kekurangan guru, penghargaan masyarakat terhadap profesi guru, dan sebagainya.

Tugas filsafat pendidikan, adalah merumuskan tujuan pendidikan yang berlaku secara nasional untuk jangka waktu yang sangat panjang, maupun dalam jangka waktu tertentu. Dalam tujuan pendidikan inilah norma-norma kehidupan dirumuskan baik secara tersurat maupun tersirat, sehingga tujuan pendidikan yang akan dicapai memuat cita-cita hidup yang baik yang diinginkan oleh masyarakat. Mengingat pentingnya norma dalam pendidikan, timbul pertanyaan dari mana norma itu? Apa sumber norma dalam pendidikan? Sumber pertama, filsafat yang tertulis dalam buku-buku besar seperti kitab suci, buku filsafat, buku kesusastraan, Undang-undang Dasar, dan sebagainya. Sumber kedua ialah norma-norma

yang tidak tertulis tetapi diketahui oleh masyarakat dalam praktek kehidupan sehari-hari, misalnya tujuan hidup, nilai-nilai tradisi yang baik hal-hal yang dianggap baik, benar dan indah, dan sebagainya, yang berlaku di dalam masyarakat tertentu.

Pendekatan filsafat secara normatif menuntut agar filsafat pendidikan menurunkan prinsip-prinsip atau pendirian-pendirian yang telah direnungkan oleh para filsuf, sehingga menjadi tujuan pendidikan yang terinci dan tersusun secara sistematis.

Pendekatan filsafat secara normatif juga menuntut agar filsafat pendidikan membukakan diriya terhadap penemuan ilmu pendidikan dan ilmu-ilmu lain, seperti sosiologi, psikologi, antropologi, ekonomi, administrasi, dan juga ilmu politik, untuk memikirkan penemuan-penemuan ilmu tersebut dalam bidang norma-norma yang terdapat dalam masyarakat. Hasil pemikiran filsafat tentang norma-norma yang sedang berlaku di tengah masyarakat tertentu itu. Alam merupakan falsafah pendidikan yang relevan dengan tingkat perkembangan spritual masyarakat. Dari falsafah pendidikan yang bersumber dari fakta empirik yang sebenarnya itu, maka dapat dirumuskan tujuan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan nyata dalam suatu masyarakat.

3. Pendekatan kritis radikal. Perbedaan pendekatan ilmiah dengan filsafat bukan hanya pada obyek kajiannya, tetapi pada asumsi yang digunakan. pendekatan ilmu selalu didasarkan pada satu atau

beberapa asumsi dasar, *basic assumption*. Sedangkan filsafat mendekati masalahnya dengan jalan menguji asumsi dasarnya. Pengujian asumsi dasar inilah yang disebut kritis radikal. Baik ilmu maupun filsafat memikirkan persoalannya lebih kritis, tetapi hanya filsafat yang hanya memikirkan persoalannya secara radikal. Sebagai ilustrasi dapat dideskripsikan sebagai berikut: ilmu alam menemukan teori gravitas. Teori ini mengatakan bahwa setia benda yang dijatuhkan dari atas, akan jatuh ke bawah, karena adanya gaya tarik bumi.

Pemikiran filsafat, bukan menolak apa yang ditemukan oleh ilmu, sebab teori sesuai dengan hukum alam. Filsafat menerima temuan kebenaran pengetahuan ilmu, namun filsafat tidak berhenti sampai disitu. Ia mempertanyakan apa hakekat benda, apa hakekat bumi, dan apa hakekat gaya tarik bumi. Sebab, ternyata ada batas yang menjadi wilayah gaya tarik bumi. Pada jarak dan batas atmosfer tertentu, benda tidak bisa jatuh ke bumi. Namun temuan ini merupakan revolusi dalam bidang ilmu, sehingga banyak teori-teori fisika yang berkiblat ke sini.

Pendekatan filsafat yang sifatnya kritis radikal sangat dibutuhkan oleh teori dan praktek pendidikan. Pendekatan ini penting karena sistem pendidikan yang kuat perlu⁴ diuji bukan hanya hukum-hukum atau teori pendidikan itu. Jika hukum maupun asumsi dasar itu telah diuji secara teliti, maka dapat diharapkan kita telah mempunyai konsepsi pendidikan yang baik. Walaupun demikian, konsepsi pendidikan yang baik atau

benar secara logika dan norma, belum tentu dapat menjamin terlaksananya praktek pendidikan yang baik pula. Konsepsi pendidikan yang baik dan benar menuntut para pelaksana pendidikan yang cakap, terampil, dan mempunyai sikap profesional menjadi guru/pendidik.

Berdasarkan pendekatan filsafat terhadap pendidikan, maka filsafat pendidikan memang peran penting baik untuk membina perkembangan ilmu pendidikan maupun untuk praktek pendidikan⁴, demikian pula, filsafat pendidikan merupakan awal dan akhir dari perenungan dan penelitian pendidikan, yaitu bahwa semua persoalan dan kekurangan tentang pendidikan dapat dicari prinsip-prinsip penyelesaiannya pada filsafat pendidikan.

Dengan peranan filsafat pendidikan yang amat penting itu, dengan pendirian bahwa filsafat berperan sebagai disiplin sentral dalam keseluruhan proses pendidikan itu, maka perlu mendiskusikan bagaimana pendekatan filsafat terhadap beberapa pokok masalah filsafat yang penting.

Hak dan Kewajiban Bersekolah dalam UUD 1945

Dalam undang-undang dasar ditentukan bahwa setiap warganegara berhak memperoleh pengajaran dan pendidikan, serta negara melaksanakan satu sistem pendidikan atau sekurangnya sistem persekolahan nasional (pasal 31). Itu berarti sekalipun tak mencantumkan maksud dan tujuannya namun terimplisit bahwa pendidikan, lebih-lebih pendidikan yang diselenggarakan negara selain relevan dengan hakekat manusia juga akan

bermanfaat bagi negara miskin yang baru merdeka. Amat tepat isi pasal 5 UU RI no 20 tahun 2003 (sebagai revisi atas undang-undang Pendidikan Nasional 1989 ayat (1): setiap warganegara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu". Ditegaskan pula dalam pasal 1 butir 1, bahwa perbuatan pendidikan tidak sederhana melainkan bersifat kompleks dan kreatif dalam menciptakan suasana belajar untuk peserta didik, oleh peserta didik juga dalam relasi dengan pihak lain (pendidik) yang antara lain mampu merencanakan pembelajaran yang mendidik. Dengan itu diisyratkan bahwa bagian terbesar generasi muda seharusnya menyelesaikan bersekolah di jenjang SD dan SLTP sekurangnya setengah bertransisi ke pendidikan menengah agar sebagian kecil di atas 10% meneruskan ke perguruan tinggi sekalipun hanya untuk program diploma atau S1. Sedangkan putus sekolah baru dapat ditoleransi di sekolah menengah dan pendidikan tinggi. Maksudnya ialah agar angkatan tenaga kependidikan tinggi melebihi 5% sampai 10% sebagai calon tenaga kerja semi terampil dan terampil.

Kiranya hanya negara yang mampu menggerakkan porsi terbesar APBN/APBD dan atau produk nasional bruto secara relevan yang mampu melayani hak semua warga negara atas pendidikan yang bermutu dan merata sekarang dan bermutu dimasa depan. Sekurang-kurangnya layanan pendidikan bermutu harus dimulai di SLTP untuk kepentingan remaja yang beroptimasi pertumbuhan fisik dan inteleknya. Untuk sementara pembinaan kualitas SD ditunda sampai kelas teringi untuk, keperluan pemerataan layanan SD/MI secara kuantitatif. Tetapi jangan sampai pembinaan kualitas tertunda sampai jenjang menengah

selama angka partisipasi kasar (APK) dan murni (APM) jenjang sekolah menengah masih jauh dari memadai. Perlu diakui bahwa pola pembelajaran di sekolah tidak berkualitas, tentu akan ada murid yang akan bersikap negatif, apalagi di jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu prioritas pemerataan distribusi pendidikan secara kuantitatif tak akan selamanya bisa menganak tirikan mutu. Itu sebabnya suatu program wajar sekurang-kurangnya di SD sekalipun hanya mampu di sebagian propinsi di Jawa (dan Sumatera) harus segera mulai dilaksanakan.

Apabila kita tak bisa membandingkan komitmen negara kita sebelum tahun 1989-1999 dengan RRC yang besar, atau Filipina yang lebih kecil sekurangnya Indonesia pasca krisis multidimensional belum mampu menandingi Thailand, namun negara ASEAN ini diiringi kemampuan segera menjadikan bidang pendidikan sebagai prioritas nasional setelah undang-undang reformasi pendidikan 1999. Pada hal sebenarnya UU RI no 20 tahun 2003 sebenarnya juga adalah bagian dari produk gerakan reformasi nasional sampai huru hara berskala nasional 1998. Bahkan sebagian amanah GBHN 2000/TAP MPR dan pasal 31 UUD 1945 amandemen tahun 2000 berupa porsi 20 % APBN/APBD sampai sekarang belum juga terwujud secara aktual kecuali tercantum juga dalam UU-RI no. 20 tahun 2003.

BAB III

FILOSOFI PENDIDIKAN DALAM UU NO 20 TAHUN 2003

A. Pendahuluan

“Apa sih budaya bangsa itu?” Sangat mendasar dan sangat penting karena jawaban pertanyaan itu akan menentukan warna bangsa Indonesia sekarang dan masa depan, akan menentukan sumber pengembangan kebudayaan, juga akan menentukan warna kebudayaan yang akan dikembangkan itu. Bila hendak mengembangkan budaya bangsa maka yang pertama kita ajukan pertanyaan “Apa sih budaya bangsa itu?”

Ada berbagai teori yang muncul untuk menjawab pertanyaan itu. Tanpa membahas berbagai teori itu, saya mengajukan suatu pembakuan: yang dimaksud budaya bangsa (Indonesia) ialah budaya yang dikembangkan dari nilai-nilai dasar pancasila. Pertanyaan ini benar sekurang-kurangnya secara teoretis. Apa saja nilai dasar pancasila itu?

Ada lima nilai dasar dalam Pancasila. Pertama, orang Indonesia harus beriman kepada Tuhan YME menurut agamanya masing-masing. Makna penting dalam

nilai ini ialah dalam kebudayaan kita tidak boleh berkembang sekularisme apalagi atheisme²⁶.

Nilai ini menjiwai empat nilai lainnya. Dengan demikian, nilai kedua ialah kemanusiaan yang adil dan beradab berdasarkan keimanan kepada Tuhan YME, nilai ketiga, ialah persatuan Indonesia yang berdasarkan keimanan kepada Tuhan YME, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan berdasarkan keimanan kepada Tuhan YME, dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang berdasarkan keimanan kepada Tuhan YME.

Nilai pertama mempunyai fungsi ganda, pertama ia merupakan salah satu nilai dari lima nilai dasar, kedua ia menempati inti (core) yang menjiwai, mewarnai, atau mendasari, serta mengarahkan empat nilai lainnya, hal itu tergambar pada lambang yang terdapat pada dada burung garuda itu; di situ gambar bintang mengambil sebagian daerah empat lambang lainnya. Jika digambarkan maka kelima nilai dasar dalam Pancasila itu akan diperoleh gambar sebagai berikut:

²⁶Putro, Suadi, 1998, *Mohammad Arkoun Tentang Islam dan Modernitas*, Jakarta: Paramadina. Baca juga Al-Attas, Syed Muhammad Al-Nuquib, 1994, *Konsep Pendidikan dalam Islam: Suatu kerangka Berpikir Pembinaan Filsafat Pendidikan Islam*, Terj. Haidar Bagir, judul Asli, *The Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Education*, Bandung: Mizan.

Saya munculkan lagi pertanyaan tadi: Cukup memadaikah kelima nilai dasar itu untuk dijadikan sumber dalam membangun suatu kebudayaan bagi bangsa Indonesia? Menurut saya: cukup.

Kelima nilai itu adalah nilai dasar. Dalam mata pelajaran *civic* (kewarganegaraan) dapat kita lihat bahwa nilai-nilai itu memang nilai dasar, artinya masing-masing nilai itu dapat dijabarkan lebih rinci dan bila dijabarkan kita akan menemukan nilai-nilai (bukan lagi nilai dasar) yang begitu banyak dan amat mencukupi untuk dijadikan sumber dalam mengembangkan budaya bangsa kita. Tanpa mengajukan argument yang memadai saya berani menyimpulkan bahwa seluas apa pun kebudayaan bangsa kita akan dikembangkan, kita akan mendapati kebudayaan kita itu adalah kebudayaan yang dijiwai, diwarnai, dituntun, diarahkan, oleh keimanan kepada Tuhan YME, bila pengembangan kebudayaan itu benar-benar bersumber Pancasila.

Di atas tadi telah dikatakan bahwa langkah pertama dalam pengembangan budaya bangsa Indonesia ialah kita harus mengadakan penilaian di antara sekian banyak budaya yang ada. Pendirian ini juga terasa penting tatkala kita tengah memasuki budaya yang bersifat global. Uraian di atas itu telah menjelaskan salah satu sosok kebudayaan, yaitu kebudayaan yang berbasis Pancasila atau katakanlah Kebudayaan Pancasila.

Mirip sekali dengan analisis Nietzsche, menurut Capra²⁷ kekeliruan dalam membangun kebudayaan Barat

²⁷Pritjof Capra, *The Turning Point: Titik Balim Pertadaban Sains, Masyarakat, dan Kebangkitan Kebudayaan*, terj. M. Thoyibi, judul asli *The Turning Point Science, Society, and The Rising Culture*,

ialah karena kebudayaan itu dibangun hanya dengan menggunakan satu paradigma yaitu paradigm sains. Paradigma ini adalah warisan Descartes dan Newton. Paradigma ini, kata Capra, tidak mampu melihat alam semesta secara keseluruhan, paradigma ini hanya mampu melihat sebagian dari alam, yaitu bagian alam yang empiriknya saja. Pengaruh Cartesian dan Newtonian itu terlihat lebih sederhana dalam skema berikut.

Kata Capra, harus ada paradigma baru, yaitu paradigma yang mampu melihat alam semesta ini sebagai suatu sistem secara keseluruhan. Menurutnya paradigma baru itu adalah paradigma yang didasari oleh ajaran I Ching. Paradigma baru itulah yang harus digunakan dalam membangun kebudayaan Barat, demikian kesimpulan Capra.

Mengapa Capra memilih I Ching (suatu ajaran Filosofi di China) bukan memilih ajaran Islam? Padahal, I Ching, katakanlah filsafat ini mampu melihat alam semesta secara menyeluruh sebagai suatu sistem, toh filsafat ini belum pernah mampu menciptakan suatu kehidupan masyarakat berbudaya tinggi. Paling jauh I Ching itu baru mencakupi secara teoretis. Sementara itu Islam selain ia mengandung ajaran yang mampu melihat alam semesta secara menyeluruh sebagai suatu sistem dalam kenyataannya Islam itu telah mampu menciptakan masyarakat berbudaya tinggi sebagaimana diperlihatkan pada Negara Madinah pada zaman Muhammad SAW, Abu

(Bandung: Jejak, 2007), cet. Ke-7. Baca Juga, Pritjof Capra, Menyatu Dengan Semesta, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 1991).

Bakar dan 'Umar. Hemat saya, paradigma baru dikehendaki Capra itu adalah paradigma baru yang berdasarkan Islam. Mungkin Capra kurang mengenal Islam²⁸.

Berdasarkan uraian di atas, terutama tentang kehancuran kebudayaan Barat, apakah anda tetap akan memilih nilai-nilai dalam budaya Barat itu untuk dikembangkan dalam kebudayaan pancasilais? Seandainya saya pendidik atau orang yang bertanggungjawab tentang pendidikan saya akan memilih nilai-nilai dalam Pancasila dalam mengembangkan budaya Indonesia, suatu sistem nilai yang pada dasarnya diambil dari ajaran agama.

B. Filsafat Negara Sebagai Dasar Pendidikan

Negara terbentuk karena adanya kesepakatan warga Negara untuk hidup bersama. Yang disepakati warga negara tersebut ialah nilai-nilai utama yang sering disebut nilai luhur yang akan menjadi sumber peraturan dalam menjalankan negara. Nilai-nilai utama itu disebut filsafat negara (FN). Nilai-nilai filsafat negara itulah yang akan mengoperasikan negara itu.

Nilai-nilai dalam filsafat negara itu pasti tidak atau belum operasional karena ia masih pada level filsafat. Nilai-nilai itu harus dioperasionalkan agar ia mampu menjalankan atau mengoperasikan negara tersebut. Nilai-

²⁸Bandingkan dengan Karen Armstrong, *History of God: the 4000 Year Quest of Judaism, Christianity and Islam*, terj. Sejarah Tuhan: Kisah Pencarian Tuhan Yang Dilakukan oleh Orang-Orang Yahudi, Krinsten, dan Islam, Bandung: Mizan, 2001.

nilai dalam filsafat negara tersebut dioperasionalkan dalam konstitusi (undang-undang dasar)²⁹.

Dalam konstitusi itu nilai-nilai filsafat negara tersebut belum juga operasional. Karena itu konstitusi atau Undang-undang Dasar (UUD) tersebut harus dioperasionalkan. Konstitusi dioperasionalkan ke dalam undang-undang (UU).

Kadang-kadang undang-undang itu masih juga belum operasional karena itu ia masih harus dioperasionalkan. Undang-undang dioperasionalkan dalam peraturan pemerintah (PP). Peraturan pemerintah pun kadang-kadang masih harus dioperasionalkan ke dalam surat keputusan menteri (SKM). Keputusan menteri itu pun kadang-kadang masih harus dioperasionalkan. Keputusan menteri dioperasionalkan ke dalam petunjuk teknis (yang sering disebut petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) atau petunjuk teknis (JUKNIS), standar operasional prosedur (SOP). Nah, petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan atau standar operasional prosedur inilah yang terakhir yang pasti operasional. Sebenarnya perjalanan suatu negara pada akhirnya dioperasikan oleh petunjuk teknis atau petunjuk operasional atau standar operasional prosedur tersebut.

Urutan operasional dari filsafat negara sampai petunjuk teknis itu dapat digambarkan sebagai berikut. Teori di atas bila diterapkan di Indonesia akan kelihatan sebagai berikut.

²⁹Ahmad Tafsir, *Filsafat Pendidikan Islami: Integrasi Jasmani, Rohani dan Kalbu Memanusiakan Manusia*. Bandung: Remaja Rosdakarya, cet. ke-1, 2006), h.70-74

Tahap 1: Tentukan filsafat negara Indonesia. Ini sudah ditentukan yaitu Pancasila.

Tahap 2: Turunkan nilai-nilai Pancasila itu ke dalam undang-undang dasar (UUD). Ini sudah dilakukan. Kita sudah memiliki undang-undang dasar yang disebut UUD 1945.

Tahap 3: Turunkan UUD itu ke dalam UU. Ini sudah dilakukan sebagian. Jumlahnya banyak sekali antara lain undang-undang tentang pendidikan Indonesia yaitu UU No.2/1989 kemudian diganti dengan UU No.20/2003.

Tahap 4: Turunkan setiap UU itu ke dalam peraturan pemerintah (PP). Ini juga sudah dilakukan sebagian.

Tahap 5 : Turunkan (agar lebih operasional) PP itu ke dalam SKM (Surat Keputusan Menteri).

Tahap 6: Turunkan (bila perlu) SKM itu ke dalam petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) yang sering juga disebut JUKNIS (petunjuk teknis).

Jika urutan ini diikuti secara konsekuen, esensi Filsafat Negara benar-benar turun ke UUD; esensi UUD benar-benar turun ke UU, esensi UU sungguh-sungguh turun ke PP; isi PP benar-benar turun ke SKM; selanjutnya SKM betul-betul turun ke JUKLAK, maka operasi negara akan berjalan lancar menuju tujuan negara itu seperti dikehendaki filsafat negara tersebut. Jika kita perhatikan bagaimana Pancasila turun ke UUD, ternyata UUD harus disempurnakan agar sesuai benar dengan maksud Pancasila, ini sudah dilakukan dalam periode reformasi. Apakah penyempurnaan UUD itu terserah kehendak politisi? Sebetulnya tidak. Bila semua isi Pancasila sudah benar-benar turun ke UUD, maka

penyempurnaan (istilahnya: amademen) tidak diperlukan lagi. UUD itu harus turun ke UU, dan begitu seterusnya³⁰.

Dalam hal menurunkan nilai Pancasila (khusus untuk Indonesia) ke UUD dan seterusnya sampai JUKLAK, ada satu hal yang sangat-sangat penting diperhatikan. Yang harus diperhatikan sekali itu ialah *core* Pancasila. Lihatlah gambar Pancasila, di situ terbaca bahwa *core* Pancasila ialah sila pertama yang berisi ajaran bahwa (1) warga negara Indonesia harus beragama, (2) operasi negara harus sesuai dengan ajaran agama.

C. Ideologi dan Landasan Pemerintahan Negara Republik Indonesia

Pendahuluan

Sejarah negara bangsa Indonesia sejak merdeka 17 Agustus 1945 sampai hari ini dipenuhi oleh berbagai pergolakan, bahkan pemberontak dan konflik terbuka yang sering mengancam keutuhan negara bangsa. Maka amanat Pembukaan UUD 1945, yang lakikatnya merupakan “Deklarasi Kemerdekaan”, selama hampir enam puluh tiga tahun nasih jauh terwujud. Salah satu faktor mempengaruhi belum mantapnya penyelenggaraan pemerintahan negara dalam melaksanakan misinya bagaimana tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sukarnya memperoleh konsensus nasional di antara berbagai kekuatan politik untuk berpegang teguh kepada consensus para pendiri bangsa yang dicapai tanggal 18 Agustus 1945, yang antara lain meliputi ideologi negara kebangsaan berdasarkan Pancasila. Akibat keadaan ini

³⁰*Ibid.*

adalah tertinggalnya Indonesia² dari negara-negara tetangga yang kemerdekaannya diperoleh puluhan tahun setelah kita.

Berangkat dari keprihatinan keadaan tersebut, tulisan ini bermaksud secara berturut-turut membahas: (1) makna Pembukaan UUD 1945 sebagai ideologi Negara Kebangsaan Indonesia; (2) kaitan Pembukaan UUD 1945 dengan pasal-pasal UUD 1945; (3) implikasi ideologi negara dan UUD 1945 terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara; dan (4) beberapa catatan penutup.

Makna Pembukaan UUD 1945 sebagai Ideologi Negara kebangsaan Indonesia²

Hampir tidak ada negara di dunia yang pembukaan UUD-nya penuh dengan nuansa² dan semangat kebangsaan seperti Pembukaan UUD 1945: “Kemerdekaan adalah hak segala bangsa”, alenia ketiga yang menyatakan “supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas”; dan alenia keempat menyatakan: (a) untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (b) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (c) ... disusunlah kemerdekaan Indonesia itu...”. Membaca secara cermat Pembukaan UUD 1945 jelaslah bahwa para pendiri Republik berjuang bagi tegaknya Negara Kemerdekaan Indonesia di bumi Nusantara.

Pertanyaannya: “Mengapa para pendiri Republik memilih wujud negara kebangsaan, bukanlah lainnya?” Untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu mengetahui latar belakang sejarah Indonesia² yang pernah berjaya dari abad ke-8 sampai abad ke-11 pada periode imperium Sriwijaya, yang meliputi seluruh Nusantara bahkan sampai ke Thailand Selatan. Lalu dari abad ke-13 sampai ke-15

dalam imperium Majapahit yang meliputi seluruh Nusantara bahkan sampai ke Filipina, kemudian menjadi puluhan kerajaan kecil. Di Jawa saja ada tiga- Mataram, Banten, Cirebon- di Sumatera lebih banyak lagi, demikian pula di Kalimantan, Sulawesi dan lainnya. Kerajaan-kerajaan kecil ini kemudian yang satu per satu dikuasai oleh pendatang dari Barat (Portugis, Belanda, dan Inggris) dan akhirnya pada dekade pertama abad ke-20 di bawah kekuasaan penjajah sepenuhnya.

Berdasarkan pengalaman sejarah ini, ditambah pengalaman gerakan negara kebangsaan di Eropa mulai abad ke-18, para pendiri Republik memilih negara kebangsaan. Kiranya perlu diketahui bahwa negara-negara Eropa setelah runtuhnya imperium Romawi menjadi negara-negara kecil yang kemudian dijajah oleh Islam, Otonom Turki, dan Jengis Khan. Dengan gerakan negara kebangsaan yang dipelopori King Arthur di Britania Raya, Napoleon Bonaparte Perancis, Otto von Bismark Jerman, dan Garibaldi Italia, berbagai kerajaan kecil di negara-negara tersebut bersatu menjadi Britania Raya, Negara Bangsa Perancis, Negara Bangsa Jerman, Negara Bangsa Italia, dan seterusnya. Sejak itu mereka dapat kokoh berdiri dan berdaulat bahkan bertambah maju.

Tampaknya terilhami oleh Otto von Bismark, Garibaldi- tokoh-tokoh gerakan negara kebangsaan di Eropa- dan Dr. Sun Yat Sen di Asia, para pendiri Republik bertekad menjadi penghuni Nusantara bebas dari penjajah; dan menetapkan Indonesia yang merdeka sebagai negara kebangsaan. Dalam pada itu mereka sadar bahwa kondisi masyarakat Nusantara pada 1945 jauh tertinggal dari negara-negara lain.

Karena itu, dalam menyusun deklarasi kemerdekaan, yang kemudian menjadi Pembukaan UUD 1945, pendiri Republik menetapkan empat misi penyelenggaraan pemerintah Negara Republik Indonesia. Seperti telah dikutip di bagian awal tulisan, pertanyaannya adalah “mengapa para pendiri Republik menetapkan empat misi bagi penyelenggaraan pemerintah negara Republik Indonesia ini dalam membangun Negara Bangsa Indonesia?”

Tulisan ini mencoba menganalisis latar belakang ditetapkannya empat misi tersebut. Analisis ini kiranya perlu dilakukan, karena setelah para pendiri Republik meninggalkan gelanggang penyelenggara pemerintahan, empat misi tersebut, meskipun tetap dipertahankan dan sering menjadi materi retorika, tampaknya tidak dijadikan rujukan utama dalam praktik politik dan penyelenggaraan negara. Padahal misi dan landasannya adalah Pancasila, yang hakikatnya adalah upaya mewujudkan jati diri bangsa. Tampaknya para elit politik tidak begitu peduli dengan empat misi tersebut, karena dalam UUD kita tidak ada satu kalimat pun yang secara eksplisit menyatakan “sanksi” apalagi suatu pemerintahan mengabaikan atau melanggar ketentuan Pembukaan UUD 1945, bahkan yang tertulis dalam pasal-pasal UUD 1945. Berbeda dengan Amerika Serikat (AS) yang secara tegas menyatakan bahwa apabila suatu pemerintahan menghalangi terwujudnya amanat Deklarasi Kemerdekaan AS, maka rakyat berhak menggantikannya:

“... That, to secure these rights, the Government are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed; that whenever any form of government destructive of these ends. It is the right of the

people to alter or to abolish it, and to institute a new government."

Karena tegasnya kalimat dalam Deklarasi Kemerdekaan AS, pemerintah AS tidak ada yang berani mengabaikan ketentuan UUD-nya, kalau perlu dengan kekuatan senjata (misalnya Perang Saudara 1862-1865). Bagaimana dengan Indonesia? Walaupun jelas-jelas mengabaikan dan tidak melaksanakan ketentuan yang tertulis dalam UUD 1945, tidak ada konsekuensi apapun, dan tidak ada kekuatan politik yang mengingatkannya.

Selanjutnya marilah kita coba menganalisis satu persatu misi penyelenggaraan pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana tertulis dalam pembukaan UUD 1945:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Misi ini hakikatnya berangkat dari konsepsi geopolitik yang dijadikan landasan oleh Bung Karno dalam pidato 1 juni 1945 untuk mengusulkan didirikannya negara kebangsaan. Penulis baru menyadari makna geopolitik bagi Indonesia berupa negara kepulauan setelah membandingkannya dengan AS dan China.

Pada 1803 Presiden AS Thomas Jefferson hampir jatuh karena ekonomi negaranya berantakan setelah membeli Louisiana dari Napoleon Bonaparte. Tetapi di depan kongres Thomas Jefferson menyatakan bahwa masa depan keamanan AS dan generasi mendatang bergantung kepada siapa yang menguasai Louisiana. Akhirnya Kongres menerima kebijakan Thomas Jefferson dan ia terpilih kembali menjadi presiden AS untuk

kedua kalinya. Selanjutnya, pada 1870, AS membeli Alaska dan pada akhir abad ke-19 menguasai Havana. Kesemuanya merupakan strategi geopolitik demi keamanan dan keutuhan AS. Demikian pula dengan China yang berusaha keras menguasai dan mempertahankan Tibet sebagai bagian dari China yang berbatasan dengan India, memasukkan kembali Hongkong dan Makao ke dalam wilayah China, dan terus berupaya memasukkan kembali Taiwan. Demikian pula dengan Inggris terhadap Irlandia Utara dan India dengan Kasmir. Kesemuanya didasarkan pada pertimbangan geopolitik.

Mempelajari strategi geopolitik negara-negara kebangsaan tersebut, penulis dapat memahami upaya Presiden Soekarno memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia dengan perjuangan Trikora dan kekecewaan beliau dengan kegagalan Dwikora dan lepasnya Kalimantan Utara untuk kemudian menjadi bagian Malaysia. Kalimantan Utara tidak pernah satu kesatuan dengan Semenanjung Malaya, bahkan sebaliknya, pada zaman Iskandar Muda, Johor adalah bagian dari Aceh. Maka penulis dapat memahami mengapa Presiden Soeharto memasukkan Timor Timur ke dalam wilayah Republik Indonesia. Kedua presiden Republik Indonesia tersebut berangkat dari strategi geopolitik demi keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), berupaya agar Kepulauan Nusantara secara utuh merupakan satu wilayah kedaulatan NKRI. Disayangkan bahwa pemahaman tentang

upaya mewujudkan jati diri bangsa yang bersumber pada amanat Pembukaan UUD 1945 sebagai Ideologi negara diabaikan. Lepasnya Timor-Timur, lepasnya Sipadan dan Legitan, dan diterornya Ambalat tanpa ada balasan yang setimpal pada hakikatnya merupakan pengingkaran terhadap misi pertama penyelenggaraan pemerintah Negara Republik Indonesia, yaitu "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia".

Atas dasar itu, kuatnya Angkatan Bersenjata dan segala potensi pertahanan nasional yang mampu melindungi segenap tumpah² darah Indonesia adalah demi kepentingan seluruh bangsa. Karena itu sangat disayangkan bahwa dana untuk menunjang upaya tersebut sangat terbatas. Ironisnya, saat ini Angkatan Udara Malaysia menjadi yang terkuat di Asia, padahal pada 1960-an Angkatan Bersenjata Indonesia adalah yang²³ terkuat di Asia Tenggara. Angkatan Bersenjata RI tidak diberi dukungan untuk menjadi yang terbaik, paling tidak di Asia Tenggara, atau seharusnya hanya di bawah China atau India.

² 2. Memajukan kesejahteraan umum

Para pendiri Republik sadar saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, kehidupan sebagian besar rakyat Indonesia masih sangat memprihatinkan dalam segala hal. Selama penjajahan mayoritas rakyat Indonesia adalah kuli berbagai perusahaan asing dan perusahaan milik kaum penjajah. Karena itu, UUD 1945 Pasal 33 dan Pasal 34 secara khusus dirancang agar

pembangunan ekonomi nasional ditunjukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, atau dalam Pembukaan UUD 1945 tertulis “terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Bila cita-cita ini terwujud, rakyat akan bertanya untuk apa kita merdeka atau muncul pertanyaan apa makna hidup sebagai satu bangsa. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan bangsa terdidik yang menguasai Iptek. Karena itu, para pendiri republik sadar bahwa hanya bangsa yang cerdas yang dapat meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Untuk itu misi ketiga penyelenggaraan negara adalah:

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa

Seiring orang memakai amanat “mencerdaskan kehidupan bangsa³¹” sama dengan memperluas kesempatan memperoleh pendidikan, apapun mutu pendidikannya. Karena itu, kesempatan memperoleh pendidikan diperluas. Namun kenyataannya, walaupun kesempatan memperoleh pendidikan pada tingkat SD sudah di atas 96 persen dan SMP 70 persen, serta perguruan tinggi di atas 10 persen, kehidupan bangsa yang cerdas belum atau masih jauh dari terwujud. Hal ini disebabkan karena lembaga pendidikan kita dari SD sampai perguruan tinggi hanyalah berupa gedung sekolah tanpa peralatan, tanpa buku, tanpa lapangan olah raga, dan dengan guru yang kurang

³¹Kata Mencerdaskan bangsa adalah fokus Pendidikan kita seharusnya. Soedijarto, *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*, (Jakarta: Kompas, 2008), h. 26

2

terjamin kesejahteraannya. Penelitian Unesco pada 1996 menemukan bahwa mutu pendidikan semacam ini, yang pada umumnya terdapat di negara berkembang, bukan hanya tidak bermakna bagi pencerdasan kehidupan bangsa, melainkan juga akan melahirkan masalah baru bagi bangsa tersebut.

Penulis berpandangan, tanpa memahami latar belakang sejarah Indonesia dan perkembangan² sejarah peradapan sejak Renaissance, kita akan sukar memahami pesan yang terkandung dalam kalimat “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pada saat dunia Barat sejak abad ke-17, melalui Renaissance dan industrialisasi, mendorong lahirnya negara-negara kebangsaan, dan pada pertengahan abad ke-20-setelah melalui dua perang dunia- peradapan dunia didominasi oleh nilai-nilai Barat baik politik, ekonomi, dan Iptek, yang kemudian menjadi nilai-nilai peradapan modern, Indonesia sebaliknya sejak abad ke-17 secara bertahap berada di bawah kekuasaan penjajah dan mulai permulaan abad ke-20 sepenuhnya di bawah kekuasaan penjajah. Secara kultural penghuni Nusantara tetap berada dalam kehidupan tradisional² dan tidak tersentuh oleh peradapan modern yang rasional, demokratis, dan berorientasi kepada Iptek.

Semangat “Ada hari ada nasi”, “Kalau takut dilimbur pasang jangan berumah di tepi pantai” dan “Ana bapang den simpangi (kalau ada hambatan/masalah dihindari)”, harus berubah menjadi “Rawe-rawe rantas, malang-malang

putung” atau dalam bahasa Toynbee: “*A problem is a challenge, and a challenge is chance for progress*”. Mengubah sikap hidup dari tradisional, irrasional, feodalistik, dan menerima nasib, menjadi manusia yang percaya diri dalam menghadapi tantangan memerlukan transformasi budaya, atau dalam bahasa Bung Karno “*our revolution is a summing up of many revolution in one generation*”, suatu perubahan yang meliputi berbagai dimensi kehidupan baik politik, ekonomi, sosial budaya, dan Iptek.

Dalam kaitan ini, semua negara yang kemudian menjadi negara maju seperti AS, Jerman, Jepang, kemudian disusul oleh Taiwan, Korea Selatan, Malaysia, dan China adalah negara-negara yang memulai pembangunannya dengan mendudukkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama. Karena itu, para pendiri Republik yang juga cendekiawan terpelajar menetapkan kewajiban pemerintah untuk “mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional” atau sistem persekolahan, dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia (Pasal 31 dan Pasal 32 UUD 1945 sebelum diamandemen). Disayangkan bahwa lebih dari enam puluh tiga tahun setelah UUD 1945 disahkan oleh para pendiri Republik, amanat yang mewajibkan pemerintah menyelenggarakan dan mengusahakan satu sistem pengajaran nasional dan memajukan kebudayaan nasional, terutama setelah langsung para pendiri Republik dari gelanggang penyelenggaraan pemerintah negara, diabaikan. Padahal melalui perubahan keempat UUD 1945

pada 10 Agustus 2002, amanat tersebut dipertegas dan diperluas, yaitu dengan menekankan: (1) kewajiban pemerintah membiayai penyelenggaraan wajib belajar; (2) kewajiban pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD; dan (3) kewajiban pemerintah untuk memajukan Iptek. Para pendiri Republik yakin bahwa hanya melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui terselenggaranya satu sistem persekolahan nasional yang relevan dan bermutu upaya memajukan kesejahteraan umum dapat terlaksana, sehingga dengan sendirinya misi pertama lebih mudah terlaksana². Apa kaitannya misi pertama sampai ketiga dengan misi keempat, yakni "ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, keadilan sosial dan perdamaian abadi"? Berikut analisisnya.

4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, keadilan sosial, dan perdamaian abadi.

Sejarah dunia menunjukkan, dalam pergaulan antar negara, hanya bangsa yang kokoh, bersatu, maju, dan demokratis yang secara bermartabat dapat aktif dan diperhitungkan dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, keadilan sosial, dan perdamaian abadi. Di abad ke-21 ini, badan-badan dunia di berbagai bidang seperti PBB (politik dan HAM), WHO (kesehatan), Unesco (pendidikan, Ilmu pengetahuan, dan kebudayaan), WTO (perdagangan), IMF (keuangan), Bank Dunia (pembangunan), dan lainnya, dikuasai oleh

negara bangsa yang kokoh, yang maju baik di bidang ekonomi maupun Iptek.

Karena itu, dalam pandangan penulis, tercapainya misi pertama sampai ketiga akan menentukan seberapa jauh misi keempat dapat dilaksanakan secara merata dan ampuh. Dalam kondisi bangsa yang secara internal sering dilanda komplik kepentingan antargolongan, yang secara ekonomi jauh dari maju dan dari segi Iptek sangat bergantung pada dunia luar, akan sukar bagi Indonesia diperhitungkan² dalam percaturan internasional, termasuk dalam menyelesaikan masalah dalam negerinya sendiri. Karena itu, sebelum ketiga misi utama terwujud, sukar berharap Indonesia dapat melaksanakan misi keempat secara bermartabat.

Sayangnya, sejak Indonesia merdeka, empat misi tersebut tidak selalu dijadikan ukuran keberhasilan, bahkan Presiden Soekarno digoyang dan akhirnya jatuh karena berusaha keras melaksanakan misi pertama, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan Dwikora-nya. Dalam perhitungan geopolitik Bung Karno, utuhnya Nusantara adalah demi kepentingan seluruh bangsa.

Dalam mencapai tujuan terwujudnya kehidupan Negara Bangsa Indonesia yang karakteristiknya tertulis dalam empat misi tersebut, pemerintah Negara Bangsa Indonesia² harus melandaskannya pada nilai-nilai Pancasila. Dalam pandangan penulis, ideologi negara menurut Pembukaan UUD 1945 adalah negara kebangsaan

yang maju, demokratis, berkesejahteraan sosial, dan bermartabat dalam pergaulan internasional berdasarkan Pancasila. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah makna ideologi Negara ini pada pasal-pasal UUD 1945?

Kaitan Ideologi Negara dalam Pembukaan UUD 1945 dengan Pasal-pasal 1945

Dalam melaksanakan amanat reformasi, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hasil pemilu 1999 yang sangat demokratis, ditambah utusan golongan serta utusan daerah yang dipilih oleh Ormas dan DPRD- sejalan dengan pesan Bung Karno dan hak konstitusional seperti tertulis dalam Pasal 37 Ayat (1) UUD 1945 untuk melakukan amendemen terhadap UUD 1945- sepakat tidak mengubah Pembukaan UUD 1945. Kesepakatan ini penulis pandang sebagai keputusan yang sangat mulia, karena berarti ideologi Negara Republik Indonesia, yaitu negara kebangsaan yang maju, demokratis, serta berkesejahteraan dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila, didukung oleh seluruh kekuatan politik dan wajib dijadikan pegangan dan dilaksanakan oleh pemerintah Negara Republik Indonesia yang memperoleh mandat dari rakyat. Berdasarkan ideologi negara itulah penyelenggaraan pemerintahan negara dan tingkah laku partai serta para elitnya seharusnya dinilai.

Agar ideologi negara yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 dapat dijadikan landasan penyelenggaraan negara, dan sekaligus dapat dijadikan alat ukur untuk menilai penyelenggaraan pemerintahan negara, maka ideologi tersebut harus diterjemahkan dalam pasal-pasal UUD 1945. Dengan kata lain, pasal-pasal

dalam UUD 1945 merupakan landasan strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sejak UUD 1945 mengalami serangkaian perubahan pada 1999 sampai 2002, ada pihak yang mempertanyakan seberapa jauh ketentuan dalam UUD 1945 benar-benar merupakan terjemahan yang taat asas atas ideologi negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945?

Lebih dari pada itu, ada pihak yang memandang bahwa UUD 1945 hasil empat kali perubahan tidak sejalan dan tidak sesuai dengan amanat proklamasi. Dalam pemahaman penulis, lebih penting bagi kita untuk mempertanyakan pelaksanaan empat misi penyelenggaraan pemerintahan negara sebagaimana telah dibahas melalui pasal-pasal dalam UUD 1945.

Pertanyaan-pertanyaan itu adalah: (1) seberapa jauh berbagai pasal dalam UUD 1945, termasuk hasil perubahan, menghambat terwujudnya usaha melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia?; (2) seberapa jauh berbagai pasal dalam UUD 1945, termasuk hasil perubahan, menghambat terwujudnya upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umum?; (3) seberapa jauh berbagai pasal dalam UUD 1945, termasuk hasil perubahan, menghambat terwujudnya upaya mencerdaskan kehidupan bangsa?; dan (4) seberapa jauh pasal-pasal dalam UUD 1945, termasuk hasil perubahan, menghambat atau menghalangi upaya untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial? Keempat pertanyaan inilah yang seharusnya dijadikan kriteria untuk menilai seberapa jauh pasal-pasal dalam UUD 1945 dapat dijadikan landasan

strategis bagi penyelenggaraan negara guna mewujudkan empat misi tersebut.

Sejak disahkan pada 18 Agustus 1945, UUD 1945 mengalami empat periode pelaksanaan: (1) periode 1945-1949; (2) periode Demokrasi Terpimpin 1959-1966/67; (3) periode Orde Baru 1966/67-1998; dan (4) periode 1998-sekarang. Hampir lima puluh tahun UUD 1945 dijadikan landasan hukum formal berlandaskan UUD 1945 yang murni. Secara jujur harus kita akui bahwa sebagian besar misi tersebut, terutama yang menyangkut memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, belum terwujud. Ada satu priode, yaitu dalam kepemimpinan Presiden Soekarno, yang berhasil melaksanakan misi pertama “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” melalui penumpasan pemberontakan bersenjata dan pengembalian Irian Barat ke wilayah RI. Sedangkan periode selanjutnya hampir tidak tampak hasilnya. Pertanyaannya adalah “apa yang salah?”, “apakah karena pasal-pasal UUD 1945-nya” atau “karena diabaikannya pasal-pasal dalam UUD 1945?”

Serangkaian perubahan terhadap pasal-pasal UUD 1945 tampaknya dimaksudkan untuk memperjelas, melengkapi, mengubah, dan menambah UUD tersebut demi menjadi UUD 1945-sejalan dengan amanat Bung Karno tanggal 18 Agustus 1945- dapat benar-benar dijadikan landasan strategis bagi bagi penyelenggaraan pemerintahan negara guna mewujudkan empat misi yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945.

Pertanyaan kemudian: “Apakah sebelum dilakukan amademen pasal-pasal UUD 1945 belum efektif

Untuk dijadikan landasan strategis bagi pencapaian misi penyelenggaraan pemerintahan negara sebagaimana digariskan oleh Pembukaan UUD 1945?” Penulis tidak bermaksud menjawab pertanyaan tersebut secara langsung. Namun sejarah menunjukkan betapa dalam era politik menggunakan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional (demokrasi Terpimpin dan Orde Baru), keduanya berakhir dengan tragedi nasional dan munculnya krisis multidimensi.

Kenyatan sejarah ini perlu dijadikan bahan refleksi tentang apa yang salah. Yang jelas, beberapa pasal dalam UUD 1945 sebelum diamendemenkan menjadikan penyelenggara negara dapat melaksanakan kebijakan yang hakikatnya bertentangan dengan jelas UUD 1945 itu sendiri. Tentang DPR, misalnya, Pasal 19 Ayat (1) tertulis “Susunan DPR ditetapkan dengan Undang-undang”. Ketentuan ini tidak mengatur siapa yang dapat menjadi anggota DPR dan bagaimana anggota DPR dipilih. Jadi, kalau selama dua era tersebut anggota DPR tidak semuanya dipilih rakyat, bahkan yang dipilih pun disaring dahulu oleh penguasa, tidak lain adalah karena tidak ada ketentuan yang jelas. Ketentuan yang tidak jelas itu kemudian ditafsirkan oleh presiden, karena dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 presiden pun memegang kekuasaan membentuk undang-undang (UU) dengan persetujuan DPR.

Ketentuan lain yang pelaksanaannya bertentangan dengan jiwa UUD 1945 adalah Pasal 31 Ayat (2): “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-undang”, dan Pasal 34: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Sebagai negara

kesejahteraan, sebagaimana tertulis dalam Pembukaan UUD 1945, ketentuan pasal ini seharusnya dimaknai bahwa pemerintah sepenuhnya membiayai penyelenggaraan pendidikan nasional seperti semua negara demokrasi di dunia, terutama pendidikan yang wajib, serta menjamin kesejahteraan anak-anak terlantar dan fakir miskin. Namun karena ketentuan itu ditafsirkan secara bebas oleh pemerintah, sejak Orde Baru lahir ketentuan tentang SPP yang mewajibkan orang tua membayar uang sekolah bagi anak-anaknya, termasuk pendidikan yang sifatnya wajib seperti SD dan SMP. Fakir miskin serta anak terlantar juga kurang diurus.

Karena itu, ketiga pasal tersebut dan pasal-pasal yang lain diamandemenkan dengan maksud agar penyelenggara negara tidak terlalu merdeka menafsirkannya sehingga dapat menyimpang dan bahkan bertentangan dengan semangat dan jiwa UUD 1945.

Seberapa jauh berbagai pasal yang telah benar-benar diupayakan pelaksanaannya oleh penyelenggara negara, bagian berikut mencoba menganalisisnya.

Implikasi Ideologi Negara dan UUD 1945 terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

Sejak dikenalnya UUD dalam sistem pemerintahan negara demokrasi modern yakni sejak abad ke-18-UUD merupakan pedoman bagi penyelenggara pemerintahan negara yang dipercaya oleh rakyat. Demokrasi adalah suatu sistem penyelenggaraan negara di mana segala kebijakan pemerintahan didasarkan pada persetujuan yang diperintah (*the consent of the governed*). Dalam hal ini UUD adalah wujud kesepakatan dari yang diperintah.

UUD 1945, seperti halnya UUD AS, disusun oleh para pendiri Republik demi kepentingan rakyat Indonesia. Karena itu, setiap Presiden Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan pasal 9 UUD 1945, wajib bersumpah untuk memegang teguh UUD, di samping bersumpah untuk menjalankan UU dan peraturannya selurus-lurusnya.

Seberapa jauh pasal-pasal dalam UUD 1945 selama ini dijadikan landasan kebijakan penyelenggaraan negara? Dalam pengamatan penulis, sampai 1998 penyelenggaraan pemerintahan negara tidak ada yang sepenuhnya melaksanakan UUD 1945. Masing-masing pemerintahan punya tafsiran sendiri-sendiri sesuai problem yang dihadapi.

Dalam era perang kemerdekaan, karena sasaran utama perjuangan nasional adalah mempertahankan kemerdekaan dan memperoleh pengakuan internasional atas kemerdekaan kita, lewat Maklumat X November 1945 berbagai ketentuan dalam UUD 1945 diabaikan. Dalam era Demokrasi Terpimpin, karena yang menjadi sasaran utama adalah mempertahankan keutuhan seluruh Nusantara sebagai wilayah kedaulatan Negara Kesatuan RI, Presiden Soekarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi sering melakukan tindakan yang hakikatnya bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan demokrasi. Contohnya adalah pembubaran DPR hasil pemilu tanpa diikuti dengan pemilu untuk mengganti DPR yang dibubarkan, selain mengangkat pimpinan MPR dan DPR sebagai anggota kabinet. Dalam era Orde Baru, dengan dalih keamanan nasional dari subversi kaum komunis dan lainnya, pemerintah juga mengganti anggota DPR yang tidak sejalan dengan penguasa, di samping tidak memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia

yang dipandang berideologi komunis serta ideologi lain yang tidak sejalan dengan kebijakan penguasa. Ini bertentangan dengan amanat Psal 27 Ayat (1). Diangkatnya “Surat Perintah 11 Maret” dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto menjadi Tap MPR RI, yang berujung dicabutnya pemberi perintah sebagai Presiden RI, merupakan indikasi tidak jelasnya berbagai ketentuan dalam UUD 1945 sebelum amandemen. Kesemuanya itu dimungkinkan karena berbagai pasal dalam UUD 1945 sebelum amandemen membuka kemungkinan seorang presiden, yang mendataris MPR, melakukan segala tindakan yang dipandang perlu demi “kepentingan negara”.

Serangkaian amandemen/perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR RI periode 1999-2004 hakikatnya bertujuan untuk meniadakan ekses terlalu berkuasanya presiden selaku mandataris MPR. Dalam periode Demokrasi Terpimpin, ekses itu berujung pada tragedi nasional 1 Oktober 1965 dengan segala epilognya, dan dalam era Orde Baru berujung pada krisis multidimensi pada 1998 dan mundurnya Presiden Soeharto.

Pertanyaan berikutnya adalah: “Seberapa jauh pasal-pasal UUD 1945 yang telah empat kali diamandemen secara konsisten dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintah RI?” Dalam pengamatan penulis, para penyelenggara pemerintahan negara (presiden dan DPR) dalam era Reformasi, di satu sisi, sangat *at all costs* dalam melaksanakan berbagai ketentuan yang menyangkut politik dan hukum, seperti: (1) pemilihan presiden secara langsung; (2) pelebagaan Dewan Perwakilan Daerah; (3) pelebagaan Mahkamah

Konstitusi; (4) pelebagaan Komisi Yudisial; dan (5) peniadaan Dewan Pertimbangan Agung yang diganti dengan Dewan Pertimbangan Presiden; serta (6) pelaksanaan otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Di sisi lain, mereka mengabaikan berbagai ketentuan dalam UUD 1945 yang terkait dengan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Berbagai contoh pengabaian yang cukup transparan itu adalah ketentuan-ketentuan dalam Pasal 31 dan Pasal 34 UUD 1945. Pasal 31 UUD 1945 berkaitan dengan pendidikan, yang semula hanya terdiri atas dua pasal, yaitu:

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan;
- (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang diatur dengan Undang-undang; sejak amandemen ke-4 tahun 2002 menjadi lima ayat yaitu:
 - (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan;
 - (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah wajib membiayainya;
 - (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari

anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional;

- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk membangun peradapan serta kesejahteraan umat manusia.

Segala ketentuan Pasal 31 itu, yang hakikatnya dimaksudkan agar misi “mencerdaskan kehidupan bangsa” dapat tercapai, melalui UU No. 20 Tahun 2003 dipertegas lagi. Misalnya Ayat (1) dipertegas dalam Pasal 5 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi: “Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu”. Contoh lain, tentang wajib belajar sebagaimana tertulis dalam ayat (2) misalnya, dalam UU No. 20 Tahun 2003 dipertegas bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dan wajib tanpa dipunggut biaya. Dan anggaran pendidikan, UU No. 20 Tahun 2003 mempertegasnya dengan kata-kata “tidak termasuk gaji guru dan penyelenggaraan pendidikan kedisiplinan”.

Yang terjadi sekarang, ketentuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa diabaikan, bahkan dalam banyak hal dilanggar, seperti membiarkan lulusan SD masuk SMP negeri disaring, padahal wajib. Dibiarkannya perguruan tinggi negeri melanggar asas demokrasi pendidikan dengan menetapkan tarif masuk amat tinggi. Yang menarik lagi adalah kenyataan bahwa walaupun dalam UUD 1945 masalah pendidikan diatur dalam satu bab tersendiri, yaitu Bab XIII, berbagai rancangan dan praktik penyelenggaraan pemerintah menempatkan

pendidikan hanya sebagai bagian kecil, yaitu bagian dari “kesejahteraan rakyat”. Dan tampaknya jarang dilaksanakan rapat kabinet yang khusus membahas masalah pendidikan.

Contoh lain lagi. Pasal 35 UUD 1945, yang semula hanya satu ayat, melalui amandemen ke-4 UUD 1945 diubah menjadi empat ayat. Dua ayat baru yang sangat maju dilihat dari kaitannya dengan misi memajukan kesejahteraan umum adalah Ayat (2) dan Ayat (3) yang tertulis sebagai berikut:

Ayat (2): Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Ayat (3): Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak.

Ketentuan yang sangat maju dan jelas ini tampaknya bernasib sama dengan ketentuan tentang pendidikan. Dalam pelaksanaan kita menyaksikan belum dikembangkannya sistem jaminan sosial dan sistem pelayanan kesehatan sebagaimana berlangsung di negara-negara kesejahteraan di Eropa dan lainnya.

Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34, yang hakikatnya merupakan Pasal-pasal yang secara langsung dirancang sebagai ciri ideologi Negara Bangsa Indonesia, yaitu negara bangsa yang berkesejahteraan, tidak/belum perhatian penyelenggaraan negara-pemerintah maupun DPR- bahkan para elit politik pecah karena mempersoalkan terlaksana tidaknya suatu ketentuan yang tertulis dalam UUD 1945 dan UU organik sebagai aturan pelaksanaannya.

Tampaknya bukan hanya berbagai ketentuan yang terkait dengan misi mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum yang belum mendapat perhatian, melainkan juga ketentuan yang terkait dengan “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Untuk itu marilah kita telaah pasal-pasal yang terkait dengan pertahanan negara, yaitu Pasal 30 yang semula hanya terdiri atas dua ayat:

Ayat (1): Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha tugas pembelaan negara;

Ayat (2): Syarat-syarat tentang pembelaan negara diatur dengan Undang-undang.

Kedua ayat tersebut ditambah tiga ayat lagi, dua di antaranya;

Ayat (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara;

Ayat (4): Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Dari ketentuan yang tertulis dalam ayat (3) dan Ayat (4) tampak betapa keutuhan dan terpeliharanya NKRI serta rasa aman masyarakat akan tergantung kepada TNI dan Polri. Pertanyaannya: “Sudahkah ada usaha yang sungguh-sungguh dari penyelenggaraan negara untuk menjadikan TNI dan Polri di zaman modern ini kuat dan berwibawa dikawasan Asia? Melihat perkembangan kekuatan Angkatan Udara Malaysia, yang sekarang nomor tiga terkuat di Asia, dan kekuatan Angkatan Udara

Singapura, negara tetangga-tetangga yang kecil ukuran wilayah dan penduduknya, kami merasa prihatin dengan kondisi kekuatan kita, baik dari peralatan maupun kesejahteraan prajuritnya. Seharusnya Indonesia bukan hanya tidak boleh kalah dari Malaysia, apalagi Singapura, melainkan harus berada di atas mereka dan boleh di bawah China atau India.

Menurut studi yang dilakukan oleh majalah *The Economist*, India sekarang merupakan satu-satunya negara Asia yang memiliki kapal induk dan 50 peluru kendali nuklir, dengan anggaran belanja pertahanan sekitar 25 miliar dollar AS, hanya di bawah anggaran belanja pertahanan Rusia. Bagaimana dengan Indonesia?

Menurut hemat penulis, dalam era globalisasi ini harga diri suatu bangsa ada pada kekuatan ekonomi dan pertahanannya. Penulis berkeyakinan bahwa Sipadan dan Ligitan tidak akan lepas kalau kekuatan ABRI kita kuat, demikian juga Timor-Timor: Peristiwa Ambalat, pelecehan terhadap nelayan kita di Australia, serta pelecehan terhadap Gubernur Sutiyoso di Australia tidak akan terjadi kalau kita juga memiliki ABRI yang kuat, kokoh, dan modern, yang lebih ampuh daripada Australia dan Malaysia.

Lebih memprihatinkan lagi adalah: walaupun Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa dua APBN (2006 & 2007) yang tidak memenuhi anggaran sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN untuk pendidikan dipandang bertentangan dengan UUD 1945, tidak ada satu kekuatan politik yang memandang hal ini sebagai suatu hal yang “inkonstitusional”.

Pendidikan Nasional Menurut UUD 1945, UU NO. 20 Tahun 2003. Dan Peraturan Pemerintah Lainnya

Sejak kebangkitan nasional tahun 1908, para pemimpin pergerakan kemerdekaan Indonesia dan kemudian para pendiri Reublik tampak amat sadar akan pentingnya pendidikan nasional bagi rakyat bangsa Indonesia. Kalau sebelum kemerdekaan para pemimpin pergerakan menempatkan pendidikan nasional sebagai unsur esensial bagi lahirnya generasi muda yang tinggi kadar rasa kebangsaannya, terutama untuk menghadapi kaum penjajah yang bercokol dan menguasai tanah air Indonesia, maka melalui gerakan kebudayaan dan pendidikan nasional seperti Budi Utomo, Taman Siswa, Muhammadiyah, para pendiri Republik memandang bahwa generasi muda harus memasuki ambang kemerdekaan sebagai bangsa yang cerdas, selain dengan rasa kebangsaan yang kuat.

Kini penyelenggaraan pendidikan nasional, terhitung sejak tahun 1950, telah berjalan selama lima puluh delapan tahun. Seberapa jauh penyelenggaraan pendidikan nasional sejak proklamasi kemerdekaan, terutama setelah Pemerintah Reublik Indonesia dapat menyelenggarakan sistem pendidikan nasional untuk seluruh wilayah Reublik Indonesia, telah selaras dengan amanat Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal dalam UUD 1945? Tulisan ini mencoba menjawab secara ringkas.

Pemerintah Wajib Menyelenggarakan Sistem Pendidikan Nasional

Sejak Orde Baru, dalam pengamatan penulis, tampak berkembang pemahaman bahwa penyelenggaraan

pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sama dengan upaya sekedar memperluas kesempatan belajar tanpa memperhatikan persyaratan minimal yang harus dipenuhi bagi penyelenggaraan pendidikan yang dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional³². Karena itu kita, menemukan beragamnya kualitas dan kondisi sekolah. Ada sekolah yang gurunya hanya seorang untuk SD dan dua orang untuk SMP (di Papua) dengan peserta didik yang tidak memiliki sebuah bukupun. Pada umumnya sekolah dipersepsikan hanya sebagai sebuah bangunan dengan ruang kelas, bangku, papan tulis, tanpa lapangan olah raga, tanpa perpustakaan, tanpa kantin, dan bahkan tanpa buku pelajaran. Sekolah-sekolah seperti inilah yang selama ini dipandang sebagai sekolah yang dipandang berpotensi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan baru menjadi perhatian kalau ada sekolah yang ambruk walaupun usianya baru dua puluh tahun. Persepsi umum seperti inilah yang sukar memahami perlunya anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN. Minimnya fasilitas sekolah, kualitas guru yang demikian rendah, dan tiadanya buku pelajaran serta alat-alat pendidikan lainnya menjadi anggota “Komisi Internasional untuk Pendidikan Abad ke-20 Unesco”, In’am Al Mufti sampai pada kesimpulan: *“In the past two in particular, governments and internasional agencies in the developing world sought the respond to developmental challenges by focusing increasingly on expanding*

³²Bandingkan dengan, Suedjatmoko, dkk, *Mencari Strategi Pengembangan Pendidikan Nasional Menjelang Abad XXI*, (Jakarta: Grasindo, 1991).

educational opportunities. This drive by developing countries was in fulfillment of Unesco's mission to achieve "Education for All". But the expansion in education was concentrated on coping with the growing demand for schooling, while the quality of education itself was not given priority. The result was over-crowded school, outdated teaching methods based on learning by rote and teachers who have become unable to adapt to more modern approaches such as democratic participation in the classroom, co-operative learning and creative problem-solving. These are now obstacles to better education."

Kondisi pendidikan sekolah yang disimpulkan oleh Mufti asal Jordania ini tanpanya mewakili kondisi pendidikan di Indonesia. Karena itu, kalau kita memandang bahwa kondisi sekolah yang demikian adalah kondisi yang normal, maka tanggungjawab konstitusional pemerintah untuk menjadikan penyelenggaraan pendidikan guna mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional tidak akan terlaksana.

Bila Mufti berpandangan bahwa kondisi persekolahan yang demikian merupakan penghalang bagi peningkatan mutu pendidikan, penulis, sejalan dengan amanat pembukaan UUD 1945 dan Pasal 31 dan 32 UUD 1945, berpandangan bahwa kondisi pendidikan yang demikian tidak akan mampu melaksanakan misi mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional, bahkan akan melahirkan masalah baru bagi bangsa itu sendiri.

Pertanyaan secara logis muncul; "Kalau kondisi umum persekolahan kita, yang jauh dari standar, bahkan menurut standar yang ditetapkan oleh PP No. 19 Tahun

2005, dipandang tidak akan mampu mengemban misi mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional, lalu apa makna dan wujud kehidupan bangsa yang cerdas dan maju kebudayaan nasionalnya?" Dengan memahami makna kehidupan bangsa yang cerdas dan memajukan kebudayaan nasionalnya, selanjutnya akan dapat dijawab pertanyaan "wujud terselenggaranya satu sistem pendidikan nasional yang merata, relevan, dan bermutu".

Mengapa para pendiri Republik mendambakan kehidupan bangsa yang cerdas? Tanpanya para pendiri Republik, yang umumnya cendekiawan yang berpendidikan modern, sadar bahwa dibandingkan dengan perkembangan peradapan dunia yang dikuasai Iptek, Indonesia sangat tertinggal. Pada saat proklamasi, kondisi masyarakat bangsa Indonesia pada umumnya adalah tradisional, irrasional, dan feodalistik. Karena itu Indonesia perlu berubah. Dan perubahan itu perlu ditempuh melalui transformasi budaya.

Dalam transformasi budaya dari tradisional ke modern, dan dari feodal ke demokratis, peranan lembaga sekolah sebagai pusat pembudayaan atau sosialisasi berbagai kemampuan, nilai, dan sikap, modern, sangatlah strategis. Dalam kaitan ini seorang antropolog dari Rutgers State University, Yehudi Cohen, berkesimpulan bahwa sekolah merupakan lembaga yang sangat berperan dalam proses pembangunan negara peradaban (civilizational states). Berangkat dari pemahaman tentang makna mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional ini, GBHN 1999 menetapkan agar lembaga pendidikan, terutama sekolah, berfungsi sebagai "pusat pembudayaan".

Kehidupan sekolah sebagai pusat pembudayaan negara yang berada dalam transisi menuju masyarakat yang dicita-citakan sangat mutlak. Pasalnya, pendidikan di luar sekolah, baik dalam keluarga maupun masyarakat pada umumnya belum mengandung nilai-nilai masyarakat yang dicita-citakan, seperti prinsip demokrasi, etos kerja, meritocracy, taat asas dan penegakan hukum, perasaan satu nusa satu bangsa (*sence of national unity*), penghargaan kepada HAM, disiplin sosial dan disiplin nasional serta sikap rasional dan orientasi Iptek dalam memecahkan masalah, belum membudaya.

Negara-negara yang kini menjadi negara maju seperti AS, Britania Raya, Jerman, Perancis, dan Jepang, dan negara-negara yang kini tergolong dalam kelompok NIC (*new industrialist country*), seperti Taiwan, Korea Selatan, dan Malaysia, dan akan disusul dengan China dan India, adalah negara yang sejak permulaan pembangunan negara bangsanya telah menempatkan pendidikan sebagai prioritas. AS sejak Thomas Jefferson pada permulaan abad ke-19, Britania Raya sejak King Arthur, Jepang sejak Meiji.

Dalam membangun negara bangsa, AS sadar akan heterogenitas masyarakatnya, menjadikan sekolah? Universitas sebagai pusat pembudayaan nilai-nilai baru masyarakat bangsa AS, bukan untuk membudayakan nilai-nilai kelompok etnis dan ras seperti Afro-Amerika, Yahudi, Anglo-Saxon, Germania, Latin, Slavia, atau Orient. Untuk itu peserta didik dari SD sampai SMA berada di sekolah dari pukul 7.00 sampai jam 16.00 dalam suasana masyarakat Amerika. Dan mahasiswa tingkat I dan II wajib tinggal di asrama universitas, dan universitas negeri lazimnya menjadi kota tersendiri, yang dalam

bahasa Ckark Kerr sebagai "*city of intellect*". Selain itu, peserta didik dari SD sampai SMP berada di sekolah dari pagi sampai sore, mulai *high school* peserta didik tinggal di asrama. Dalam bahasanya Bapak Daoed Joesoef untuk menjadikan "*Gentlement of Culture*"-nya Inggris.

Dipandang dari pengalaman sejarah negara lain dan latar belakang sejarah Indonesia, praktek penyelenggaraan pendidikan nasional Indonesia masih jauh dari upaya menjadikan sekolah sebagai pusat pembudayaan sebagaimana dituntut oleh GBHN 1999 maupun ketentuan Pasal 4 Ayat (3) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan:

"Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat".

Maka, dengan menyelenggarakan sekolah yang hanya menyediakan kesempatan peserta didik untuk datang ke sekolah untuk mendengar, mencatat, dan menghafal, dan pada akhir jenjang pendidikan diuji penguasaan hafalannya, amanat untuk menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional tidak mungkin dapat terlaksana.

Penyelenggaraan Pendidikan Nasional dari Masa ke Masa

Sejak kemerdekaan sampai sekarang, dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, kita mengenal tiga UU pendidikan, yaitu UU No. 4 Tahun 1950 jo UU No.12 Tahun 1954, UU No 2 Tahun1989 tentang Pendidikan Nasional, dan UU No. 20 Tahun 2003 di samping UU No

20 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi. Dalam hal kurikulum kita mengenal kurikulum: (1) Kurikulum 1950; (2) Kurikulum 1962; (3) Kurikulum 1969; (4) Kurikulum 1975; (5) Kurikulum 1984; (6) Kurikulum 1994; (7) Kurikulum 2004; dan (8) Kurikulum yang akan dikembangkan oleh sekolah (kurikulum model BSNP).

Yang menarik, walaupun selama hampir enam puluh tiga tahun merdeka kita hanya mengenal tiga UU pendidikan, dalam hal kurikulum kita mengenal hampir delapan kurikulum. Sesungguhnya perbedaan antara kurikulum 1950 dan 1962 hanya dalam materi pendidikan politik, yaitu dari tanpa Manipol Usdek menjadi memasukkan Manipol Usdek, dan antara kurikulum 1962 dan 1969 bedanya juga hanya dalam hal materi pendidikan politik dari mengandung Manipol Usdek menjadi tanpa Manipol Usdek dan perubahan jumlah jam pelajaran untuk pendidikan agama.

Dalam hal sistem evaluasi, dalam pengertian ujian akhir untuk menentukan kelulusan seseorang dari program pendidikan satuan pendidikan, kita mengenal: (1) periode ujian negara sampai tahun 1968; (2) periode ujian sekolah dari 1969 sampai 1984; (3) sistem evaluasi belajar tahap akhir nasional (Ebtanas) dari 1985 sampai 2003; dan (4) sistem ujian akhir nasional (UAN) tahun 2004, yang kemudian berubah menjadi ujian nasional (UN).

Tiga kali perubahan UU tentang sistem pendidikan, tujuh kali perubahan kurikulum, dan tiga kali perubahan dalam sistem penentuan kelulusan (ujian akhir) tampaknya tidak berpengaruh pada model pembelajaran dan suasana kependidikan yang memungkinkan sekolah sebagai pusat kebudayaan untuk mencerdaskan

kehidupan bangsa. Pada umumnya suasana dan proses pembelajaran, apapun kurikulumnya.

BAB IV

FILOSOFI PENDIDIKAN DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Filosofi Pendidikan dasar dalam Kurikulum 2013

A. Sekolah Dasar (SD)

Sebelum dijelaskan filosofi dalam kurikulum yang berlaku di Indonesia saat ini yakni kurikulum 2013, maka perlu dipaparkan terlebih dahulu secara lengkap kurikulum tersebut. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 67 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah Kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah

1. Pengertian Kurikulum .

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003³³ tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu³⁴. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum, yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan

³³Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional no 20 Tahun 2003

³⁴Bandingkan dengan Ahmad Tafsir, *Ilmu pendidikan Islami*, Bandung: Remadja Rosdakarya, 2012. Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran: Teori Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*, Jakarta: Kencana, 2008

5

pelajaran, sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Kurikulum 2013 yang diberlakukan mulai tahun ajaran 2013/2014 memenuhi kedua dimensi tersebut.

2. Rasional Pengembangan Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:

a. Tantangan Internal. Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Tantangan internal lainnya terkait dengan perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Saat ini jumlah penduduk Indonesia usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dari usia tidak produktif (anak-anak berusia 0-14 tahun dan orang tua berusia 65 tahun ke atas). Jumlah penduduk usia produktif ini akan mencapai puncaknya pada tahun 2020-2035 pada saat angkanya mencapai 70%. Oleh sebab itu tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana mengupayakan agar sumberdaya manusia usia produktif yang melimpah ini dapat ditransformasikan menjadi sumberdaya

manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan melalui pendidikan agar tidak menjadi beban.

- b. Tantangan Eksternal. Tantangan eksternal antara lain terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Arus globalisasi akan menggeser pola hidup masyarakat dari agraris dan perniagaan tradisional menjadi masyarakat industri dan perdagangan modern seperti dapat terlihat di *World Trade Organization* (WTO), *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) Community, *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC), dan *ASEAN Free Trade Area* (AFTA). Tantangan eksternal juga terkait dengan pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknoains serta mutu, investasi, dan transformasi bidang pendidikan. Keikutsertaan Indonesia di dalam studi *International Trends in International Mathematics and Science Study* (TIMSS) dan *Program for International Student Assessment* (PISA) sejak tahun 1999 juga menunjukkan bahwa capaian anak-anak Indonesia tidak mengembirakan dalam beberapa kali laporan yang dikeluarkan TIMSS dan PISA. Hal ini disebabkan antara lain banyaknya materi uji yang ditanyakan di TIMSS dan PISA tidak terdapat dalam kurikulum Indonesia.

c. Penyempurnaan Pola Pikir. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan penyempurnaan pola pikir sebagai berikut: 1) pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran berpusat pada peserta didik. Peserta didik harus memiliki pilihan-pilihan terhadap materi yang dipelajari untuk memiliki kompetensi yang sama; 2) pola pembelajaran satu arah (interaksi guru-peserta didik) menjadi pembelajaran interaktif (interaktif guru-peserta didik-masyarakat-lingkungan alam, sumber/ media lainnya); 3) pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran secara jejaring (peserta didik dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja yang dapat dihubungi serta diperoleh melalui internet); 4) pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif-mencari (pembelajaran siswa aktif mencari semakin diperkuat dengan model pembelajaran pendekatan sains); 5) pola belajar sendiri menjadi belajar kelompok (berbasis tim); 6) pola pembelajaran alat tunggal menjadi pembelajaran berbasis alat multimedia; 7) pola pembelajaran berbasis massal menjadi kebutuhan pelanggan (*users*) dengan memperkuat pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap peserta didik; 8) pola pembelajaran ilmu pengetahuan tunggal (*monodiscipline*) menjadi pembelajaran ilmu pengetahuan jamak (*multidisciplines*); dan 9)

pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran kritis³⁵.

- d. Penguatan Tata Kelola Kurikulum. Pelaksanaan kurikulum selama ini telah menempatkan kurikulum sebagai daftar matapelajaran. Pendekatan Kurikulum 2013 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah diubah sesuai dengan kurikulum satuan pendidikan. Oleh karena itu dalam Kurikulum 2013 dilakukan penguatan tata kelola sebagai berikut: 1) tata kerja guru yang bersifat individual diubah menjadi tata kerja yang bersifat kolaboratif; 2) penguatan manajemen sekolah melalui penguatan kemampuan manajemen kepala sekolah sebagai pimpinan kependidikan (*educational leader*); dan 3) penguatan sarana dan prasarana untuk kepentingan manajemen dan proses pembelajaran.
- e. Penguatan Materi. Penguatan materi dilakukan dengan cara pendalaman dan perluasan materi yang relevan bagi peserta didik.

B. Karakteristik Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut: 1. mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik; 2. sekolah merupakan bagian dari

³⁵Bandingkan juga Wiana Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 2009).

1

masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana dimana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar; 3. mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat; 4. memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan; 5. kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar matapelajaran; 6. kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi (*organizing elements*) kompetensi dasar, dimana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti; 7. kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat (*reinforced*) dan memperkaya (*enriched*) antar matapelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal).

C. Tujuan Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.

KERANGKA DASAR KURIKULUM

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum menentukan kualitas peserta didik yang akan dicapai kurikulum, sumber dan isi dari kurikulum, proses

pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian hasil belajar, hubungan peserta didik dengan masyarakat dan lingkungan alam di sekitarnya.

Kurikulum 2013 dikembangkan dengan landasan filosofis yang memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik menjadi manusia Indonesia berkualitas yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional.

Pada dasarnya tidak ada satupun filosofi pendidikan yang dapat digunakan secara spesifik untuk pengembangan kurikulum yang dapat menghasilkan manusia yang berkualitas. Berdasarkan hal tersebut, Kurikulum 2013 dikembangkan menggunakan filosofi sebagai berikut.

1. Pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Pandangan ini menjadikan Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan budaya bangsa Indonesia yang beragam, diarahkan untuk membangun kehidupan masa kini, dan untuk membangun dasar bagi kehidupan bangsa yang lebih baik di masa depan. Mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan masa depan selalu menjadi kepedulian kurikulum, hal ini mengandung makna bahwa kurikulum adalah rancangan pendidikan untuk mempersiapkan kehidupan generasi muda bangsa. Dengan demikian, tugas mempersiapkan generasi muda bangsa menjadi tugas utama suatu kurikulum. Untuk mempersiapkan kehidupan masa kini dan masa depan peserta didik, Kurikulum 2013 mengembangkan pengalaman belajar yang memberikan kesempatan luas bagi peserta didik untuk

menguasai kompetensi yang diperlukan bagi kehidupan di masa kini dan masa depan, dan pada waktu bersamaan tetap mengembangkan kemampuan mereka sebagai pewaris budaya bangsa dan orang yang peduli terhadap permasalahan masyarakat dan bangsa masa kini.

2. Peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. Menurut pandangan filosofi ini, prestasi bangsa di berbagai bidang kehidupan di masa lampau adalah sesuatu yang harus termuat dalam isi kurikulum untuk dipelajari peserta didik. Proses pendidikan adalah suatu proses yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya menjadi kemampuan berpikir rasional dan kecemerlangan akademik dengan memberikan makna terhadap apa yang dilihat, didengar, dibaca, dipelajari dari warisan budaya berdasarkan makna yang ditentukan oleh lensa budayanya dan sesuai dengan tingkat kematangan psikologis serta kematangan fisik peserta didik. Selain mengembangkan kemampuan berpikir rasional dan cemerlang dalam akademik. Kurikulum 2013 memposisikan keunggulan budaya tersebut dipelajari untuk menimbulkan rasa bangga, diaplikasikan dan dimanifestasikan dalam kehidupan pribadi, dalam interaksi sosial di masyarakat sekitarnya, dan dalam kehidupan berbangsa masa kini.
3. Pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan kecemerlangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu. Filosofi ini menentukan bahwa isi kurikulum adalah disiplin ilmu dan pembelajaran adalah pembelajaran disiplin ilmu

(*essentialism*). Filosofi ini mewajibkan kurikulum memiliki nama matapelajaran yang sama dengan nama disiplin ilmu, selalu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kecemerlangan akademik.

4. Pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik dari masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan berpartisipasi untuk membangun kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik (*experimentalism and social reconstructivism*). Dengan filosofi ini, Kurikulum 2013 bermaksud untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi kemampuan dalam berpikir reflektif bagi penyelesaian masalah sosial di masyarakat, dan untuk membangun kehidupan masyarakat demokratis yang lebih baik.

Dengan demikian, Kurikulum 2013 menggunakan filosofi sebagaimana di atas dalam mengembangkan kehidupan individu peserta didik dalam beragama, seni, kreativitas, berkomunikasi, nilai dan berbagai dimensi inteligensi yang sesuai dengan diri seorang peserta didik dan diperlukan masyarakat, bangsa dan umat manusia.

B. Landasan Teoritis

Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori “pendidikan berdasarkan standar” (*standard-based education*), dan teori kurikulum berbasis kompetensi (*competency-based curriculum*). Pendidikan berdasarkan standar menetapkan adanya standar nasional sebagai kualitas minimal warganegara yang dirinci menjadi

standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Kurikulum berbasis kompetensi dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan untuk bersikap, berpengetahuan, berketerampilan, dan bertindak.

Kurikulum 2013 menganut: (1) pembelajaran yang dilakukan guru (*taught curriculum*) dalam bentuk proses yang dikembangkan berupa kegiatan pembelajaran di sekolah, kelas, dan masyarakat; dan (2) pengalaman belajar langsung peserta didik (*learned-curriculum*) sesuai dengan latar belakang, karakteristik, dan kemampuan awal peserta didik. Pengalaman belajar langsung individual peserta didik menjadi hasil belajar bagi dirinya, sedangkan hasil belajar seluruh peserta didik menjadi hasil kurikulum.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis Kurikulum 2013 adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, beserta segala ketentuan yang dituangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; dan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

STRUKTUR KURIKULUM

A. Kompetensi Inti

Kompetensi inti dirancang seiring dengan meningkatnya usia peserta didik pada kelas tertentu. Melalui kompetensi inti, integrasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada kelas yang berbeda dapat dijaga. Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut:

1. Kompetensi Inti-1 (KI-1) untuk kompetensi inti sikap spiritual;
2. Kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk kompetensi inti sikap sosial;
3. Kompetensi Inti-3 (KI-3) untuk kompetensi inti pengetahuan; dan
4. Kompetensi Inti-4 (KI-4) untuk kompetensi inti keterampilan.

B. Matapelajaran

Berdasarkan kompetensi inti disusun matapelajaran dan alokasi waktu yang sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Susunan matapelajaran dan alokasi waktu untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah sebagaimana tabel berikut.

MATAPELAJARAN			ALOKASI WAKTU PER MINGGU			
I	II	III	IV	V	VI	
Kelompok A						
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti		4	4	4	4 4 4

2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran	5	5	6	5	5	5
3. Bahasa Indonesia	8	9	10	7	7	7
4. Matematika	5	6	6	6	6	6
5. Ilmu Pengetahuan Alam	-	-	-	3	3	3
6. Ilmu Pengetahuan Sosial	-	-	-	3	3	3
Kelompok B						
1. Seni Budaya dan Prakarya	4	4	4	5	5	5
2. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	4	4	4	4	4	4
JUMLAH ALOKASI		32	3	3	3	3
WAKTU PER MINGGU	3		4	6	6	6
	0					

5

C. Beban Belajar

Beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam satu minggu, satu semester, dan satu tahun pembelajaran.

1. Beban belajar di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dinyatakan dalam jam pembelajaran per minggu. a. Beban belajar satu minggu Kelas I adalah 30 jam pembelajaran. b. Beban belajar satu minggu Kelas II adalah 32 jam pembelajaran. c. Beban belajar satu minggu Kelas III adalah 34 jam pembelajaran. d. Beban belajar satu minggu Kelas IV, V, dan VI adalah 36 jam pembelajaran. Durasi setiap satu jam pembelajaran adalah 35 menit.

2. 2. Beban belajar di Kelas I, II, III, IV, dan V dalam satu semester paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
3. 3. Beban belajar di kelas VI pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
4. 4. Beban belajar di kelas VI pada semester genap paling sedikit 14 minggu dan paling banyak 16 minggu.
5. 5. Beban belajar dalam satu tahun pelajaran paling sedikit 36 minggu dan paling banyak 40 minggu.

D. Kompetensi Dasar

Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu matapelajaran. Kompetensi dasar dibagi menjadi empat kelompok sesuai dengan pengelompokkan kompetensi inti sebagai berikut:

1. kelompok 1: kelompok kompetensi dasar sikap spiritual dalam rangka menjabarkan KI-1;
2. kelompok 2: kelompok kompetensi dasar sikap sosial dalam rangka menjabarkan KI-2;
3. kelompok 3: kelompok kompetensi dasar pengetahuan dalam rangka menjabarkan KI-3; dan
4. kelompok 4: kelompok kompetensi dasar keterampilan dalam rangka menjabarkan KI-4.

E. Muatan Pembelajaran

Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dilakukan melalui pembelajaran dengan pendekatan tematik-terpadu dari Kelas I sampai Kelas VI. Matapelajaran Pendidikan

Agama dan Budi Pekerti dikecualikan untuk tidak menggunakan pembelajaran tematik-terpadu.

Pembelajaran tematik terpadu merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai matapelajaran ke dalam berbagai tema seperti yang terdapat dalam tabel berikut ini.

Filosofi Pendidikan Dasar dalam Kurikulum Sekolah Menengah SLTP/MTs

1. Pengantar

Sebelum dijelaskan filosofi dalam kurikulum yang berlaku di Indonesia saat ini yakni kurikulum 2013, maka perlu dipaparkan terlebih dahulu secara lengkap kurikulum tersebut. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 68 tahun 2013 Tentang Kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum, yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Kurikulum 2013 yang diberlakukan mulai tahun ajaran 2013/2014 memenuhi kedua dimensi tersebut.

2. Rasional Pengembangan Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. **Tantangan Internal.** Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Tantangan internal lainnya terkait dengan perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Saat ini jumlah penduduk Indonesia usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dari usia tidak produktif (anak-anak berusia 0-14 tahun dan orang tua berusia 65 tahun ke atas). Jumlah penduduk usia produktif ini akan mencapai puncaknya pada tahun 2020-2035 pada saat angkanya mencapai 70%. Oleh sebab itu tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana mengupayakan agar sumberdaya manusia usia produktif yang melimpah ini dapat ditransformasikan menjadi sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan melalui pendidikan agar tidak menjadi beban.

2. **Tantangan Eksternal.** Tantangan eksternal antara lain terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi,

kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Arus globalisasi akan menggeser pola hidup masyarakat dari agraris dan perniagaan tradisional menjadi masyarakat industri dan perdagangan modern seperti dapat terlihat di *World Trade Organization* (WTO), *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) Community, *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC), dan *ASEAN Free Trade Area* (AFTA). Tantangan eksternal juga terkait dengan pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknoains serta mutu, investasi, dan transformasi bidang pendidikan. Keikutsertaan Indonesia di dalam studi *International Trends in International Mathematics and Science Study* (TIMSS) dan *Program for International Student Assessment* (PISA) sejak tahun 1999 juga menunjukkan bahwa capaian anak-anak Indonesia tidak menggembirakan dalam beberapa kali laporan yang dikeluarkan TIMSS dan PISA. Hal ini disebabkan antara lain banyaknya materi uji yang ditanyakan di TIMSS dan PISA tidak terdapat dalam kurikulum Indonesia.

c. Penyempurnaan Pola Pikir

Kurikulum 2013 dikembangkan dengan penyempurnaan pola pikir sebagai berikut: 1) pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran berpusat pada peserta didik. Peserta didik harus memiliki pilihan-pilihan terhadap materi yang dipelajari untuk memiliki kompetensi yang sama; 2) pola pembelajaran satu arah (interaksi guru-peserta didik)

menjadi pembelajaran interaktif (interaktif guru-peserta didik-masyarakat-lingkungan alam, sumber/media lainnya); 3) pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran secara jejaring (peserta didik dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja yang dapat dihubungi serta diperoleh melalui internet); 4) pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif-mencari (pembelajaran siswa aktif mencari semakin diperkuat dengan model pembelajaran pendekatan sains); 5) pola belajar sendiri menjadi belajar kelompok (berbasis tim); 6) pola pembelajaran alat tunggal menjadi pembelajaran berbasis alat multimedia; 7) pola pembelajaran berbasis massal menjadi kebutuhan pelanggan (*users*) dengan memperkuat pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap peserta didik; 8) pola pembelajaran ilmu pengetahuan tunggal (*monodiscipline*) menjadi pembelajaran ilmu pengetahuan jamak (*multidisciplines*); dan 9) pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran kritis.

d. Penguatan Tata Kelola Kurikulum

Pelaksanaan kurikulum selama ini telah menempatkan kurikulum sebagai daftar matapelajaran. Pendekatan Kurikulum 2013 untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah diubah sesuai dengan kurikulum satuan pendidikan. Oleh karena itu dalam Kurikulum 2013 dilakukan penguatan tata kelola sebagai berikut: 1) tata kerja guru yang bersifat individual diubah menjadi tata kerja yang bersifat kolaboratif; 2) penguatan manajemen sekolah melalui penguatan kemampuan manajemen kepala sekolah sebagai pimpinan kependidikan (*educational leader*); dan 3) penguatan

sarana dan prasarana untuk kepentingan manajemen dan proses pembelajaran.

e. Penguatan Materi. Penguatan materi dilakukan dengan cara pendalaman dan perluasan materi yang relevan bagi peserta didik.

3. Karakteristik Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut:

1. mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik;
2. sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana dimana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar;
3. mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat;
4. memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
5. kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar matapelajaran;
6. kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi (*organizing elements*) kompetensi dasar, dimana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti;

7. kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat (*reinforced*) dan memperkaya (*enriched*) antar matapelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal).

C. Tujuan Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.

KERANGKA DASAR KURIKULUM

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum menentukan kualitas peserta didik yang akan dicapai kurikulum, sumber dan isi dari kurikulum, proses pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian hasil belajar, hubungan peserta didik dengan masyarakat dan lingkungan alam di sekitarnya.

Kurikulum 2013 dikembangkan dengan landasan filosofis yang memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik menjadi manusia Indonesia berkualitas yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional.

Pada dasarnya tidak ada satupun filosofi pendidikan yang dapat digunakan secara spesifik untuk pengembangan kurikulum yang dapat menghasilkan manusia yang berkualitas. Berdasarkan hal tersebut, Kurikulum 2013 dikembangkan menggunakan filosofi sebagai berikut.

1. Pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Pandangan ini menjadikan Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan budaya bangsa Indonesia yang beragam, diarahkan untuk membangun kehidupan masa kini, dan untuk membangun dasar bagi kehidupan bangsa yang lebih baik di masa depan. Mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan masa depan selalu menjadi kepedulian kurikulum, hal ini mengandung makna bahwa kurikulum adalah rancangan pendidikan untuk mempersiapkan kehidupan generasi muda bangsa. Dengan demikian, tugas mempersiapkan generasi muda bangsa menjadi tugas utama suatu kurikulum. Untuk mempersiapkan kehidupan masa kini dan masa depan peserta didik, Kurikulum 2013 mengembangkan pengalaman belajar yang memberikan kesempatan luas bagi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang diperlukan bagi kehidupan di masa kini dan masa depan, dan pada waktu bersamaan tetap mengembangkan kemampuan mereka sebagai pewaris budaya bangsa dan orang yang peduli terhadap permasalahan masyarakat dan bangsa masa kini.
2. Peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. Menurut pandangan filosofi ini, prestasi bangsa di berbagai bidang kehidupan di masa lampau adalah sesuatu yang harus termuat dalam isi kurikulum untuk dipelajari peserta didik. Proses pendidikan adalah suatu proses yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya menjadi

kemampuan berpikir rasional dan kecemerlangan akademik dengan memberikan makna terhadap apa yang dilihat, didengar, dibaca, dipelajari dari warisan budaya berdasarkan makna yang ditentukan oleh lensa budayanya dan sesuai dengan tingkat kematangan psikologis serta kematangan fisik peserta didik. Selain mengembangkan kemampuan berpikir rasional dan cemerlang dalam akademik, Kurikulum 2013 memposisikan keunggulan budaya tersebut dipelajari untuk menimbulkan rasa bangga, diaplikasikan dan dimanifestasikan dalam kehidupan pribadi, dalam interaksi sosial di masyarakat sekitarnya, dan dalam kehidupan berbangsa masa kini.

3. Pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan kecemerlangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu. Filosofi ini menentukan bahwa isi kurikulum adalah disiplin ilmu dan pembelajaran adalah pembelajaran disiplin ilmu (*essentialism*). Filosofi ini mewajibkan kurikulum memiliki nama matapelajaran yang sama dengan nama disiplin ilmu, selalu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kecemerlangan akademik.
4. Pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik dari masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan berpartisipasi untuk membangun kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik (*experimentalism and social reconstructivism*).

Dengan filosofi ini, Kurikulum 2013 bermaksud untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi kemampuan dalam berpikir reflektif bagi penyelesaian masalah sosial di masyarakat, dan untuk membangun kehidupan masyarakat demokratis yang lebih baik.

Dengan demikian, Kurikulum 2013 menggunakan filosofi sebagaimana di atas dalam mengembangkan kehidupan individu peserta didik dalam beragama, seni, kreativitas, berkomunikasi, nilai dan berbagai dimensi inteligensi yang sesuai dengan diri seorang peserta didik dan diperlukan masyarakat, bangsa dan ummat manusia.

B. Landasan Teoritis

Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori “pendidikan berdasarkan standar” (*standard-based education*), dan teori kurikulum berbasis kompetensi (*competency-based curriculum*). Pendidikan berdasarkan standar menetapkan adanya standar nasional sebagai kualitas minimal warganegara yang dirinci menjadi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Kurikulum berbasis kompetensi dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan untuk bersikap, berpengetahuan, berketerampilan, dan bertindak.

Kurikulum 2013 menganut: (1) pembelajaran yang dilakukan guru (*taught curriculum*) dalam bentuk proses yang dikembangkan berupa kegiatan pembelajaran di sekolah, kelas, dan masyarakat; dan (2) pengalaman

belajar langsung peserta didik (*learned-curriculum*) sesuai dengan latar belakang, karakteristik, dan kemampuan awal peserta didik. Pengalaman belajar langsung individual peserta didik menjadi hasil belajar bagi dirinya, sedangkan hasil belajar seluruh peserta didik menjadi hasil kurikulum.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis Kurikulum 2013 adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, beserta segala ketentuan yang dituangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; dan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

STRUKTUR KURIKULUM

A. Kompetensi Inti

Kompetensi inti dirancang seiring dengan meningkatnya usia peserta didik pada kelas tertentu. Melalui kompetensi inti, integrasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada kelas yang berbeda dapat dijaga. Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut:

1. Kompetensi Inti-1 (KI-1) untuk kompetensi inti sikap spiritual;

2. Kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk kompetensi inti sikap sosial;
3. Kompetensi Inti-3 (KI-3) untuk kompetensi inti pengetahuan; dan
4. Kompetensi Inti-4 (KI-4) untuk kompetensi inti keterampilan.

B. Matapelajaran

Berdasarkan **kompetensi inti** disusun matapelajaran dan alokasi waktu yang sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Susunan matapelajaran dan alokasi waktu untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah sebagaimana tabel berikut.

MATA PELAJARAN		ALOKASI WAKTU PER MINGGU		

MINGGU

1

C. Beban Belajar

Beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam satu minggu, satu semester, dan satu tahun pembelajaran.

1. Beban belajar di Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dinyatakan dalam jam pembelajaran per minggu. Beban belajar satu minggu Kelas VII, VIII, dan IX adalah 38 jam pembelajaran. Durasi setiap satu jam pembelajaran adalah 40 menit.
2. Beban belajar di Kelas VII, VIII, dan IX dalam satu semester paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
3. Beban belajar di kelas IX pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
4. Beban belajar di kelas IX pada semester genap paling sedikit 14 minggu dan paling banyak 16 minggu.
5. Beban belajar dalam satu tahun pelajaran paling sedikit 36 minggu dan paling banyak 40 minggu.

D. Kompetensi Dasar

Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Kompetensi dasar dibagi menjadi empat

kelompok sesuai dengan pengelompokkan kompetensi inti sebagai berikut:

1. kelompok 1: kelompok kompetensi dasar sikap spiritual dalam rangka menjabarkan KI-1;
2. kelompok 2: kelompok kompetensi dasar sikap sosial dalam rangka menjabarkan KI-2;
3. kelompok 3: kelompok kompetensi dasar pengetahuan dalam rangka menjabarkan KI-3; dan
4. kelompok 4: kelompok kompetensi dasar keterampilan dalam rangka menjabarkan KI-4.

1 E. Muatan Pembelajaran

Muatan pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah yang berbasis pada konsep-konsep terpadu dari berbagai disiplin ilmu untuk tujuan pendidikan adalah matapelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

Pada hakikatnya IPA dan IPS dikembangkan sebagai mata pelajaran dalam bentuk *integrated sciences* dan *integrated social studies*. Muatan IPA berasal dari disiplin biologi, fisika, dan kimia, sedangkan muatan IPS berasal dari sejarah, ekonomi, geografi, dan sosiologi. Kedua matapelajaran tersebut merupakan program pendidikan yang berorientasi aplikatif, pengembangan kemampuan berpikir, kemampuan belajar, rasa ingin tahu, dan pengembangan sikap peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial dan alam.

Tujuan pendidikan IPS menekankan pada pemahaman tentang bangsa, semangat kebangsaan, patriotisme, dan aktivitas masyarakat di bidang ekonomi dalam ruang atau *space* wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan pendidikan IPA menekankan pada pemahaman tentang lingkungan dan alam sekitar beserta kekayaan yang dimilikinya yang perlu dilestarikan dan dijaga dalam perspektif biologi, fisika, dan kimia.

Integrasi berbagai konsep dalam matapelajaran IPA dan IPS menggunakan pendekatan *trans-disciplinarity* di mana batas-batas disiplin ilmu tidak lagi tampak secara tegas dan jelas, karena konsep-konsep disiplin ilmu berbaur dan/atau terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dijumpai di sekitarnya. Kondisi tersebut memudahkan pembelajaran IPA dan IPS menjadi pembelajaran yang kontekstual.

Pembelajaran IPS diintegrasikan melalui konsep ruang, koneksi antar ruang, dan waktu. Ruang adalah tempat di mana manusia beraktivitas, koneksi antar ruang menggambarkan mobilitas manusia antara satu tempat ke tempat lain, dan waktu menggambarkan masa di mana kehidupan manusia itu terjadi.

Pembelajaran IPA diintegrasikan melalui konten biologi, fisika, dan kimia. Pengintegrasian dapat dilakukan dengan cara *connected*, yakni pembelajaran dilakukan pada konten bidang tertentu (misalnya fisika), kemudian konten bidang lain yang relevan ikut dibahas. Misalnya saat mempelajari suhu (konten fisika), pembahasannya dikaitkan dengan upaya makhluk hidup berdarah panas mempertahankan suhu tubuh (konten biologi), serta senyawa yang digunakan di dalam sistem AC (konten kimia)

Filosofi Pendidikan dalam Kurikulum Sekolah Menengah Atas

Sebelum dijelaskan filosofi dalam kurikulum yang berlaku di Indonesia saat ini yakni kurikulum 2013, maka perlu dipaparkan terlebih dahulu secara lengkap kurikulum tersebut Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 69 tahun 2013 Tentang Kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah menengah atas/madrasah aliyah Kerangka dasar dan struktur kurikulum Sekolah menengah atas/madrasah aliyah

1. Pengantar

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum, yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Kurikulum 2013 yang diberlakukan mulai tahun ajaran 2013/2014 memenuhi kedua dimensi tersebut.

Rasional Pengembangan Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:

a. Tantangan Internal

Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 (delapan) Standar Nasional

Pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Tantangan internal lainnya terkait dengan perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Saat ini jumlah penduduk Indonesia usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dari usia tidak produktif (anak-anak berusia 0-14 tahun dan orang tua berusia 65 tahun ke atas). Jumlah penduduk usia produktif ini akan mencapai puncaknya pada tahun 2020-2035 pada saat angkanya mencapai 70%. Oleh sebab itu tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana **ayakan** agar sumberdaya manusia usia produktif yang melimpah ini dapat ditransformasikan menjadi sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan melalui pendidikan agar tidak menjadi beban.

b. Tantangan Eksternal

Tantangan eksternal antara lain terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Arus globalisasi akan menggeser pola hidup masyarakat dari agraris dan perniagaan tradisional menjadi masyarakat industri dan perdagangan modern seperti dapat terlihat di *World Trade Organization* (WTO), *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) Community, *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC), dan *ASEAN Free Trade Area* (AFTA). Tantangan eksternal juga terkait

dengan pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas tekno-sains serta mutu, investasi, dan transformasi bidang pendidikan. Keikutsertaan Indonesia di dalam studi *International Trends in International Mathematics and Science Study* (TIMSS) dan *Program for International Student Assessment* (PISA) sejak tahun 1999 juga menunjukkan bahwa capaian anak-anak Indonesia tidak menggemblakan dalam beberapa kali laporan yang dikeluarkan TIMSS dan PISA. Hal ini disebabkan antara lain banyaknya materi uji yang ditanyakan di TIMSS dan PISA tidak terdapat dalam kurikulum Indonesia.

c. Penyempurnaan Pola Pikir

Kurikulum 2013 dikembangkan dengan penyempurnaan pola pikir sebagai berikut: 1) pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran berpusat pada peserta didik. Peserta didik harus memiliki pilihan-pilihan terhadap materi yang dipelajari untuk memiliki kompetensi yang sama; 2) pola pembelajaran satu arah (interaksi guru-peserta didik) menjadi pembelajaran interaktif (interaktif guru-peserta didik- masyarakat- lingkungan alam, sumber/media lainnya); 3) pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran secara jejaring (peserta didik dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja yang dapat dihubungi serta diperoleh melalui internet); 4) pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif-mencari (pembelajaran siswa aktif mencari semakin diperkuat dengan model pembelajaran pendekatan sains); 5) pola belajar sendiri menjadi belajar kelompok (berbasis tim); 6) pola pembelajaran alat tunggal menjadi pembelajaran berbasis alat multimedia; 7) pola pembelajaran berbasis massal menjadi kebutuhan pelanggan (*users*) dengan

memperkuat pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap peserta didik; 8) pola pembelajaran ilmu pengetahuan tunggal (*monodiscipline*) menjadi pembelajaran ilmu pengetahuan jamak (*multidisciplines*); dan 9) pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran kritis.

d. Penguatan Tata Kelola Kurikulum

Pelaksanaan kurikulum selama ini telah menempatkan kurikulum sebagai daftar matapelajaran. Pendekatan Kurikulum 2013 untuk Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah diubah sesuai dengan kurikulum satuan pendidikan. Oleh karena itu dalam Kurikulum 2013 dilakukan penguatan tata kelola sebagai berikut: 1) tata kerja guru yang bersifat individual diubah menjadi tata kerja yang bersifat kolaboratif; 2) penguatan manajemen sekolah melalui penguatan kemampuan manajemen kepala sekolah sebagai pimpinan kependidikan (*educational leader*); dan 3) penguatan sarana dan prasarana untuk kepentingan manajemen dan proses pembelajaran.

e. Penguatan Materi

Penguatan materi dilakukan dengan cara pendalaman dan perluasan materi yang relevan bagi peserta didik.

2. Karakteristik Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut:

1. mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik;
2. sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana dimana

peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar; mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat;

3. memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan; kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar matapelajaran
4. kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi (*organizing elements*) kompetensi dasar, dimana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti;
5. kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat (*reinforced*) dan memperkaya (*enriched*) antarmatapelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal)

. C. Tujuan Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.

3. KERANGKA DASAR KURIKULUM

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum menentukan kualitas peserta didik yang akan dicapai kurikulum, sumber dan isi dari kurikulum, proses pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian hasil belajar, hubungan peserta didik dengan masyarakat dan lingkungan alam di sekitarnya.

Kurikulum 2013 dikembangkan dengan landasan filosofis yang memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik menjadi manusia Indonesia berkualitas yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional.

Pada dasarnya tidak ada satupun filosofi pendidikan yang dapat digunakan secara spesifik untuk pengembangan kurikulum yang dapat menghasilkan manusia yang berkualitas. Berdasarkan hal tersebut, Kurikulum 2013 dikembangkan menggunakan filosofi sebagai berikut:

1. Pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Pandangan ini menjadikan Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan budaya bangsa Indonesia yang beragam, diarahkan untuk membangun kehidupan masa kini, dan untuk membangun dasar bagi kehidupan bangsa yang lebih baik di masa depan. Mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan masa depan selalu menjadi kepedulian kurikulum, hal ini mengandung makna bahwa kurikulum adalah rancangan pendidikan untuk mempersiapkan kehidupan generasi muda bangsa. Dengan demikian, tugas mempersiapkan

generasi muda bangsa menjadi tugas utama suatu kurikulum. Untuk mempersiapkan kehidupan masa kini dan masa depan peserta didik, Kurikulum 2013 mengembangkan pengalaman belajar yang memberikan kesempatan luas bagi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang diperlukan bagi kehidupan di masa kini dan masa depan, dan pada waktu bersamaan tetap mengembangkan kemampuan mereka sebagai pewaris budaya bangsa dan orang yang peduli terhadap permasalahan masyarakat dan bangsa masa kini.

2. Peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. Menurut pandangan filosofi ini, prestasi bangsa di berbagai bidang kehidupan di masa lampau adalah sesuatu yang harus termuat dalam isi kurikulum untuk dipelajari peserta didik. Proses pendidikan adalah suatu proses yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya menjadi kemampuan berpikir rasional dan kecemerlangan akademik dengan memberikan makna terhadap apa yang dilihat, didengar, dibaca, dipelajari dari warisan budaya berdasarkan makna yang ditentukan oleh lensa budayanya dan sesuai dengan tingkat kematangan psikologis serta kematangan fisik peserta didik. Selain mengembangkan kemampuan berpikir rasional dan cemerlang dalam akademik, Kurikulum 2013 memposisikan keunggulan budaya tersebut dipelajari untuk menimbulkan rasa bangga, diaplikasikan dan dimanifestasikan dalam kehidupan pribadi, dalam

interaksi sosial di masyarakat sekitarnya, dan dalam kehidupan berbangsa masa kini.

3. Pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan kecemerlangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu. Filosofi ini menentukan bahwa isi kurikulum adalah disiplin ilmu dan pembelajaran adalah pembelajaran disiplin ilmu (*essentialism*). Filosofi ini mewajibkan kurikulum memiliki nama matapelajaran yang sama dengan nama disiplin ilmu, selalu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kecemerlangan akademik.

4. Pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik dari masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan berpartisipasi untuk membangun kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik (*experimentalism and social reconstructivism*). Dengan filosofi ini, Kurikulum 2013 bermaksud untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi kemampuan dalam berpikir reflektif bagi penyelesaian masalah sosial di masyarakat, dan untuk membangun kehidupan masyarakat demokratis yang lebih baik.

Dengan demikian, Kurikulum 2013 menggunakan filosofi sebagaimana di atas dalam mengembangkan kehidupan individu peserta didik dalam beragama, seni, kreativitas, berkomunikasi, nilai dan berbagai dimensi inteligensi yang sesuai

dengan diri seorang peserta didik dan diperlukan masyarakat, bangsa dan umat manusia.

B. Landasan Teoritis

Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori “pendidikan berdasarkan standar” (*standard-based education*), dan teori kurikulum berbasis kompetensi (*competency-based curriculum*). Pendidikan berdasarkan standar menetapkan adanya standar nasional sebagai kualitas minimal warganegara yang dirinci menjadi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Kurikulum berbasis kompetensi dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan untuk bersikap, berpengetahuan, berketerampilan, dan bertindak.

Kurikulum 2013 menganut: (1) pembelajaran yang dilakukan guru (*taught curriculum*) dalam bentuk proses yang dikembangkan berupa kegiatan pembelajaran di sekolah, kelas, dan masyarakat; dan (2) pengalaman belajar langsung peserta didik (*learned-curriculum*) sesuai dengan latar belakang, karakteristik, dan kemampuan awal peserta didik. Pengalaman belajar langsung individual peserta didik menjadi hasil belajar bagi dirinya, sedangkan hasil belajar seluruh peserta didik menjadi hasil kurikulum.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis Kurikulum 2013 adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, beserta segala ketentuan yang dituangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; dan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

STRUKTUR KURIKULUM

A. Kompetensi Inti

Kompetensi inti dirancang seiring dengan meningkatnya usia peserta didik pada kelas tertentu. Melalui kompetensi inti, integrasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada kelas yang berbeda dapat dijaga.

Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut:

1. Kompetensi Inti-1 (KI-1) untuk kompetensi inti sikap spiritual;
2. Kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk kompetensi inti sikap sosial;
3. Kompetensi Inti-3 (KI-3) untuk kompetensi inti pengetahuan; dan
4. Kompetensi Inti-4 (KI-4) untuk kompetensi inti keterampilan.

B. Matapelajaran

1. Struktur Kurikulum Pendidikan Menengah

Untuk mewadahi konsep kesamaan muatan antara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dan Sekolah

Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, maka dikembangkan Struktur Kurikulum Pendidikan Menengah, terdiri atas Kelompok Matapelajaran Wajib dan Matapelajaran Pilihan.

Isi kurikulum (KI dan KD) dan kemasan substansi untuk matapelajaran wajib bagi antara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan adalah sama.

Matapelajaran pilihan terdiri atas pilihan akademik untuk antara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah serta pilihan akademik dan vokasional untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan. Matapelajaran pilihan ini memberi corak kepada fungsi satuan pendidikan, dan didalamnya terdapat pilihan sesuai dengan minat peserta didik. Struktur ini menerapkan prinsip bahwa peserta didik merupakan subjek dalam belajar yang memiliki hak untuk memilih matapelajaran sesuai dengan minatnya.

MATAPELAJARAN		ALOKASI WAKTU PER MINGGU		
X		XI	XII	
Kelompok A (Wajib)				
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	3	3	3
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	2	2
3.	Bahasa Indonesia	4	4	4
4.	Matematika	4	4	4
5.	Sejarah Indonesia	2	2	2
6.	Bahasa Inggris	2	2	2
Kelompok B (Wajib)				
7.	Seni Budaya	2	2	2

8. Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan	3	3	3
9. Prakarya dan Kewirausahaan	2	2	2
Jumlah Jam Pelajaran Kelompok A dan B per minggu	24	24	24
Kelompok C (Peminatan)			
Matapelajaran Peminatan Akademik (Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah)	18	20	20
Matapelajaran Peminatan Akademik dan Vokasi (Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah)	24	24	24
Jumlah Jam Pelajaran Yang Harus Ditempuh Perminggu (Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah)	42	44	44
Jumlah Jam Pelajaran Yang Harus Ditempuh Perminggu (Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan)	48	48	48

C. Beban Belajar

Beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam satu minggu, satu semester, dan satu tahun pembelajaran.

1. Beban belajar di Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dinyatakan dalam jam pembelajaran per minggu.
 - a. Beban belajar satu minggu Kelas X adalah 42 jam pembelajaran.
 - b. Beban belajar satu minggu Kelas XI dan XII adalah 44 jam pembelajaran.
 Durasi setiap satu jam pembelajaran adalah 45 menit.

2. Beban belajar di Kelas X, XI, dan XII dalam satu semester paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
3. Beban belajar di kelas XII pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
4. Beban belajar di kelas XII pada semester genap paling sedikit 14 minggu dan paling banyak 16 minggu.
5. Beban belajar dalam satu tahun pelajaran paling sedikit 36 minggu dan paling banyak 40 minggu.

Setiap satuan pendidikan boleh menambah jam belajar per minggu berdasarkan pertimbangan kebutuhan belajar peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yang dianggap penting.

D. Kompetensi Dasar

Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu Matapelajaran. Kompetensi dasar dibagi menjadi empat kelompok sesuai dengan pengelompokan kompetensi inti sebagai berikut:

1. kelompok 1: kelompok kompetensi dasar sikap spiritual dalam rangka menjabarkan KI-1;
2. kelompok 2: kelompok kompetensi dasar sikap sosial dalam rangka menjabarkan KI-2;
3. kelompok 3: kelompok kompetensi dasar pengetahuan dalam rangka menjabarkan KI-3; dan
4. kelompok 4: kelompok kompetensi dasar keterampilan dalam rangka menjabarkan KI-4.

BAB VI

FILOSOFI PENDIDIKAN TINGGI

A. Pengantar

Menurut peraturan pemerintah RI nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi³⁶, tujuan pendidikan tinggi adalah:

1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, sedangkan pendidikan profesional merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian. Kedua jenis pendidikan masing-masing, dibagi kembali sebagai berikut:

1. Pendidikan akademik: program sarjana dan program pascasarjana. Program pascasarjana terdiri dari program magister dan doktor.
2. Pendidikan profesional terdiri dari program diploma satu, dua, tiga, dan empat.

³⁶Peraturan pemerintah RI nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan Tinggi

2. Bentuk Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik seperti kriteria yang sudah disebutkan di atas. Penelitian merupakan kegiatan telaah atas kaidah dalam upaya menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenia. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas. Pengertian masing-masing satuan pendidikan tinggi sebagai berikut:

1. Akademi. Menyelenggarakan program pendidikan profesional pada satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian tertentu.
2. Politeknik. Menyelenggarakan program pendidikan profesional pada beberapa bidang pengetahuan khusus.
3. Sekolah tinggi. Menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu pengetahuan tertentu.
4. Institut. Menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian yang sejenis.
5. Universitas. Menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam beberapa

disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian tertentu³⁷.

Berdasarkan UU sistem pendidikan nasional arah penyelenggaraan pendidikan secara umum adalah diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip di atas akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. Pembaharuan pendidikan meliputi pula penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dengan pendidikan yang dikelola masyarakat. Misalnya beberapa catatan tentang pengelolaan pendidikan tinggi:

1. Pengelolaan satuan pendidikan tinggi, dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan (pasal 51 ayat 2)
2. Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola satuan pendidikan di lembaganya. (pasal 50 ayat 6)
3. Penyelenggaraan dan atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan (pasal 53 ayat 1)
4. Badan hukum dimaksud berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan (ayat 53 ayat 3)

³⁷ Indrajit, R. Eko dan R. Djokopranoto. 2006. *Manajemen Perguruan Tinggi Modern*. Yogyakarta: Andi, 2006), h. 4

5. Pendidikan tinggi dapat berbetuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas (pasal 20 ayat 1)
6. Pendidikan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan atau vokasi³⁸.

3. Beberapa Dimensi Perguruan Tinggi

Penyelenggaraan perguruan tinggi adalah dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional, kita perlu memahami terlebih dahulu hakikat utuh PT karena entitas PT mempunyai beberapa dimensi makna. Definisi dan beberapa penjelasan yang telah disampaikan menunjukkan bahwa PT adalah suatu satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi. Tujuan pendidikan tinggi adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Dengan demikian, sekurang-kurangnya ada lima dimensi makna yang melekat pada PT, yakni dimensi keilmuan, dimensi pendidikan, dimensi sosial, dan dimensi etis³⁹.

Dimensi etis

Universitas dikenal sebagai pusat kreativitas dan pusat penyebaran ilmu pengetahuan bahkan demi kreativitas sendiri, tetapi demi kesejahteraan umat manusia. Hakikat tugas dan panggilan universitas adalah mengabdikan diri pada penelitian, pengajaran, dan pendidikan para mahasiswa yang dengan suka rela bergabung dengan para dosen dalam cinta yang sama akan pengetahuan.

³⁸Eko Indrajit..., h. 16

³⁹Serian Wijatno, *Pengelolaan Perguruan Tinggi Secara Efisien, Efektif, dan Ekonomis* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 19

Universitas adalah satu komunitas akademik yang dengan cermat dan kritis membantu melindungi dan meningkatkan martabat manusia dan warisan budaya melalui penelitian, pengajaran, dan berbagai pelayanan yang diberikan kepada komunitas setempat, nasional, dan bahkan internasional.

Universitas bergumul dalam pencarian akan kebenaran secara terus menerus dan mengkomunikasikannya kepada kaum muda dan kepada siapa pun yang belajar berpikir, sehingga dapat secara benar bertindak dan melayani umat manusia dengan lebih baik. Dalam konteks pencarian kebenaran secara utuh, universitas mempunyai kebebasan akademik. Kebebasan akademik berakar pada martabat manusia yang mempunyai kebebasan internal atau kebebasan dasar dalam pribadinya. Namun, disisi lain, tidak dapat tidak manusia harus mencari makna penemuan baru. Makna tersebut akan menjamin bahwa penemuan baru digunakan untuk kesejahteraan otentik individu dan masyarakat secara keseluruhan. Disini terasa kekentalan dimensi moral dan etis penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peran universitas pada perlindungan martabat manusia serta pada tanggungjawab moral penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah beberapa contoh dimensi etis dari makna perguruan tinggi.

Dimensi Keilmuan

Dunia perguruan tinggi adalah dunia ilmu pengetahuan. Tujuan utama pendidikan tinggi adalah mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan dengan proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Hanya di perguruan tinggi melalui pendidikan tinggi ilmu pengetahuan betul-betul dikembangkan dan bukan di pendidikan yang lebih

rendah atau di tempat lain. Universitas adalah satu masyarakat akademik, yang itu masyarakat ilmu pengetahuan yang mempunyai otonomi ilmu pengetahuan berupa kebebasan akademik dalam tiap disiplin ilmu sesuai dengan prinsip dan metode masing-masing. Oleh karena itu, para dosen harus berusaha selalu meningkatkan kompetensi di bidang ilmu pengetahuan dan penelitian yang dikuasainya. Demikian pula, para mahasiswa dirangsang untuk berpikir secara kritis, sistematis, dan taat asas serta mau dan mampu belajar seumur hidup.

Dimensi pendidikan

Pendidikan tinggi adalah pendidikan, yaitu pendidikan pada tingkat tinggi. Namun, hal ini sering menimbulkan polemik, apakah memang betul bahwa proses yang terjadi di universitas merupakan suatu pendidikan atau suatu pembelajaran karena arti pendidikan lain sama sekali dengan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran mahasiswa diusahakan menjadi orang yang belajar, mau belajar terus menerus. Proses pembelajaran umumnya bersifat formal. Sebaliknya, pendidikan adalah proses menyiapkan manusia muda menjadi manusia dewasa, yaitu manusia yang mandiri dan bertanggungjawab. Proses pendidikan bersifat informal dan terjadi terutama di dalam keluarga, tetapi dapat pula dilakukan di sekolah dan masyarakat. Dalam proses pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, tidak ada pengaturan, kurikulum, maupun penjenjangan. Pokoknya tak ada struktur atau sistem, yang ada adalah penjenjangan, pengaturan, perencanaan, struktur, dan sistem mengenai pembelajaran. Namun, polemik mungkin dapat didamaikan dengan penjelasan bahwa di dalam perguruan tinggi terjadi pendidikan melalui pembelajaran. Pendidikan dapat

diberikan, baik dalam kurikulum intra, kurikulum ekstra, maupun kurikulum tersembunyi. Dalam kurikulum intra pendidikan dapat dilakukan dalam bentuk penjelasan dan contoh, aplikasi ilmu pengetahuan. Dalam kurikulum ekstra, pendidikan dapat dilakukan dalam seni budaya, seni olahraga, seni organisasi, dan sebagainya. Dalam kurikulum tersembunyi, pendidikan dapat dilakukan dalam bentuk contoh nyata pengaturan dan pengelolaan universitas. Disiplin, keterbukaan, pelayanan, bantuan, pada yang lemah, kejujuran, kerja keras, dan sebagainya yang diperhatikan dalam pengelolaan universitas adalah nilai-nilai konkrit yang merupakan contoh nyata untuk pendidikan.

Dimensi Sosial

Penemuan ilmiah dan penemuan teknologi telah menciptakan pertumbuhan ekonomi dan industri yang sangat besar. Melalui pertumbuhan ekonomi dan industri, kesejahteraan manusia pun ditingkatkan. Melalui kegiatan dan perjuangan para ahli dan mahasiswa, kehidupan demokrasi ditingkatkan, dan martabat manusia lebih dihargai. Perguruan tinggi mempersiapkan para mahasiswa untuk mengambil tanggungjawab di dalam masyarakat. Dari para lulusannya, masyarakat mengharapkan pembaharuan dan perbaikan terus menerus dalam tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Lebih lanjut, melalui pengajaran dan penelitian, perguruan tinggi diharapkan memberikan sumbangan dalam memecahkan berbagai problem yang sedang dihadapi masyarakat seperti kekurangan pangan, ketidakadilan, kebodohan, dan sebagainya.

Dimensi Korporasi

Perguruan tinggi memberikan jasa kepada masyarakat berupa pendidikan tinggi dalam bentuk proses belajar mengajar dan penelitian. Yang diajarkan dan diteliti adalah ilmu pengetahuan. Jadi bisnis pendidikan tinggi adalah ilmu pengetahuan. Perguruan tinggi mempunyai pelanggan, yaitu para mahasiswa dan masyarakat, pengguna lulusan. Perguruan tinggi menghadapi persaingan, yaitu antar perguruan tinggi lain, baik dari dalam maupun luar negeri. Apabila mahasiswa perguruan tinggi terlalu sedikit, perguruan tinggi tidak dapat membiayai dirinya sendiri, sehingga mengalami defisit dan kalau terus menerus demikian, kelangsungan hidupnya akan terancam. Ada semacam *break even point* yang harus dicapai dalam penyelenggaraan perguruan tinggi. Perguruan tinggi memiliki dan mengelola berbagai sumber daya seperti manusia, barang-barang, peralatan, keuangan, dan metode. Perguruan tinggi perlu memperkenalkan produknya kepada masyarakat agar dikenal dan “dibeli”. Semuanya menunjukkan kesamaan antara perguruan tinggi dengan perusahaan. Inilah dimensi korporasi perguruan tinggi.

Semua dimensi di atas tak terpisah secara ketat, tetapi saling berhubungan, saling menunjang, saling mempengaruhi, dan ada beberapa yang tumpang tindih⁴⁰.

Darma Universitas: Misi atau Ilusi

Sifat yang menjadi pembeda utama antara universitas terkemuka di berbagai negara maju dengan universitas di Indonesia adalah bahwa di universitas-

⁴⁰Indrajit, h. 35 dan Serian Wijayanto, h. 19

universitas besar terjadi rangkaian aktivitas kajian ilmiah yang sangat intensif, khususnya di dalam pengembangan-pengembangan pengetahuan, dan teknologi yang terbaru. Dari universitas besar itu senantiasa lahir teori-teori baru, ilmu-ilmu baru, eksperimen-eksperimen ilmiah, pengembangan dan pengujian metode-metode baru, serta produksi teknologi terbaru. Di Indonesia baru bisa membanggakan alumni yang lulus setiap tahun, belum pada jenis ilmu baru yang dihasilkan.

Komponen aktivitas ilmiah di dalam universitas adalah komponen yang paling penting, dan selalu didukung oleh dana serta kemudahan lainnya yang besar seringkali melalui kerjasama dengan dunia industri. Beberapa universitas serupa itu ketika menempatkan komponen penyelidikan pada tingkat yang tertinggi, universitas itu dapat disebut universitas *research*. Dibandingkan dengan universitas di Indonesia yang didominasi oleh kegiatan belajar mengajar, yang menjadikan universitas kita lebih tepat sebagai universitas *teaching university*.

Dalam universitas *research* hasil-hasil penelitian itulah yang kemudian disalurkan menjadi bahan pengajaran, sedangkan di dalam *teaching university*, pengajaran berlaku hampir-hampir tanpa hubungan apapun dengan *research*. Di sini kedudukan penelitian berada pada tingkat rendah. Staf akademik bagi universitas ini, adalah staf pengajar saja. Mereka hanya mengajar dan mengajar. Sangat mungkin, bahwa disini, bukan hanya karena dana, waktu dan fasilitas *research* saja yang tidak memadai, tetapi juga karena staf pengajar sesungguhnya tak berkemampuan mengadakan penyelidikan. Karena itu di dalam aktivitas mengajar, mereka hanya menjadi pemakai

ilmu. Bahaya yang terjadi disini adalah bahwa staf pengajar yang hanya mengosumsi ilmu, tanpa sadar akan mengosumsi ilmu-ilmu yang bukan saja sudah usang tapi sudah kadaluarsa atau tidak relevan lagi.

Universitas seharusnya mewujudkan diri dalam bentuk tiga: pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Universitas berfungsi sebagai penyebar ilmu pengetahuan, sebagai lembaga pengembang ilmu pengetahuan, dan sebagai lembaga penerap pengetahuan. Tanpanya konsep ini tidak banyak lagi mendorong universitas untuk hidup sebagai pengembang ilmu pengetahuan. Dharma perguruan tinggi ibaratnya seperti segitiga sama sisi, di dalam wujudnya lebih banyak berbentuk sebagai segitiga sama kaki, dengan garis alas (pengajaran) yang sangat panjang. Akibatnya terhadap situasi bangsa adalah masih tetapnya bergantung pada ilmu dari luar, dan masyarakat tetap tak cukup menikmati kehadiran universitas. Dengan singkat universitas tak berhasil dengan misinya.

Oleh karena itu universitas perlu mengadakan peralihan paradigma yang menghasilkan suatu tingkat kemandirian dimana universitas sedikitnya harus:

1. mampu menghasilkan sumberdaya manusia yang berkompeten untuk pengembangan ilmu dan teknologi
2. mampu menghasilkan sumberdaya manusia yang comitted untuk mengolah potensi-potensi pembangunan, baik yang berbentuk sumberdaya alam maupun yang memerlukan pengolahan lebih lanjut.
3. Mampu menghasilkan sumberdaya manusia yang pakar meningkatkan produktivitas, modal, dan

investasi, termasuk investasi di dalam rangka peningkatan produktivitas universitas.

4. Mampu mendidik sumberdaya manusia yang peka dan termotivasi untuk mengadakan penerapan ilmu dan teknologi demi kepentingan pembangunan
5. Mampu menghasilkan tenaga-tenaga terdidik secara ilmiah tetapi yang tetap tidak lepas dari keterkaitannya dengan kehidupan budaya, agama, dan nasionalisme.

Mengantisipasi Tahun 2020 dan Sesudahnya

Pendidikan nasional sedang dan akan diuji oleh perkembangan zaman yang ada. Bangsa-bangsa yang maju, yang sudah siap bertarung di dalam pertarungan kesejagatan, akan menjadi pemain aktif dan agresif, sedangkan bangsa yang baru atau sedang berkembang mungkin terpaksa memainkan peran yang pasif dan defensif, terutama agar tidak kalah.

Rentak pertarungan dan aturan persaingan global tidak mustahil ditentukan oleh pemain yang terkuat, sehingga pemain yang lemah hanya menerima tersisih dan menerima berbagai konsekwensi yang tidak menguntungkan. Ini sebuah konsekwensi logis yang akan muncul apabila pendidikan tidak mampu memberdayakan bangsa untuk bertarung secara obyektif dan terbuka di arena internasional. Banyak sekali tanda-tanda yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia terutama generasi mudanya, yang sudah sewaktunya sudah melangkahkan kaki memasuki masa depan, sebenarnya masih jauh dari siap.

Bahwa akan terjadi perubahan besar dari dalam hampir semua aspek kehidupan, bahwa perubahan tersebut akan berlangsung semakin hari semakin terakselerasi:

1. Bahwa peran ilmu pengetahuan dan teknologi akan mengambil posisi yang sentral yang langsung memengaruhi nilai-nilai seni, moral, dan agama.
2. Bahwa pertarungan dan persaingan hidup antara bangsa-bangsa tidak akan terbatas di bidang ekonomi saja, tetapi juga di berbagai bidang yang lainnya, termasuk bidang budaya dan ideologi.
3. Bahwa karena pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat, nilai-nilai moral dan agama akan langsung tertantang, dan bukan mustahil akan menimbulkan sistem nilai “beri” yang berbeda dari pada apa yang dikenal sampai saat ini.
4. Bahwa karena pengaruh teknologi yang semakin menguasai pola hidup manusia sehari-hari, teknologi, tidak lagi terbatas sebagai masalah para ahli teknologi tetapi meluas menjadi masalah etis dan estetis yang memerlukan reinterpretasi dan rekontektualisasi etika sosial, dan melibatkan masyarakat awam sekalipun.

Keempat kemungkinan di atas seakan semakin muncul sebagai realitas hidup yang tidak dapat dianggap remeh. Universitas harus merasa berkewajiban menyiasatinya. Tak ada sebuah bangsa yang sedang berkembang yang dapat bertahan menghadapi perubahan dan pengaruh tersebut apabila bangsa itu tidak menyiapkan diri, karena bagaimanapun, negara-negara maju, pada saat mulai memasuki abad ini, telah lebih antisipatif, proaktif, dan karenanya telah lebih dulu siap, meraka telah lebih dulu berada di dalam kondisi yang jauh lebih menguntungkan.

Ketika *Asian Free Trade Assosiation* (AFTA)⁴¹, menjadi kenyataan, ini berarti bahwa batas-batas gerak dunia perdagangan yang intensif, bahkan yang mungkin agresif, akan semakin kabur, langung atau tidak langsung, gejala ini pasti berdampak di dalam perkembangan universitas. Tetapi sampai saat ini sangat sulit untuk menemukan universitas mana, di luar fakultas ekonomi, yang memasukkan program kerjasama regional seperti AFTA dan *Asia Fasific Economi Corporation* (APEC) pada tahun 2020, serta yang bersifat global seperti dalam konteks *World Trade Organization* (WTO), sebagai motivasi persiapan generasi muda memasuki era tersebut. Bukan dalam berbagai kerjasama segitiga pertumbuhan, dimana Indonesia langsung terlibat (IMT, IMB, IAP, dan IMS) program pertumbuhan serupa ini tidak diolah sebagai bagian dari studi pembangunan masa depan⁴².

Program kurikuler lembaga pendidikan tinggi hampir-hampir tidak menjamah persoalan serupa itu, dan tetap terpaku pada ilmu-ilmu tradisional yang dibakukan. Universitas di Indonesia pada umumnya, sampai saat ini seperti tidak peka mengenai berbagai perkembangan sekelilingnya, yang menyangkut kepentingan bangsa di masa depan.

⁴¹Winarno Surakhmad, *Pendidikan Nasional: Strategi dan Tragedi* (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 435

⁴²Muhammad Said Ramadan Al-Buti dan Tayyib Tizini, *Finding Islam: Dialog Tradisionalisme-Liberalisme Islam*, terj. Ahmad Mulyadi dan Zuhairi Misrawi, judul asli *Al-Islam wa al-'Asr: Tahhdiyat wa Afaq*, (Jakarta: Erlangga, 1998), h. 11

Reformasi Pendidikan Tinggi

Jepang pernah mengenal reformasi yang fundamental, yang tercatat di dalam sejarah sebagai Restorasi Meiji. Di dalam bahasa reformasi kita sekarang, di Jepang telah berlaku perubahan paradigma, dari paradigma feodal di Zaman Ninja dan yang tertutup ke paradigma yang lebih terbuka, yang memungkinkan terjadinya perubahan modern, yang berarti memungkinkan terjadinya kemajuan.

Pada masa itu, mayoritas sumber daya manusia yang terlibat di dalam proses pembangunan adalah mereka yang hanya berpendidikan rendah. Mereka yang berpendidikan menengah, apalagi yang berpendidikan universitas, berjumlah sangat sedikit. Ketika kemudian telah tampak bahwa pembangunan di Jepang mulai menjadi sangat dinamis dan produktif, ternyata di dalam sektor pendidikan, Jepang telah menempuh strategi menghilangkan tenaga-tenaga pembangunan yang hanya berpendidikan rendah, dan secara sangat signifikan memperbesar jumlah tenaga-tenaga yang berpendidikan menengah, bukan (tidak) pada tingkat universitas.

Tenaga terdidik yang berhasil menggerakkan proses kemajuan di Jepang ternyata hanya sebagai kecil yang memulai tingkat pendidikan tinggi. Kenaikan jumlah angkatan pembangunan yang terdidik pada tingkat universitas terjadi tidak seberapa tinggi, dan itu saja pun ternyata telah mampu menempatkan citra Jepang pada kedudukan yang disegani bangsa-bangsa lain. Kalau berbagai studi menunjukkan korelasi yang tinggi antara tingkat pendidikan dengan keberhasilan pembangunan, Jepang memberi sebuah pengalaman yang menunjukkan

bahwa keberhasilan pembangunan tidak perlu diartikan sebagai keharusan mendidik sebanyak mungkin orang untuk mencapai tingkat sekolah yang tertinggi. Setidaknya itulah yang terjadi pada saat peralihan menuju Jepang modern.

Kita perlu belajar dari apa yang dilakukan oleh Jepang. Kita dapat mempermasalahkan komposisi pendidikan sumberdaya manusia yang dibutuhkan untuk satu dua generasi mendatang, dengan memperhitungkan berbagai situasi dan kondisi yang sedang berkembang, apakah reformasi fundamental pada saat ini memang mempersyaratkan adanya lulusan universitas yang lebih banyak berbanding dengan tenaga-tenaga pembangunan dengan dasar pendidikan menengah, alternatif mana yang lebih efektif, dan efisien, apa yang akan, harus dapat dicapai dengan tersedianya tenaga-tenaga terdidik tingkat universitas. Prioritas kita harus dimana?

Persoalan universitas pada tingkat institusional perlu mengutamakan kejelasan persoalan pada tingkat konsetual, karena di dalam krisis yang melanda bangsa ini sekarang telah mencuat realitas bahwa persoalan pendidikan tidak hanya sebatas persoalan mikroskopik. Karenanya, di dalam mempelajari masalah-masalah yang berkaitan dengan peningkatan kualitas universitas, pandangan kita pada saat ini tidak dapat tidak dapat dibatasi menjadi pandangan universitas-sentris. Di dalam memahami persoalan pendidikan secara makroskopik, masalah universitas hanya sebuah bagian dari Gestalt permasalahan pendidikan yang besar.

Perbaiki mutu pembelajaran di tingkat universitas misalnya, banyak berkaitan dengan mutu pembelajaran di tingkat dasar dan menengah. Universitas seringkali hanya

memberikan komentar dan penilaian yang kurang kepada prestasi tingkat pendidikan menengah. Dengan kata lain peningkatan mutu universitas yang dikehendaki adalah bagian dari dan berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan dalam arti yang lebih luas. Artinya kita tidak dapat memperbaiki mutu pendidikan dengan jalan menanganinya secara parsial, bahkan kita tidak dapat memulai reformasi universitas secara mendasar tanpa mengaitkannya dengan dan sumber dari keseluruhan kehidupan. Alasannya sangat jelas: pendidikan yang kita bicarakan adalah pendidikan yang menyangkut kehidupan yang luas, dari dan untuk kehidupan seluruh bangsa⁴³.

Reformasi Paradigmatis ke Reformasi Strategis

Dalam perjalanan sejarah pendidikan bangsa ini, dasar ideologis pendidikan sejak pertengahan hingga jelang akhir abad ke-20, tidak pernah berubah. Di dalam konstitusi dengan jelas tertera aspirasi kemajuan melalui pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengembangkan kebudayaan bangsa dan mengembangkan kebudayaan nasional. Di dalam konstitusi yang sama, pandangan kultur antropologi tidak pernah berubah: manusia dipandang sebagai manusia seutuhnya. Namun di dalam rentang waktu sesingkat (selama) itu, perlahan tetapi pasti, ternyata terjadi juga perubahan yang sangat mendasar. Perubahan terjadi tidak di dalam rumusan formalnya, tetapi didalam penafsiran dan perlakuan para penanggungjawab dan pelaku pendidikan, didasari atau

⁴³Winarno Surakhmad, *Pendidian Nasional: Strategi dan Tragedi*, (Jakarta: Kompas, 2009), h. 454

tidak, dipahami atau tidak, disengaja atau tidak, terhadap makna dan tujuan pendidikan.

Bukti-bukti kekuatan ideologi dikemukakan dari dan terbatas hanya pada peristiwa sejarah tertentu, yang berarti bahwa rangkaian pembuktian empiris hanya terpaku pada kekuatan politis yang dominan di masa lalu. Dengan sikap yang terpaku dimasa lalu, pendidikan politik tersebut menjadi pendidikan yang tertutup. Jauh dari sifat terbuka dan kontekstual. Dan itu memasung akal manusia sepanjang sejarah. Tidak terbuka peluang untuk memasalahkan kekuatan pancasila menghadapi masa depan, lebih masa yang nanti akan mejadi masa yang diaruhi oleh generasi muda setelah generasi tua berlalu. Alasan keteraturan itu sangat sederhana (tetapi sekaligus sangat berbahaya): karena “buku pintar” pemerintah telah menggariskan begitu, maka tidak ada lagi ruang untuk menjadi kreatif. Dengan paradigma pendidikan yang demikian, maka bukan saja manusia tidak dianjurkan berfikir, tetapi juga bahwa berfikir itu berbahaya! Ego: pencerdasan kehidupan bangsa, berakhir sebagai pembekuan. Pembekuan itu adalah situasi yang subur untuk melahirkan pembodohan.

Ambilah contoh pendidikan politik sebagai misal, yang bersumber dari seperangkat nilai kehidupan sebagai yang terangkum di dalam mukaddimah UUD, yang kemudian dipersempit menjadi: pendidikan Pancasila, yang dipersempit lagi menjadi P-4. Tanpa merubah perangkat nilai yang kemudian dikenal sebagai nilai-nilai pancasila, dan dengan niat yang baik sekalipun, tetapi dengan pemahaman pedagogis dan metodologis yang tidak benar, semakin hari semakin terasa betapa menjaratnya pendekatan pendidikan politik tersebut. Manusia sudah

tidak diperlukan untuk bergairah berfikir kritis, karena segala sesuatu di dalam P-4 sudah dipikirkan dan diracik oleh pemerintah menjadi sejumlah “butir” dari sebuah ideologi yang sakti, yang cukup dihapalkan saja.

Hari ini krisis tidak hanya membawa bala semata-mata. Krisis ternyata membawa juga hikmah. Dengan krisis yang begitu intensif, dan yang telah memutar balik pola-pola kehidupan yang dicoba ditata melalui pendekatan masa lalu, maka apa yang semula hanya dirasa-rasakan dan diduga secara samar-samar, kini menjadi semakin jelas. Dengan demikian, maka himbauan untuk menggulirkan sebuah reformasi yang lebih mendasar, tidak dianggap sebagai himbauan yang berlebihan.

Sebaliknya himbauan itu, disikapi sebagai sebuah kemutlakan. Di dalam dunia universitas diharapkan berperan secara sangat menentukan, reformasipun sudah tidak dapat ditangguhkan. Paradigma pendidikan masa lalu harus secara radikal diganti dengan paradigma baru, yang secara sederhana dapat disimpulkan sebagai peralihan dari pandangan yang berkiblat (kepentingan) masa lalu ke pandangan yang terarah ke (eksistensi) masa depan. Jadi yang diperlukan bukan sekedar perubahan paradigma. Dengan perubahan itu kita harus semakin kritis mempertanyakan apakah pilihan paradigma adalah pilihan yang strategis.

Secara lebih rinci, peralihan paradigma pendidikan yang berorientasi ke masa lalu ke paradigma pendidikan masa depan yang strategis antara lain harus berarti:

1. Peralihan dari pendidikan yang mengutamakan nilai kehidupan budaya feodal aristokrasi ke

pendidikan yang menggalakkan kehidupan nilai budaya demokrasi.

2. Peralihan pendidikan yang memihak ke kepentingan penguasa dan kekuasaan ke pendidikan yang mengutamakan kepentingan rakyat.
3. Peralihan pengelolaan pendidikan yang berpusat secara sentral kepada pengelolaan pendidikan berbasis kekuatan masyarakat.
4. Peralihan sikap kependidikan yang mengutamakan keseragaman, ke sikap pendidikan yang menghargai keberagaman.
5. Peralihan pola manajemen pendidikan yang memupuk ketergantungan masyarakat, ke pola manajemen pendidikan yang mengutamakan kemandirian.
6. Peralihan dari pendidikan yang mengkondisi masyarakat agar ikut saja pada gaya pemerintahan melalui kebijaksanaan pemerintah, ke pendidikan yang menyadarkan masyarakat akan pentingnya keteraturan dan kepastian hukum.
7. Peralihan dari metodologi pendidikan yang mengutamakan pengawetan, ke metodologi pendidikan yang merintis pengembangan ilmu dan pemanfaatan teknologi. Peralihan dari pandangan kependidikan yang lebih banyak bersifat pelaksanaan kewajiban, ke pandangan yang mendidik dan menyadarkan warga negara mengenai hak-hak azasi manusia.
8. Peralihan dari orientasi kependidikan yang mengutamakan pelestarian dan keseimbangan dari sudut kepentingan politik, ke orientasi pendidikan

yang mengutamakan perubahan, pertumbuhan, dan kemajuan.

9. Peralihan dari sikap kependidikan yang konformistik, memasung, dan punitif, ke sikap kependidikan yang motivatif, merangsang dan menghargai kreativitas dan inovasi.
10. Peralihan dari pandangan pendidikan yang tertutup, isolasionistik, terpola (dibakukan), ke pandangan yang merangsang kerjasama secara terbuka dan fleksibel
11. Peralihan dari pola dan program kurikuler yang statik, skolastik, tradisional. Ke pola dan program kurikuler yang dinamis, riil, inovatif, dan kontekstual.

Daftar ini masih bisa diperpanjang karena memang masih banyak segi pendidikan masa lalu yang perlu dikaji dan disempurnakan, diubah, atau diganti dengan paradigma pendidikan yang diyakini akan lebih berorientasi strategi ke masa depan. Kini adalah masa yang paling tepat, dan juga paling mungkin, untuk mengadakan usaha peralihan strategi tersebut. Ketidakpekaan dan kegagalan kita semua untuk bersama-sama menggulirkan reformasi tersebut, akan mempersulit terjadinya perubahan-perubahan yang lebih mendasar di masa depan.

Daftar Bacaan

- A. R. Tilaar, *Paradigma Pendidikan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000
- A.R. Tilaar, *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia: Strategi Refomasi Pendidikan Nasional*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999
- Abdul Azis Wahab, *Gagasan dan Permikiran: Pembangunan Pendidikan di Indonesia*, Bandung: FPIPS, 2011
- Abdul Mudjib dan Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana, 2008
- Agus Irianto, *Pendidikan Sebagai Investasi dalam Pembangunan Suatu Bangsa*, Jakarta: Kenaca, 2011
- Ahmad D. Marimba, *Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: al-Ma'arif, 1980
- Ahmad Tafsir (ed.) *Epistemologi Untuk Ilmu Pendidikan Islam*, Bandung: Fakultas Tarbiyah IAIN Bandung
- Ahmad Tafsir, *Filsafat Pendidikan Islami: Integrasi Jasmani, Rohani dan Kalbu Memanusiakan Manusia*. Bandung: Remaja Rosdakarya, cet. ke-1, 2006
- Ahmad Tafsir, *Filsafat Umum: Akal dan Hati Sejak Thales Sampai Capra*, Bandung: Rosdakarya, 2008

Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djatai Bandung, 1995

Akhyar Yusuf Lubis, *Filsafat Ilmu Klasik Hingga Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pres, 2014

Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*, Jakarta: Kencana, 2012

Bertrand Russel, *History of Westren Philosophy*, London: George Allen dan Unwin Ltd, 1974

Brayen Magee, *Memoar Seorang Filosof: Pengembangan di Belantara Filsafat*, Bandung: Mizan, 2005

Dedi Supriadi, *Jaringan Pengaman Sosial Pendidikan: Model Pengelolaan yang Ideal, Kunci-kunci Keberhasilan Komite, dan Fungsi Terapi Sosial*, Bandung: Alfabeta, 2000

Edwar Sallis, *Total Quality Management in Education: Manajemen Mutu Pendidikan*, Jogjakarta: IRCiSoD, 2008

Frangk W. Banghart Albert Trull, *Educational Planning*, New York, The Macmillan Company.

Hery Noer Aly, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: logos Wacana Ilmu, 1999

http://diktis.kemenag.go.id/index.php?artikel=lihat&id=330#.VGlezGd_aOU. Diakses Hari Senin tanggal 9 Mei 2016

Imam, Suprayogo, *Quo Vadis Madrasah: Gagasan, Aksi dan Solusi Pembangunan Madrasah*, Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2007

Indrajit, R. Eko dan R. Djokopranoto. 2006. *Manajemen Perguruan Tinggi Modern*. Yogyakarta: Andi, 200

John Naisbitt, *Megatrends Asia: Delapan Megatrend Asia yang Mengubah Dunia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996,

John Naisbitt, *Mind Set: Tata Pola Pokir Anda Untuk Membaca Peluang Bisnis Masa Depan dan Menuai Profit*, Jakarta: Daras, 2009.

Karen Armstrong, *History of God: the 4000 Year Quest of Judaism, Christianity and Islam*, terj. *Sejarah Tuhan: Kisah Pencarian Tuhan Yang Dilakukan oleh Orang-Orang Yahudi, Krinsten, dan Islam*, Bandung: Mizan, 2001.

M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009

Made Pidarta, *Landasaan Pendidikan: Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007

Maksum, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta: Logos, 1999

Muhaimin, dkk, *Manajemen Pendidikan: Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah*, Jakarta: Kencana, 2009

Muhaimin, *Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam*, Jakarta: Rajawali, 2011

Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, Surabaya: Pustaka Pelajar, 2003

Muhammad Said Ramadan Al-Buti dan Tayyib Tizini, *Finding Islam: Dialog Tradisionalisme-Liberalisme Islam*, terj. Ahmad Mulyadi dan Zuhairi Misrawi, judul asli *Al-Islam wa al-'Asr: Tahhdiyat wa Afaq*, Jakarta: Erlangga, 1998

Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam*, Jakarta: Erlangga, 2007

Nana Syaoudih Sukmadinata, dkk, *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah: Konsep, Prinsip, dan Instrumen*, Bandung: Kusuma Karya, 2002

Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: Rosda, 2006

Oman Mohammad at-Taumy Asy-Syaibany, *Falsafah Pendidikan Islam*, terj. Hasan Langgulung, judul asli,

Falsafah at-Tarbiyah al-Islamiyah, Jakarta: Bulan Bintang, 1979

Osman Bakar, dalam Al-Huda, *Pengaruh Globalisasi terhadap Peradaban*, Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Islam, Jakarta: Ismalic Centrer Al-Huda

Peraturan pemerintah RI nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan Tinggi

Pritjof Capra, *Menyatu Dengan Semesta*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 1991

Pritjof Capra, *The Turning Point: Titik Balik Peradaban Sains, Masyarakat, dan Kebangkitan Kebudayaan*, terj. M. Thoyibi, judul asli *The Turning Point Science, Society, and The Rising Culture*, Bandung: Jejak, 2007

Putro, Suadi, 1998, *Mohammad Arkoun Tentang Islam dan Modernitas*, Jakarta: Paramadina.

Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2008

Russel G. Davis, dkk, *Planning Education For Development Volume II*, Cabridge: Massachusetss, 1980

Saiful Anam, Indra Djati Sidi: *Dari ITB untuk Pembaharuan Pendidikan*, Bandung: Teraju, 2005

Serian Wijatno, *Pengelolaan Perguruan Tinggi Secara Efisien, Efektif, dan Ekonomis* Jakarta: Salemba Empat, 2009

Soedijarto, *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*, Jakarta: Kompas, 2008

Suadi Putro, *Mohammad Arkoun Tentang Islam dan Modernitas*, Jakarta: Paramadina, 1998

Suedjatmoko, dkk, *Mencari Strategi Pengembangan Pendidikan Nasional Menjelang Abad XXI*, Jakarta: Grasindo

Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Press, 2005

Taufiqurrahman Syahuri, *Tafsir Konstitusi: Berbagai Aspek Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.

Udin Syaifuddin Sau'ud dan Abin Syamsuddin Makmun, *Perencanaan Pendidikan: Suatu Pendekatan Komprehensif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional no 20 Tahun 2003

UUD' 45 (Konstitusi) Republik Indonesia Hasil Amandemen I, II, III, IV, Bukittinggi: Irama-Lestari.

Waini Rasyidin, *Modul Landasan Filosofis Pendidikan Dasar: Modul 2 antara Manusia dan Pendidikan*, Bandung: Program Magister UPI Bandung, 2007

Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran*, Jakarta: Kencana, 2009

William F. On'nel, *Ideologi-ideologi Pendidikan*, terj. Omi Intan Naomi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran: Teori Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*, Jakarta: Kencana, 2008

Winarno Surahmat, *Pendidikan Nasional: Strategi dan Tragedi*, Jakarta: PT. Kompas Media Utama, 2009

Zainuddin, *Reformasi Pendidikan: Kritik Kurikulum dan Manajemen Berbasis Sekolah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Zaprunkhan, *Filsafat Ilmu Sebuah Analisa Komtemporer*, Jakarta: Rajawali Press, 2015

Ziauddin Sardar, *Kembali ke Masa Depan: Syariat sebagai Metodolgi Pemecahan Masalah*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005

TENTANG PENULIS



Wedra Aprison adalah dosen Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Bukittinggi dengan mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dan Filsafat Pendidikan Islam. Lahir di Ronah Mahat Kecamatan Gunung Mas Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, 24 Mei 1972. Menempuh pendidikan dasar di Mahat, SD dan SMP. SLTA di Pondok Pesantren Thawalib dan ujian persamaan di MAN Gunung Padang Panjang. S1 Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang tahun 1993. Meraih gelar Megister Pendidikan Islam (S2) tahun 1998. Pada tahun 2008 penulis melanjutkan perkuliahan di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan konsentrasi Pendidikan Islam (S3) dan menyelesaikannya pada tahun 2012.

Penulis aktif melakukan penelitian dan penulisan ilmiah lainnya. Di antaranya: Makalah “Pendidikan: Revolusi Peradaban Islam” Juara 1 lomba Penulisan

Ilmiah Mahasiswa Pascasarjana UIN Bandung tahun 2009.
Buku Ilmiah “Konsep Pendidikan Dalam Islam: Analisis
Term Tarbiyah, Ta’lim, dan Ta’dib”. Tahun 2013,
makalah “Madrasa: Epistemological Basis of Humanistic-
Religious” dipresentasikan pada Simposium Internasional
“Empowering Madrasa In the Global Context” Badan
Litbang dan Diklat Kemenag RI di Hotel Horison Bekasi.
Terakhir Buku Filosofi Pendidikan Indonesia ini.

Buku Wedra

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

17%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	smalbncilacap.files.wordpress.com Internet Source	9%
2	www.zonependidikan.co.cc Internet Source	5%
3	repository.unand.ac.id Internet Source	5%
4	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	4%
5	endar123456789.blogspot.com Internet Source	3%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 3%